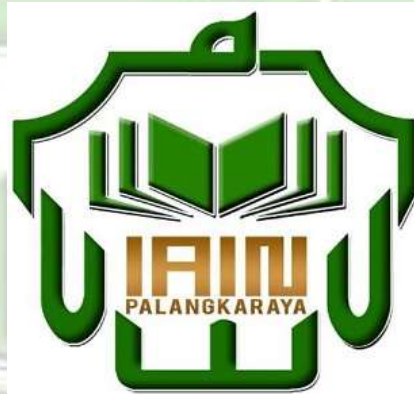


**PENGABAIAN HAK WARIS AYAH DAN IBU PADA PELAKSANAAN
PEMBAGIAN WARISAN DI KOTA BESI KECAMATAN KOTA BESI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh :

H. AYYUB ANSHARI
NIM. 17014050

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA
TAHUN 1440 H/2019M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : pasca@iain-palangkaraya.ac.id
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul Tesis : Pengabaian Hak Waris Ayah dan Ibu pada Pelaksanaan Pembagian
Warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin
Timur

Ditulis Oleh : Ayyub Anshari

NIM : 17014050

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada program Studi
Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, September 2019

Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim, M. Ag.
NIP. 196504291991031002

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Judul : Pengabaian Hak Waris Ayah dan Ibu pada Pelaksanaan Pembagian Warisan
di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur
Nama : H. Ayyub Anshari
NIM : 17014050
Program Studi : Magister Hukum Keluarga (MHK)
Jenjang : Strata Dua (S.2)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN
Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
NIP. 196301181991031002

Pembimbing II



Dr. Sabian Utman, SH., M. Si
NIP. 196311091992031004

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Magister Hukum keluarga,



Dr. Elvi Soedjadi, M.H.I
NIP. 197207081999031003

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul **"PENGABAIAN HAK WARIS AYAH DAN IBU PADA PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI KOTA BESI KECAMATAN KOTA BESI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR"** oleh H. Ayyub Anshari NIM. 17014050 telah diujikan oleh Tim Penguji Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 11 Oktober 2019

Palangka Raya, Oktober 2019

Tim Penguji

1. **Dr. Elvi Soeradji, M. HI**
Ketua Sidang/Anggota
2. **Dr. Sadiani, MH**
Anggota
3. **Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag**
Anggota
4. **Dr. Sabian Utsman, Drs. SH, MH**
Sekretaris Sidang/Anggota

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Direktur Pascasarjana
IAIN Palangka Raya,

Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 196504291991031002

PENGABAIAAN HAK WARIS AYAH DAN IBU PADA PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI KOTA BESI KECAMATAN KOTA BESI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ABSTRAK
Ayyub Anshari, 2019

Ilmu *Farā'id* menetapkan dari keseluruhan ahli waris yang berjumlah 25 orang ada 5 orang ahli waris utama yang keberadaannya tidak *terhijab/terhalang* oleh ahli waris manapun sehingga dalam kondisi apapun mereka berhak mendapatkan warisan. Ahli waris ini adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau isteri. Fakta yang terjadi di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam praktik pembagian warisan apabila masih terdapat anak keturunan si mayit beserta suami atau isteri maka harta warisan habis dibagi kepada mereka, sehingga terdapat ahli waris utama yang terabaikan haknya yaitu ayah dan ibu si mayit. Ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian warisan karena keberadaan anak keturunan si mayit beserta suami atau isteri.

Fokus penelitian ini kepada tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan pembagian warisan secara umum di Kota Besi. Kedua, mengapa hak waris ayah dan ibu diabaikan. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum *Farā'id* terhadap pembagian warisan di Kota Besi. Jenis penelitian yang digunakan adalah *socio-legal research* atau penelitian hukum *empiris* dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis terhadap 5 keluarga ahli waris secara *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembagian warisan secara umum di Kota Besi dilaksanakan berdasarkan sistim kekeluargaan dengan kesepakatan bersama antara para ahli waris. Berdasarkan adat kebiasaan harta warisan habis dibagi antara suami atau isteri beserta anak-anak keturunan si mayit, sementara ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian. Kedua, pengabaian hak waris ayah dan ibu di Kota Besi terjadi karena kesalahan dalam memahami *hijab/mahjub* sehingga ahli waris ayah dan ibu dianggap terhalang oleh keberadaan suami atau isteri beserta anak keturunan si mayit sehingga ayah dan ibu tidak termasuk dalam daftar penerima warisan. Ketiga, berdasarkan ilmu *Farā'id* pembagian warisan di Kota Besi tidak sesuai dengan hukum Islam. Pembagian secara kekeluargaan pada praktiknya mengabaikan hak waris ayah dan ibu karena dianggap *terhijab/terhalang* oleh suami atau isteri beserta anak keturunan si mayit. Padahal dalam ilmu *Farā'id* ayah dan ibu termasuk ahli waris utama yang berhak atas harta warisan dan tidak terhalang oleh ahli waris manapun. Praktik pelaksanaan pembagian warisan seperti ini bertentangan dengan ilmu *Farā'id* sehingga adat kebiasaan ini tergolong '*Urf Fasid*'.

Kata Kunci: Ahli Waris, *Faraidh*, '*Urf*'

**THE NEGLECT OF FATHER'S AND MOTHER'S INHERITANCE
RIGHT ON IMPLEMENTATION OF INHERITANCE DISTRIBUTION
AT KOTA BESI SUBDISTRICT KOTA BESI REGENCY
KOTAWARINGIN TIMUR**

ABSTRACT

Ayyub Anshari, 2019

Faraidh knowledge determine the total of the heirs are 25 people. From all the heirs, there are 5 prime heirs which their existence cannot be blocked by other heir, so they will get the inheritance in any condition. The prime heirs are son, daughter, father, mother, husband or wife. So the father and mother count as the heir who deserve get inheritance. The fact happen in Kota Besi Subdistrict Kota Besi Regency Kotawaringin Timur in the practical on inheritance distribution if there are children from mayit along with husband or wife so the inheritance will be divided for them, so there is the prime heir that neglect their right, they are father and mother. Father and mother not get the part of inheritance because the existence children from the mayit along with husband or wife.

There were three focuses in this research. First, how the implementation of inheritance distribution generally in Kota Besi Subdistrict Kotawaringin Timur Regency. Second, why the inheritance right of father and mother neglected. Third, how the Faraid law view toward inheritance distribution. This research can be categorized as socio-legal research or empirical law research with some steps like observation, interview and documentation.

The result of this research showed that : First, the inheritance distribution generally in Kota Besi implemented based on the kinship system with the agreement among the heirs. Based on the tradition, the inheritance would divided completely between husband or wife along with the children from the mayit, while the father and mother didn't get the inheritance. Second, the neglect inheritance right of father and mother in Kota Besi happened because misunderstood about hijab/mahjub so the father and mother's inheritance right blocked by the existence husband or wife along with the children from the mayit and made father and mother not included in the list of inheritance receiver. Third, based on the practical in implementation of inheritance distribution still not appropriate with the Islamic Law, in faraidh knowledge, father and mother was the heirs who deserve got the inheritance wealth together along with the husband or wife and the children of mayit and there was no another heirs who can blocked their inheritance right. The practical of implemented inheritance distribution be in contradiction with faraid knowledge so this tradition categorized as 'Urf Fasid.

Key words : Heirs, *Faraidh*, 'Urf

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan anugerah-Nya. Sholawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut Beliau hingga hari akhir.

Suatu berkah dari Allah SWT yang selayaknya penulis syukuri, karena berkat Taufiq dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“PENGABAIAN HAK WARIS AYAH DAN IBU PADA PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI KOTA BESI KECAMATAN KOTA BESI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR”**. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M. HI selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya
4. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Sabian Utsman, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan sebagian waktunya dengan tulus ikhlas dalam memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis.
5. Segenap Civitas Akademika yang telah membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan sampai pada saat penyelesaian tesis.

6. Seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.
7. Seluruh teman di Pascasarjana Prodi Magister Hukum Keluarga yang turut membantu secara moril dalam penyelesaian tesis.
8. Seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna perbaikan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis,

H. AYYUB ANSHARI

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **"PENGABAIAN HAK WARIS AYAH DAN IBU PADA PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI KOTA BESI KECAMATAN KOTA BESI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR"**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan,




H. AYYUB ANSHARI
NIM. 17014050

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil

(QS: Al-Baqarah, 188)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Vokal Pendek

Fathah	Ditulis	a
Kasrah	Ditulis	i
Dammah	Ditulis	u

C. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	ā
Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
Dammah + wawu mati	Ditulis	ū

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN ORISINIL.....	v
ABSTRAK INDONESIA.....	vi
ABSTRAK INGGRIS.....	vii
MOTTO	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Teori Adat Bedamai.....	8
2. Teori Waris.....	11
a. Definisi Waris.....	11
b. Rukun dan Syarat Waris.....	15
c. Sebab-Sebab Kewarisan.....	16
d. Penghalang Kewarisan.....	19
e. Golongan Ahli Waris.....	22
f. Istilah Ahli Waris dan Bagiannya.....	26

g.	Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembagian Warisan.....	37
h.	Hukum Pelaksanaan Warisan	40
i.	Hak Kewarisan Ayah dan Ibu menurut Hukum Faraidh...	46
j.	Hak Kewarisan Ayah dan Ibu dalam Hukum Adat.....	53
k.	Hak Kewarisan Ayah dan Ibu dalam BW.....	56
3.	Teori ' <i>Urf</i>	59
4.	Teori Keadilan.....	64
B.	Penelitian Terdahulu.....	66
 BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian.....	69
B.	Prosedur Penelitian.....	71
C.	Data dan Sumber Data.....	72
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	74
E.	Analisis Data	76
F.	Pemeriksaan Keabsahan Data.....	77
G.	Kerangka Pikir.....	79
 BAB IV HASIL PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	81
1.	Geografis.....	81
2.	Demografi.....	83
B.	Hasil Penelitian.....	86
 BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS		
A.	Pembagian Warisan Secara Umum di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.....	118
B.	Latar Belakang Pengabaian Hak Waris Ayah dan Ibu di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.....	123
C.	Pembagian Warisan Ayah dan Ibu di Kota Besi Kecamatan	

Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Hukum	
Faraidh.....	133

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	146
B. Rekomendasi.....	147

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

Daftar Riwayat Hidup
 Surat Penunjukan Pembimbing
 Surat Ijin Penelitian
 Surat Persetujuan Penelitian
 Pertanyaan Penelitian
 Gambar Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas penduduk di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur adalah beragama Islam dan tergolong muslim yang taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Hal ini terlihat dalam praktik pelaksanaan ibadah, pelaksanaan perkawinan, pelaksanaan kematian dan lain-lain sesuai dengan ajaran Islam, tentunya dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisanpun harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun pada faktanya ada praktik pelaksanaan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ilmu *Farā'id*. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya beberapa kaidah atau norma hukum warisan yang mewarnai dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat.

Di Indonesia terdapat aneka hukum yang mengatur waris bagi warga Negara Indonesia. Di bidang hukum waris ada tiga macam hukum yang terkait dengan waris, yaitu Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang termuat dalam buku II tentang Kebendaan, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat.¹ Ketiga hukum inilah yang menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembagian harta warisan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk baik agama maupun adat istiadatnya.

¹ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Warisan Menurut Burgerlijk Wetboek, Cet II*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, h.13

Peraturan waris dalam BW berlaku bagi orang-orang Eropa, Timur Asing Tionghoa, dan warga Negara Indonesia yang menundukkan diri pada hukum BW,² sementara hukum waris Adat berlaku bagi warga negara Indonesia asli yang masih melaksanakan kewarisan berdasarkan sifat kekeluargaan. Hukum Waris Islam pada umumnya berlaku bagi orang Arab, namun di Indonesia hukum waris ini berlaku bagi warga Negara Indonesia asli yang beragama Islam.³ Tiga hukum waris inilah yang menjadi sandaran dan pedoman masyarakat dalam melaksanakan proses pembagian warisan.

Aturan tentang kewarisan bagi umat Islam tertuang dalam Kitab-Kitab *Fiqh* yang dikenal dengan istilah *Fiqh Mawaris* ataupun *Fiqh Farā'id*. Sementara bagi umat Islam di Indonesia hukum warisan selain mengacu kepada kitab-kitab *Fiqh*, telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Bab II Pasal 171 sampai dengan Pasal 193.⁴

Sebagian masyarakat muslim di Indonesia, walaupun hukum Islam telah mengatur secara rinci tentang warisan yang termuat dalam Kitab-Kitab *Fiqh* dan lebih khusus lagi yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, namun sebagian masyarakat muslim di Indonesia belum melaksanakan praktik pelaksanaan pembagian warisan sesuai dengan *syari'at* Islam. Tidak digunakannya ilmu *Farā'id* sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan pembagian warisan merupakan pertanda bahwa ilmu *Farā'id* sudah mulai pudar dalam masyarakat Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah

² Anisitus Amanat, *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.3

³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h.27

⁴ Sukris Sarmadi, *Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Cet. II*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012, h. 19

menggambarkan jauh sebelumnya bahwa ilmu *Farā'id* kelak akan dilupakan umatnya dan ilmu *Farā'id*lah yang pertama kali akan dicabut dari umatnya.⁵

Hukum kewarisan Islam mengatur ada beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan pembagian warisan yang harus dilalui sebagai pedoman dalam pembagian warisan. Jika hal ini dipedomi maka pembagian waris secara hukum Islam akan mudah dilaksanakan. Adapun tahapan dalam warisan, yaitu:

1. Tahap penentuan ahli waris;
2. Tahap penentuan *hijab*/dinding mendinding;
3. Tahap penentuan *aṣabah*;
4. Tahap menentukan porsi bagian masing-masing;
5. Tahap mengerjakan pembagian warisan.⁶

Tentunya dengan berpedoman pada ketentuan pelaksanaan pembagian warisan sesuai dengan *Fiqh Farā'id* sebagaimana di atas, maka dalam pelaksanaan pembagian harta waris terutama dalam hal penentuan para ahli waris dan proses pembagian harta waris akan mudah dilaksanakan.

Keseluruhan ahli waris dalam ilmu *Farā'id* berjumlah 25 orang, 15 orang dari golongan laki-laki dan 10 orang dari golongan perempuan. Namun tidak serta merta keseluruhan ahli waris ini mendapatkan warisan, karena penetapan ahli waris dalam ilmu *Farā'id* ditentukan menurut jauh dekatnya tingkat kekerabatan antara yang mewarisi dengan yang mewariskan. Apabila kesemua ahli waris ada maka yang berhak menerima harta warisan hanya 5, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau isteri.⁷ Ayah dan

⁵ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar Mesir, *Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*, alih bahasa H. Aldy Aldizar dan H. Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, h.22

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 77

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 47

ibu termasuk ahli waris langsung yang berhak menerima bagian waris dan mereka tidak dapat ditutup oleh ahli waris lain.⁸ Dalam hal ini, ayah dan ibu termasuk golongan ahli waris utama yaitu yang pasti mendapatkan warisan dan tidak terhalang oleh ahli waris yang lain.⁹

Fakta yang menarik untuk diteliti berdasarkan observasi awal pada masyarakat Muslim di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa dalam pelaksanaan pembagian warisan yang biasa dilaksanakan dengan cara damai melalui kesepakatan sesama ahli waris, namun terdapat praktik pelaksanaan warisan yang tidak sesuai dengan ilmu *Farā'id*. Fenomena yang terjadi adalah dalam penentuan ahli waris terdapat ahli waris yang terabaikan haknya, sebagaimana keterangan informan yang didapat penulis,¹⁰ fakta yang terjadi adalah adanya praktik pelaksanaan pembagian warisan yang apabila salah satu suami atau isteri meninggal dunia dan masih meninggalkan anak maka harta warisan adalah hak suami/isteri yang masih hidup beserta anak keturunan *muwari's* saja.

Pemahaman yang salah adalah adanya anggapan bahwa jika masih ada isteri/suami beserta anak-anak keturunan maka merekalah yang lebih berhak terhadap harta warisan. Kebiasaan yang terjadi seperti ini ada kemiripan dengan adat masyarakat Banjar sebagaimana yang dipaparkan Alfani Daud dalam bukunya "*Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa*

⁸ Destri Budi Nugraheni, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, h. 96

⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Waris islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h.50

¹⁰ Observasi awal tanggal 11 Agustus 2018 di Kota Besi, menerima info dari informan berinisial AN

Kebudayaan Banjar” bahwa bila dari perkawinan itu ada anak, maka si janda/duda yang masih hidup bersama anak atau anak-anaknya menguasai seluruh harta.¹¹ Apabila yang meninggal si isteri, maka seluruh harta dikuasai oleh suami bersama anak-anaknya seperti halnya janda.¹²

Praktik kewarisan yang terjadi sebagaimana di atas bertentangan dengan prinsip hukum waris Islam karena menghilangkan hak waris ahli waris lain yakni ayah dan ibu. Dalam ilmu *Farā'id* ayah dan ibu termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan bersama suami atau isteri dan anak keturunan *muwaris*. Fenomena ini menarik bagi penulis untuk meneliti lebih mendalam terhadap proses penetapan ahli waris dalam pelaksanaan pembagian warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ilmu *Farā'id* menetapkan kadar bagian hak warisan masing-masing ahli waris, tetapi berdasarkan keterangan dari informan¹³ yang didapat bahwa proses penentuan kadar bagian hak waris masing-masing ahli waris tidak mengenal sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam ilmu *Farā'id*, pembagian dilaksanakan dengan bagi rata antara semua ahli waris. Padahal dalam ilmu *Farā'id* bagian ahli waris dikenal dengan istilah *furuḍul muqaddarah* yakni bagian ahli waris yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3.

¹¹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, h. 206

¹² Ibid. h. 208

¹³ Informan berinisial MD, wawancara awal tanggal 06 September 2018 di Kota besi

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti mengangkat judul Tesis **“Pengabaian Hak Waris Ayah dan Ibu Pada Pelaksanaan Pembagian Warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pembagian warisan secara umum di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Mengapa hak warisan ayah dan ibu di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur diabaikan?
3. Bagaimana pembagian warisan ayah dan ibu di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur menurut hukum *Farā`id*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian warisan secara umum di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengetahui mengapa hak warisan ayah dan ibu di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur diabaikan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum *Farā`id* terhadap pembagian warisan ayah dan ibu di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dibidang ilmu *Farā`id* dalam hal pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Sebagai bahan literatur bagi masyarakat dalam proses penetapan ahli waris secara Islam.
 - c. Sebagai bahan penelitian lebih spesifik lagi terhadap fenomena pembagian warisan dalam masyarakat Muslim Indonesia.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-2 Program Magister Hukum Keluarga pada IAIN Palangka Raya.
 - b. Sebagai informasi kepada masyarakat dalam hal pembagian warisan secara hukum Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Adat Badamai

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam* adat berarti kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.¹⁴ Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Istilah Hukum Adat adalah terjemahan dari *Adatrecht* yang pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers* pada tahun 1893. Kemudian digunakan oleh Prof. Cornelis Van Vollenhoven yang dikenal sebagai penemu Hukum Adat dengan sebutan Bapak Hukum Adat dan penulis buku *Het Adatrecht van Nederlands Indie*.¹⁵

Di Indonesia masyarakat terdiri dari berbagai macam suku yang mana masing-masing suku mempunyai adat istiadat yang berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Beragamnya suku tentunya mempunyai hukum adat yang berbeda pula Sebagaimana masyarakat Kota Besi mempunyai adat tersendiri yakni adat Dayak. Adat Dayak termasuk salah satu dari 19 lingkungan hukum Adat Indonesia

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid I*, Jakarta: PT Ichtiar baru Van Houve, 1996, h. 21

¹⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia Cet. IV*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 134

sebagaimana menurut Van Vollenhoven, yaitu Kalimantan (Tanah Dayak).¹⁶

Salah satu bentuk adat yang berlaku di Kalimantan pada suku Banjar adalah *adat badamai*. Secara etimologi *adat badamai* merupakan kata majemuk yang berasal dari bentukan kata *adat* dan *badamai*.¹⁷ Adat berarti kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun sedangkan *badamai* berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata damai yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata damai diartikan sebagai “Keadaan tidak bermusuhan; rukun”¹⁸

Adat badamai bermakna sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah.¹⁹ *Adat badamai* adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. *Badamai* merupakan bentuk kesepakatan yang dihasilkan dalam setiap penyelesaian sengketa sehingga dapat mewujudkan suatu keadilan, yang mana kata adil itu sendiri bermakna sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.²⁰

¹⁶ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.304

¹⁷ Ahmadi Hasan, *Disertasi: Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar*, Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2007. h. 115

¹⁸ <https://kbbi.id/damai>, diakses tanggal 20 April 2019 jam 08.45 WIB

¹⁹ Muhammad Kusno, *Musyawarah dalam Miriam Budiarjo (Ed) Masalah Kenegaraan*, Jakarta, 1971. h. 551

²⁰ <https://taufananggriawan.wordpress.com/pengertian-adil> diakses tgl 20 April 2019 jam 09.15 WIB

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah:

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).²¹

Adat badamai merupakan kata majemuk yang berarti suatu upaya perdamaian yang dikerjakan atau dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar. *Adat badamai* dapat meningkat menjadi hukum adat, ketika masyarakat sudah menganggap perbuatan *badamai* itu sebagai suatu hal yang mesti berlaku pada masyarakat adat Banjar, karena itu sebagai suatu yang mesti dilakukan.²²

Adat badamai dalam masyarakat Banjar terdapat beberapa peristilahan dan penggunaan. Dalam kasus pelanggaran susila, peristiwa tindak kekerasan, perkelahian, penganiayaan dan masalah yang menyangkut pidana dikenal istilah *babaikan*, *beakuran*, *bapatut* atau *mamatut* dan sebagainya. Sedangkan dalam perkara keperdataan lazim disebut dengan istilah *basuluh* atau *işlah*.²³ Salah satu perkara yang biasanya dilaksanakan dengan cara *basuluh* adalah dalam masalah pembagian warisan.

²¹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. h. 93

²² Ahmadi Hasan, *Disertasi: Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar*, Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2007. h. 116

²³ Ahmadi Hasan, *Disertasi: Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar*, Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2007. h. 121

Istilah “*şuluh*” yang asal katanya “*şulhu*” menurut Alfani Daud dalam bukunya *Islam dan Masyarakat Banjar* adalah suatu istilah yang biasanya digunakan dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat Banjar yang dilakukan secara adil dengan cara berdamai.²⁴ Pembagian harta warisan dengan cara *şuluh* berbeda dengan pembagian warisan cara *Farā`id*, cara *Farā`id* ditempuh apabila terjadi perbedaan pendapat para ahli waris yang tidak dapat didamaikan. Pembagian harta warisan dengan cara *şuluh* diakui sebagai cara yang dibenarkan dalam *syari`at Islam*.

2. Teori Waris

a. Definisi Waris

Kata *waris* sendiri berasal dari bahasa Arab *miraş*. Bentuk jamaknya adalah *mawariş*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.²⁵ Ungkapan yang digunakan dalam Al-Qur`an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni *al-irş*, *al-farā`id*, dan *al-tirkah*.²⁶ Sedangkan ahli warisnya dalam Kamus bahasa Arab disebut dengan *al-wārişu*.²⁷ Waris pada hakikatnya merupakan pemindahan kepemilikan atas harta peninggalan (*at-tarikah*) dari *al-muwarriş*

²⁴ Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar*, Jakarta: Raja Grafindopersada, 1997. h. 210

²⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006. h. 11

²⁶ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur`an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995. h. 23

²⁷ Adib Bisri, *Kamus Indonesia Arab-Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999. h. 774

(orang yang mewariskan) kepada ahli waris (*al-warīs*).²⁸ Dengan demikian warisan adalah pemindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.

Ilmu yang mempelajari tentang waris disebut ilmu waris yang dalam Islam dikenal dengan ilmu *Farā'id*. Ilmu berarti pengetahuan, sedangkan *al-Farā'id* merupakan bentuk jamak dari *Farā'id* yang berarti bagian tertentu.²⁹ *Faridah* diambil dari kata *farḍ* yang artinya *taqdir* (ketentuan), *farḍ* dalam istilah *syara'* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris dan ilmu yang mengenai hal itu dinamakan ilmu waris (ilmu *mīraṣ*) dan ilmu *Farā'id*.³⁰ Ilmu *Farā'id* yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *faridah* mengandung arti yaitu ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Quran dan ilmu *Farā'id* disebut juga *Fiqh Mawaris*.³¹

Berbagai literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, hukum kewarisan, dan ilmu *Farā'id*.³² Menurut Prof. Dr. T.M. Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya tentang hukum waris, *fiqh mawaris* adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh

²⁸Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016 h. 1

²⁹Anshari Taslim, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Jakarta: Hanif Press, 2006. h. 1

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994. h. 235

³¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 1

³²Aulia Muthiah. *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015. h.14

masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.³³ Sementara definisi ilmu *Farā'id* sebagaimana menurut Ibnu Rusyd adalah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.³⁴ Dengan demikian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.³⁵

Menurut Pitlo yang dikutip Rosnidar, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.³⁶ Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.³⁷

³³ Hasbi As-Siddiqi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. h. 5

³⁴ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Bairut: Darul Fikr, 1995. h. 276

³⁵ Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. h. 187

³⁶ Ibid. h. 188

³⁷ Surini Ahlan Sjarif. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek cet II*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. h.13

Adapun pengertian hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 171 huruf (a) adalah: “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”. Jadi hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan, dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketetapan ajaran Islam.³⁸

Adapun beberapa istilah dalam ilmu waris yang berhubungan dengan warisan, yaitu :

- 1) *Wariš*, artinya orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai.³⁹
- 2) *Muwarriš*, artinya yang mewariskan yaitu orang yang mati dan meninggalkan warisan.⁴⁰ Dalam istilah lain disebut pewaris, yaitu seseorang yang meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus

³⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015. h. 16

³⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h. 36

⁴⁰ Anshari Taslim. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Jakarta: Hanif Press, 2006. h. 9

dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁴¹

- 3) *Al-Irs*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris setelah diambil untuk kepentingan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat.⁴²
- 4) *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima ahli waris.⁴³
- 5) *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁴⁴

b. Rukun dan Syarat Waris

Adapun rukun waris menurut Sayyid Sabiq menuntut adanya tiga hal, yaitu:

- 1) Pewaris (*al-waris*) ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.
- 2) Orang yang mewariskan (*al-muwaris*) ialah mayit itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati.
- 3) Harta yang diwariskan (*al-mawaris*) disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.⁴⁵

Selain terpenuhinya rukun waris sebagaimana di atas, pusaka mempusakai harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk

⁴¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 192

⁴² Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h.3

⁴³ Ibid. h.3

⁴⁴ Ibid. h.4

⁴⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 14*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994. h. 240

terlaksananya proses waris mewarisi. Adapun syarat pusaka mempusakai ada tiga, yaitu:

- 1) Matinya *muwaris* (orang yang mempusakakan)
- 2) Hidupnya *waris* (orang yang mempusakai)
- 3) Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai.⁴⁶

Adapun tentang syarat terjadinya kematian pada pewaris (*al-muwaris*) bisa dilihat pada tiga hal yakni:

- 1) Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.⁴⁷
- 2) Mati *hukmy* yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.⁴⁸
- 3) Mati *taqdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia.⁴⁹

c. Sebab-sebab Kewarisan

Di masa jahiliyah (masa kebodohan) sebelum Islam, sebab-sebab mendapat pusaka itu adalah karena keturunan, anak angkat, dan perjanjian sumpah.⁵⁰ Di samping itu, Orang-orang Arab sebelum Islam hanya memberikan warisan kepada kaum lelaki saja, sedangkan kaum perempuan tidak mendapatkannya, dan warisan hanya untuk

⁴⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h. 79

⁴⁷ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 22

⁴⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h. 36

⁴⁹ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 22

⁵⁰ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam cet ke 77*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017 h.348

mereka yang sudah dewasa, anak-anak tidak mendapatkannya pula.⁵¹ Dalam tradisi pembagian harta pusaka yang telah diwarisi dari leluhur mereka terdapat suatu ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia.⁵² Kewarisan yang berlaku hanya bagi laki-laki dewasa dikarenakan mampu mengendarai kuda, memerangi musuh dan merebut rampasan perang dari musuh. Adapun wanita dan anak kecil dipandang tidak mampu.⁵³

Ketika Islam datang, tradisi kewarisan zaman jahiliyah tidak lagi digunakan. Dalam Islam sebab-sebab mempusakai hanya ada empat yaitu kekeluargaan, perkawinan, dengan jalan memerdekakan budak, dan hubungan Islam.⁵⁴ Sementara hubungan yang menyebabkan seseorang bisa menerima warisan ada tiga hal yaitu hubungan kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah, dan *wala`* (perwalian). Dari ketiga hubungan sebagai sebab mewarisi tersebut dapat dikategorikan dalam dua bagian saja yaitu *sabab* dan *nasab*. *Sabab* mencakup perkawinan dan perwalian (*wala`*) sedangkan *nasab* ialah hubungan kekerabatan.⁵⁵

Sebab-sebab seseorang untuk mendapatkan warisan dari si mayit dapat diklasifikasikan kepada empat macam hubungan, yaitu:

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1994 h.235

⁵² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h.11

⁵³ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. h. 9

⁵⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam cet ke 77*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017 h.348

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Cet. III*. Jakarta: Lentera, 2005. h.540

karena hubungan perkawinan, karena adanya hubungan darah, karena memerdekakan simayit, dan karena sesama Islam.⁵⁶ Dalam konteks kewarisan di Indonesia fenomena perbudakan tidak ada maka sebab kewarisan di Indonesia cuma ada tiga yaitu hubungan perkawinan, hubungan darah atau kekerabatan, dan hubungan Islam.

.Adapun yang dimaksud hubungan perkawinan sebagai sebab kewarisan adalah perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁷ Hubungan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam.⁵⁸ Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri selama hubungan perkawinan itu masih tetap berlangsung.⁵⁹

Kekerabatan ialah hubungan *nasab* antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi.⁶⁰ Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya

⁵⁶ Suhrawardi, *Hukum Waris Islam Cet.II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. h.56

⁵⁷ Departemen Agama R.I. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta, 2001, h. 13

⁵⁸ H. Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. h. 112

⁵⁹ Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007. h. 13

⁶⁰ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar. *Terjemah Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004. h. 33

kelahiran.⁶¹ Kekerabatan yang dimaksud sebagai sebab kewarisan adalah kerabat hakiki yang ada ikatan *nasab*,⁶² hubungan *nasab* pertalian garis lurus ke atas (ayah, kakek, dan lainnya), pertalian lurus ke bawah (anak dan cucu), pertalian mendatar/menyamping (saudara, paman, dan anak keturunannya).⁶³ Hubungan Islam yang dimaksud adalah seagama dan seakidah, karena jika berlainan agama maka gugurlah hak kewarisan. Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwaris* salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam.⁶⁴

d. Penghalang Warisan

Penghalang warisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai.⁶⁵ Para Ulama *Mazhab* sepakat bahwa tiga hal yang dapat menghalangi warisan, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.⁶⁶

1) Perbedaan Agama

Perbedaan agama yang dimaksudkan sebagai penghalang warisan adalah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara

⁶¹ H. Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. h. 111

⁶² Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009. h. 109

⁶³ Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. h. 72

⁶⁴ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 28

⁶⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h. 83

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab Cet.III*. Jakarta: Lentera 2005 h.

orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.⁶⁷ Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang Muslim sedangkan ahli warisnya bukan muslim maka ahli waris tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris.⁶⁸

2) Pembunuhan

Pembunuhan yang mencegah pewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada *al-muwaris* yang mengharuskan dijatuhinya *qisas*, *diyat* atau *kaffarah*.⁶⁹ Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja dan tidak memiliki alasan yang benar, mengakibatkan pelakunya terhalang menerima waris⁷⁰ dan pembunuhan adalah salah satu sebab yang menggugurkan penerimaan harta waris.⁷¹

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo berdasarkan pasal 838 B.W. ada 4 hal di mana seseorang dinyatakan tidak pantas untuk mewarisi, yaitu:

- a) Apabila orang itu dipidana oleh hakim, karena membunuh atau mencoba membunuh si peninggal warisan.
- b) Apabila ia dianggap bersalah oleh hakim, karena mendakwa si peninggal warisan itu secara palsu, melakukan kejahatan yang dapat dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun atau lebih.

⁶⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h. 95

⁶⁸ Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009. h. 117

⁶⁹ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 40

⁷⁰ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab Cet.III*. Jakarta: Lentera 2005.

h.547

⁷¹ Hasbi Ash-Shidieqie. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992. h. 338

- c) Apabila ia dengan paksaan menghalang-halangi si peninggal warisan itu untuk membuat atau mencabut testamen.
- d) Apabila ia menghilangkan, membinasakan, atau memalsu testamen dari si peninggal warisan.⁷²

Adapun mengenai pembunuhan sebagaimana yang tertuang dalam KUHP bab tentang kejahatan terhadap nyawa, dalam pasal 338 dijelaskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁷³

Apabila ahli waris yang dianggap tidak patut oleh Undang-Undang, namun warisan sudah diterimanya, ahli waris tersebut wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan.⁷⁴

3) Perbudakan

Perbudakan yang menghalangi pewarisan adalah status orang sebagai hamba sahaya.⁷⁵ Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk mewarisi warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁷⁶

⁷²Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000. h.11

⁷³KUHP & KUHP. Bandung: Citra Umbara, 2017. h. 107

⁷⁴Neng Yani Nurhayani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015. h. 286

⁷⁵Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 40

⁷⁶Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 31

e. Golongan Ahli Waris

Secara garis besar ahli waris berdasarkan jenis kelamin dapat digolongkan kepada dua jenis, yakni golongan ahli waris laki-laki dan golongan ahli waris perempuan. Jumlah keseluruhan ahli waris dari kedua golongan ini sebagaimana menurut ketentuan al-Quran dan Hadits berjumlah seluruhnya ada 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari golongan ahli waris laki-laki dan 10 orang dari golongan ahli waris perempuan.⁷⁷

1) Ahli waris golongan laki-laki,

Adapun secara rinci menurut Ansari Taslim golongan ahli waris laki-laki adalah sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki
- b) Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki) dan seterusnya ke bawah
- c) Ayah
- d) Kakek dari ayah (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas
- e) Saudara kandung
- f) Saudara seayah
- g) Saudara seibu
- h) Anak laki-laki dari saudara kandung
- i) Anak laki-laki dari saudara seayah
- j) Saudara kandung ayah (selanjutnya disebut paman sekandung)
- k) Saudara ayah seapak (selanjutnya disebut paman seapak)
- l) Anak paman kandung
- m) Anak paman seapak
- n) Suami
- o) *Mu'tiq* (orang yang memerdekakan)⁷⁸

⁷⁷Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 44

⁷⁸Anshari Taslim Lc. *Belajr Mudah Imu Waris*. Jakarta: Hanif Press, 2006 h.14

Berdasarkan dari keseluruhan ahli waris golongan laki-laki tersebut di atas apabila semua ahli waris ini ada, maka ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan hanya tiga orang, yakni: suami, bapak dan anak laki-laki.⁷⁹ Sementara ahli waris lain tidak mendapatkan bagian warisan karena berlaku ahli waris yang dekat kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh yang dalam istilah ilmu *Farā'id* disebut *hijab*.

2) Ahli waris dari golongan perempuan

Adapun secara rinci menurut Ansari Taslim golongan ahli waris perempuan adalah sebagai berikut:

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuannya anak laki-laki dari anak laki-laki (cicit) dan seterusnya ke bawah
- c) Ibu
- d) Ibunya ibu
- p) Ibunya ayah
- e) Saudari kandung
- f) Saudari seayah
- g) Saudari seibu
- h) Isteri
- i) *Mu'tiqah*⁸⁰

Berdasarkan dari keseluruhan ahli waris golongan perempuan tersebut di atas apabila semua ahli waris ini ada, maka ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan hanya lima orang, yakni: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-

⁷⁹ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h.47

⁸⁰ Anshari Taslim Lc. *Belajr Mudah Imu Waris*. Jakarta: Hanif Press, 2006. h.15

laki, ibu, isteri dan saudara perempuan kandung.⁸¹ Sementara ahli waris lain terhalang karena ahli waris yang dekat kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh yang dalam istilah ilmu *Farā'id* disebut *hijab*.

Berdasarkan dari golongan ahli waris laki-laki dan golongan ahli waris perempuan menurut sebab-sebab mereka mendapatkan harta pusaka dapat digolongkan kepada dua macam golongan yaitu ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*.⁸² Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang timbul karena adanya hubungan darah.⁸³ Sedangkan ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul kerana sebab-sebab tertentu, yaitu sebab perkawinan yakni suami atau isteri, dan sebab memerdekakan hamba sahaya.⁸⁴ Dari kedua golongan ahli waris tersebut yang secara hukum berhak menerima warisan apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.⁸⁵

Menurut Fatchur Rahman ditinjau dari garis yang menghubungkan *nasab* ahli waris golongan *nasabiyah* terbagi kepada tiga cabang yakni *furu'*, *uṣul* dan *hawasyi*.⁸⁶ *Furu' al waris* yaitu ahli waris anak keturunan si mati, *Uṣul al waris* yaitu ahli waris leluhur si

⁸¹ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h.47

⁸² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h. 134

⁸³ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 49

⁸⁴ Ibid. h. 54

⁸⁵ Ibid. h. 50

⁸⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h. 116

mati, dan *Al-Hawasyi* yaitu ahli waris kelompok saudara, termasuk didalamnya paman dan keturunannya.⁸⁷

Adapun para ahli waris dari ketiga cabang tersebut adalah:

- 1) Ahli waris cabang *Furu'* yaitu anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, anak laki-laki, dan cucu laki-laki garis laki-laki.⁸⁸
- 2) Ahli waris cabang *Uşul* yaitu bapak, kakek (yakni bapaknya bapak) dan generasi di atasnya, ibu, dan nenek (yakni ibunya ibu atau ibunya bapak) dan generasi di atasnya.⁸⁹
- 3) Ahli waris cabang *Al-Hawasyi* yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung, seapak atau seibu.⁹⁰ Anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak paman sekandung, dan anak paman seayah.⁹¹

Berdasarkan dari keseluruhan golongan ahli waris baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, apabila kesemua ahli waris ini ada maka yang berhak menerima harta warisan hanya lima orang, yakni anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu dan suami/isteri.⁹² Dengan demikian, dari ketiga cabang ahli waris *nasabiyah* baik *furu' al-wariş*, *uşul al-wariş* maupun *al-hawasyi* kesemuanya ada, maka yang berhak atas harta warisan hanyalah ahli waris cabang *furu' al-*

⁸⁷ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 52

⁸⁸ Ibid. h. 52

⁸⁹ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar. *Terjemah Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004. h. 201

⁹⁰ Ibid. h. 220

⁹¹ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 53

⁹² Ibid. h. 47

waris dan *uṣul al-waris* saja, sementara cabang *al-hawasyi* terhalang (*terhijab*).

Adapun Ahmad Sarwat menggolongkan ahli waris kepada dua, yakni ahli waris *internal* dan ahli waris *eksternal*. Ahli waris *internal* adalah ahli waris yang sudah dipastikan akan mendapatkan harta warisan dari *almarhum*, tidak ada penghalang atau tabir yang menutupi.⁹³ Sedangkan ahli waris *eksternal* adalah orang yang termasuk dalam daftar ahli waris, namun ada kemungkinan mendapat warisan apabila tidak ada *hijab* yang menutup antara dirinya dengan *muwaris* dan ada kemungkinan tidak mendapat warisan, karena antara dirinya dan *muwaris* ada *hijab* yang menghalangi.⁹⁴

f. Istilah Ahli Waris dan Bagiannya

Beberapa istilah dalam ilmu waris yang mengatur tentang pengelompokan ahli waris berdasarkan haknya terhadap harta warisan, yakni *aṣhabul furuḍ*, *aṣabah*, *ẓawil arham*, dan *hijab/hajbu*. *Aṣhabul furuḍ* adalah kelompok ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan bagi mereka, yaitu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.⁹⁵ *Aṣhabul furuḍ* merupakan ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah yang sudah

⁹³ Ahmad Sarwat, *Pelatihan Dasar Faraidh Cet II*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017, h. 61

⁹⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017, h. 179

⁹⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 14*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994. h. 244

ditentukan dalam Al-Qur'an.⁹⁶ *Aṣabah* adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya di dalam *naṣ* dan ia mendapat sisa dari harta setelah dibagi kepada *Aṣhabul Furuḍ*.⁹⁷ *Zawil arham* adalah ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *Aṣhabul furuḍ* dan *aṣabah*.⁹⁸ *Hijab/hajbu* adalah penghalangan ahli waris dari bagian warisnya baik seluruhnya atau sebagiannya karena adanya ahli waris lain yang lebih dikedepankan.⁹⁹

Adapun para ahli waris yang dapat dikategorikan sebagai *Aṣhabul furuḍ*, *aṣabah*, *zawil arham*, dan *hijab/hajbu* adalah sebagai berikut:

1) *Aṣhabul Furuḍ*

Umumnya ahli waris *aṣhab al-furuḍ* adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu adalah bapak, atau kakek, dan suami. Selain dari mereka ini, menerima bagian sisa (*aṣabah*).¹⁰⁰ Para ahli *Farā'id* membedakan *aṣhabul furuḍ* ke dalam dua macam yaitu *aṣhabul furuḍ is-sababiyah* yaitu golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris, dan *aṣhabul furuḍ in-nasabiyyah* yaitu golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris.¹⁰¹

⁹⁶ Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1968. h. 38

⁹⁷ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h.59

⁹⁸ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 65

⁹⁹ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h.222

¹⁰⁰ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 55

¹⁰¹ Otjhe Salman. *Hukum Waris Islam Cet.III*. Bandung: Refika Aditama, 2010. h. 52

Ashabul furuḍ semuanya berjumlah 12 orang, dari golongan perempuan berjumlah 8 orang dan dari golongan laki-laki berjumlah 4 orang. *Ashabul furuḍ* golongan perempuan, adalah: isteri, anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, ibu, nenek *ṣaḥīḥah*. *Ashabul furuḍ* golongan laki-laki, adalah: suami, ayah, kakek *ṣaḥīḥ*, saudara seibu.¹⁰²

Adapun hak-hak yang diterima *aṣḥabul furuḍ* sesuai ketentuan *furuḍul muqaddarah* adalah:

- a) Anak perempuan berhak menerima bagian: $\frac{1}{2}$ jika sendirian tidak bersama anak laki-laki, $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki.
- b) Cucu perempuan garis laki-laki berhak menerima: $\frac{1}{2}$ jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub* (terhalang), $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub*, $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahjub*, jika anak perempuan dua orang atau lebih ia tidak mendapatkan bagian.
- c) Ibu berhak menerima bagian: $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau cucu (*far'u waris*) atau saudara dua orang atau lebih. $\frac{1}{6}$ jika ada *far'u waris* atau bersama dua orang saudara atau lebih. $\frac{1}{3} \times$ sisa, dalam masalah *garrawain*, yaitu apabila ahli waris terdiri dari: suami/isteri, ibu dan bapak.
- d) Bapak berhak menerima bagian: $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, $\frac{1}{6} +$ sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.
- e) Nenek jika tidak *mahjub* menerima bagian $\frac{1}{6}$ jika seorang.
- f) Kakek jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki. $\frac{1}{6} +$ sisa jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki.

¹⁰² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h. 131

- g) Saudara perempuan sekandung, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian: $\frac{1}{2}$ jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung. $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- h) Saudara perempuan seayah, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian: $\frac{1}{2}$ jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah, $\frac{2}{3}$ dua orang tau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah. $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$.
- i) Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak *mahjub*, saudara seibu berhak menerima bagian: $\frac{1}{6}$ jika seorang diri, $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, bergabung menerima $\frac{1}{3}$ dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu (*musyarakah*).
- j) Suami berhak menerima bagian: $\frac{1}{2}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu, $\frac{1}{4}$ jika bersama dengan anak atau cucu.
- k) Isteri berhak menerima bagian: $\frac{1}{4}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu, $\frac{1}{8}$ jika bersama anak atau cucu.¹⁰³

Berdasarkan ilmu *Farā'id*, dalam pelaksanaan pembagian warisan, ahli waris golongan *ẓawil furūd* adalah ahli waris yang berhak untuk didahulukan bagiannya.¹⁰⁴

2) *Aṣabah*

Dinamakan *aṣabah* yaitu mereka yang berhak atas semua peninggalan waris bila tidak didapatkan seorangpun diantara ahli waris *aṣhabul furūd*.¹⁰⁵ Namun pengertian *aṣabah* lebih dikenal sebagai penerima bagian sisa, ahli waris *aṣabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama

¹⁰³ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 57

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam Cet. III*. Jakarta: Kencana, 2008. h. 290

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 14*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994. h. 259

sekali, karena habis diambil ahli waris *aṣḥab al-furuḍ*.¹⁰⁶ Dengan demikian bagian *aṣabah* adalah sisa harta setelah dibagikan kepada *aṣḥabul al-furuḍ*. Jika masih ada sisa, *aṣabah* mendapat bagian. Namun jika sudah habis dibagi ke *aṣḥabul al-furuḍ*, maka ahli waris *aṣabah* tidak mendapat bagian.¹⁰⁷

Adapun golongan ahli waris *aṣabah* terbagi kepada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a) *Aṣabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukannya sendiri berhak menerima bagian *aṣabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki.¹⁰⁸ *Aṣabah bin nafsih* adalah setiap laki-laki yang sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan si mayit yang tidak diselingi oleh seorang perempuan.

Mereka adalah:

- (1) Anak laki-laki
- (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- (3) Bapak
- (4) Kakek
- (5) Saudara kandung
- (6) Saudara seapak
- (7) Anak laki-laki saudara kandung
- (8) Anak laki-laki saudara seapak
- (9) Paman kandung
- (10) Paman seapak
- (11) Anak laki-laki paman kandung
- (12) Anak laki-laki paman seapak.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 60

¹⁰⁷ Yahya Abdurrahman. *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 62

¹⁰⁸ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 60

¹⁰⁹ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar. *Terjemah Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004. h. 254

Ahli waris golongan *aşabah binafsih* menurut Fatchur Rahman ada 4 (empat) kelompok yang diutamakan satu sama lain menurut urutan, yaitu: cabang (*far'u*) si mati, pokok (*uşul*) si mati, kerabat menyamping (*hawasyi*) si mati (saudara-saudara si mati), dan kerabat menyamping yang jauh (keturunan dari kakek si mati).¹¹⁰

Untuk lebih rincinya tentang *aşabah binafsihi* menurut Yahya Abdurrahman yakni terdiri dari ahli waris laki-laki dari empat jalur, yaitu:

- (1) Jalur keanakan meliputi anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah mengikuti jalur laki-laki.
- (2) Jalur kebapakan meliputi bapak, bapaknya bapak dan seterusnya ke atas mengikuti jalur laki-laki.
- (3) Jalur kesaudaraan meliputi saudara laki-laki seapak seibu, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah mengikuti jalur laki-laki.
- (4) Jalur kepamanan meliputi saudara laki-laki bapak seapak seibu, saudara laki-laki bapak seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak seapak seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak seapak dan seterusnya ke bawah melalui jalur laki-laki.¹¹¹

Berdasarkan keempat jalur *aşabah binafsihi* tersebut di atas, jalur keanakan adalah jalur yang paling dikedepankan. Setelah jalur keanakan, berikutnya jalur kebapakan, lalu jalur kesaudaraan dan terakhir jalur

¹¹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h. 340

¹¹¹ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 209

kepamanan. Artinya jika ada *aṣabah* dari jalur anak, maka merekalah yang berhak mendapat sisa, sementara jalur lainnya tidak mendapat apa-apa.¹¹²

- b) *Aṣabah bi al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima dengan cara *aṣabah*).¹¹³ Maksud *aṣabah bil gair* adalah setiap perempuan yang mempunyai bagian tertentu, yang ada bersama laki-laki yang sederajat dengannya, mereka adalah:

- (1) Anak perempuan bersama anak laki-laki
- (2) Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- (3) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung
- (4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.¹¹⁴

- c) *Aṣabah ma'al gair*, ialah ahli waris yang menerima bagian *aṣabah* karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian *aṣabah*.¹¹⁵ *Aṣabah ma'al ghair* hanya ada dua yang berasal dari *aṣhabul furuḍ*, mereka adalah:

- (1) Seorang saudara perempuan kandung atau lebih, yang ada bersama anak perempuan cucu perempuan dari anak laki-laki, atau ada bersama mereka berdua.

¹¹² Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 209

¹¹³ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 61

¹¹⁴ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar. *Terjemah Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004. h. 262

¹¹⁵ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 62

- (2) Seorang saudara perempuan seapak atau lebih, yang ada bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau ada bersama mereka berdua.¹¹⁶

3) *Ẓawil Arham*

Ẓawil arham menurut pengertian bahasa ialah tempat menetap janin di dalam perut ibunya, atau setiap orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang lain.¹¹⁷ Dalam istilah ulama *fiqh*, *ẓawil arham* berarti seluruh kerabat yang bukan *aṣḥabul furūd* dan bukan *aṣabah*, jadi semua kerabat yang tidak berhak mendapatkan warisan bagian tetap (*farḍ*) atau *aṣabah* oleh ulama *Farā'id* disebut sebagai *ẓawil arham*.¹¹⁸ Oleh karena itu menurut ketentuan al-Qur'an, mereka tidak berhak menerima warisan sepanjang ada ahli waris *aṣḥabul furūd* dan *aṣabah*.¹¹⁹

Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip Ahmad Rofiq dalam bukunya *Fiqh Mawaris*, merinci golongan ahli waris *ẓawil arham* terdiri dari:

- a) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari garis perempuan
- b) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (*bint al-akh*)
- c) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan (*bint al-ukht*)
- d) Anak perempuan dan cucu perempuan paman (*bint al-'amm*)
- e) Paman seibu (*al-'amm li al-umm*)

¹¹⁶ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar. *Terjemah Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004. h.266

¹¹⁷ Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. h. 139

¹¹⁸ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar. *Terjemah Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004. h. 338

¹¹⁹ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 65

- f) Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu (*aulad al-akh lil-umm*)
- g) Saudara perempuan bapak (*al-ammah*)
- h) Saudara-saudar ibu (*al-khal dan al-khalah*)
- i) Kakek dari pihak ibu (*al-jadd min jihat al-umm*)
- j) Nenek dari pihak kakek (*al-jaddah min jihat al-jadd*)¹²⁰

4) *Hijab/Hajbu*

Hajbu menurut bahasa berarti *man'u*: menghalangi, mencegah. Maksudnya adalah terhalangnya seseorang tertentu dari semua atau sebagian warisannya karena adanya orang lain.¹²¹ Orang yang menghalangi disebut *hajib*, dan orang yang terhalang disebut *mahjub*, keadaan menghalangi disebut dengan *hijab*.¹²² Dengan demikian pengertian *hijab/hajbu* sebagaimana menurut Yahya Abdurrahman adalah penghalangan ahli waris dari bagian warisnya baik seluruhnya atau sebagiannya karena adanya ahli waris lain yang lebih dikedepankan.¹²³

Hijab atau *hajbu* ada dua macam, yaitu *hijab nuqṣan* dan *hijab hirman*. *Hijab nuqṣan* yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang *mahjub*. *Hijab hirman* yaitu menghalangi secara total, hak-hak waris si *mahjub* tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang menghijab.¹²⁴

¹²⁰ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 66

¹²¹ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 14*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994. h. 264

¹²² Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 72

¹²³ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h.222

¹²⁴ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 72

Ahli waris yang dapat terkena *hijab hirman* ada enam belas, sebelas terdiri dari laki-laki dan enam terdiri dari wanita.¹²⁵

Adapaun ahli waris yang *terhijab hirman* dari golongan laki-laki adalah sebagai berikut:

- a) Kakek (bapak dari ayah) terhalang oleh adanya ayah, dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris.
- b) Saudara kandung laki-laki terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
- c) Saudara laki-laki seayah terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki, juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi ashabah maalghair, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
- d) Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu terhalangi oleh pokok (ayah, kakek, dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya), baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
- e) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki terhalangi oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga, para cucu akan terhalangi oleh cucu yang paling dekat (lebih dekat).
- f) Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki) terhalangi dengan adanya ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu kandung laki-laki, serta saudara laki-laki seayah.
- g) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) terhalang dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan (dari anak saudara kandung laki-laki), ditambah adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki).
- h) Paman kandung (saudara laki-laki ayah) terhalangi oleh adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- i) Paman seayah terhalangi dengan adanya sosok yang menghalangi paman kandung, dan juga adanya paman kandung.
- j) Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) terhalangi oleh adanya paman seayah, dan juga terhalang oleh sosok yang menghalangi paman seayah.

¹²⁵ Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009. h. 175

- k) Sepupu laki-laki (anak paman seayah) terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung).¹²⁶

Adapun ahli waris yang *terhijab hirman* dari golongan perempuan adalah sebagai berikut:

- a) Nenek (baik ibu dari ibu maupun dari bapak) terhalangi dengan adanya sang ibu.
- b) Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) terhalang oleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang taupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika adanya *aṣabah*.
- c) Saudara kandung perempuan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semua laki-laki).
- d) Saudara perempuan seayah akan terhalangi saudara kandung perempuan apabila ia menjadi *ashabah ma'alghair*. Selain itu, juga terhalang oleh ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya, khusus kalangan laki-laki) serta terhalang oleh dua orang saudara kandung perempuan apabila keduanya menyempurnakan bagian dua per tiga, kecuali bila adanya *aṣabah*.
- e) Saudara perempuan seibu terhalangi oleh sosok laki-laki (ayah, kakek, dan seterusnya) juga terhalang cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya), baik laki-laki ataupun perempuan.¹²⁷

Adapun ahli waris yang tidak *terhijab* secara *hirman* selamanya, yaitu suami, isteri, bapak, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan.¹²⁸ Ahli waris ini tidak *terhijab* karena termasuk golongan ahli waris yang utama yang lebih didahulukan mendapatkan warisan dan tidak terhalang oleh ahli waris lain.

Sebagaimana yang dikutip Beni Ahmad Saebi dari kitab *Kifayatul*

¹²⁶ Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009. h.176

¹²⁷ Ibid. h. 177

¹²⁸ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 235

Akhyar bahwa ahli waris anak, ayah, ibu, suami, dan isteri adalah ahli waris yang tidak putus karena keadaan.¹²⁹

g. Langkah-langkah Pelaksanaan Pembagian Warisan

Menurut Suhrawardi dalam hukum waris Islam dikenal adanya beberapa asas dalam kewarisan, yaitu:

1) *Asas Ijbari*

Ijbari mengandung arti paksaan, dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya. Adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

2) *Asas Bilateral*

Asas *bilateral* dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

3) *Asas Individual*

Yang dimaksud asas *individual* bahwa setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.

4) *Asas Keadilan berimbang*

Yang dimaksud keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan.

5) *Kewarisan semata akibat kematian*

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian.¹³⁰

Selain asas-asas kewarisan, dalam pembagian waris terdapat ketentuan umum yang harus diperhatikan, sebagaimana *Hadis* Rasulullah SAW dalam *Şahih Muslim* nomor *Hadis* 3028 berikut:

¹²⁹ Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009. h. 123

¹³⁰ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 h. 41

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ
طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahnya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah A‘la bin Hammad yaitu An Narsi telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, “Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya”.¹³¹

Dari *Hadis* di atas secara umum mengandung pesan bahwa pertama-tama warisan disampaikan kepada *ahl furud* yaitu ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur’an, ahli waris ini dalam perhitungan waris menerima terlebih dahulu bagian baru setelah itu sisanya kepada ahli waris *aşabah*. Hal ini sebagaimana menurut Yahya Abdurrahman, bahwa pertama-tama harta waris dibagikan kepada *aşhab al-furud*, setelah itu baru kepada *aşabah*.¹³² Menurut Amir Syarifuddin ahli waris *zawil furud* adalah ahli waris yang berhak untuk didahulukan bagiannya,¹³³ bila harta tidak terbagi habis diantara *zawil furud* maka kelebihan harta itu diberikan kepada ahli waris *aşabah*.¹³⁴

Melaksanakan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, pertama sekali yang penting diketahui adalah sistematika

¹³¹ Aplikasi Hadits, *Kutub al- Tis’ah*, Lidwa Pusaka I Software

¹³² Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 62

¹³³ Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam Cet. III*. Jakarta: Kencana, 2008. h. 290

¹³⁴ Ibid. h. 291

penyelesaiannya, dengan kata lain ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan apabila tahapan-tahapan ini dilalui dengan benar maka bagaimanapun rumitnya persoalan warisan yang dihadapi, dengan mudah kerumitan itu akan dapat diselesaikan.¹³⁵

Adapun tahapan-tahapan dalam pembagian warisan yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

1) Tahap I, penentuan ahli waris.

Tahap ini untuk menentukan siapa ahli waris yang berhak, dan untuk menghindari kesalahan karena bisa saja terjadi seseorang dinyatakan sebagai ahli waris padahal semestinya dia bukan ahli waris, atau sebaliknya seseorang ditentukan bukan sebagai ahli waris padahal semestinya dia berhak sebagai ahli waris. Disamping itu, ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih dekat atau lebih kuat maka ia lebih berhak dibanding ahli waris yang lebih jauh atau lebih lemah hubungan kekerabatannya dengan *al-muwarriṣ*.¹³⁶

2) Tahap II, masalah *hijab*/dinding mendinding.

Tahap ini untuk mengetahui siapa-siapa saja diantara para ahli waris yang berhak mendapat warisan, sebab tidak semua ahli waris mempunyai hak, sebab boleh jadi ia ter*hijab*/terdinding atau terhalang oleh ahli waris yang lain.

3) Tahap III, menentukan *aṣabah*.

¹³⁵ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 h.76

¹³⁶ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 62

Tahap ini untuk menentukan siapa ahli waris sebagai *aṣabah*, karena kepastian bagiannya adalah menunggu sisa dari bagian yang telah dikeluarkan kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya.

- 4) Tahap IV, menentukan porsi atau *furuḍul muqaddarah* (ketentuan bagian masing-masing).

Tahap ini adalah untuk menentukan kadar bagian masing-masing ahli waris (yang tidak terdinding dan bukan merupakan *aṣabah*)

- 5) Tahap V, mengerjakan pembagian.

Tahap ini adalah merupakan tahapan terakhir yakni pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, setelah semua kadar bagian masing-masing sudah ditentukan¹³⁷

h. Hukum Pelaksanaan Warisan

Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas sumber hukumnya yaitu dari dalil-dalil atau *naṣ-naṣ* yang *ṣarih*.¹³⁸

Setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu itu tidak wajib.¹³⁹

¹³⁷ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 h. 77

¹³⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h. 34

¹³⁹ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 h.3

Demikian pula dalam pelaksanaan hukum waris sebagaimana menurut Aminullah yang dikutip Sukris Sarmadi dalam bukunya “*Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*” bahwa hukum waris Islam dianggap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, ia dianggap sebagai *compulsory law* (*Dwight Recht*) yakni hukum yang berlaku secara mutlak dan baku.¹⁴⁰ Para ulama menetapkan bahwa mempelajari ilmu *Farā`id* adalah *fardū kifayah*, artinya kalau dalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajari ilmu *Farā`id* maka berdosa orang-orang di kampung itu, jika ada yang mempelajari walau hanya satu atau dua orang saja maka terlepaslah semuanya dari dosa.¹⁴¹

Pelaksanaan pembagian warisan bagi umat Islam haruslah sesuai dengan petunjuk dan kaidah yang sudah diatur dalam *Al-Qur`an* dan *al-Hadis*. Sebagaimana menurut Fatchur Rahman, bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan *syari`at* yang ditunjuk oleh *naş-naş* yang *şarih*, meski dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil *naş* yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya.¹⁴²

Pelaksanaan pembagian warisan bagi masyarakat Muslim sudah jelas di atur dalam *al-Qur`an* dan *Hadis* Nabi SAW. *Al-Qur`an*

¹⁴⁰ Sukris Sarmadi. *Ahli Waris Pengganti dalam KHI cet II*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012. h.9

¹⁴¹ Moh. Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. h. 11

¹⁴² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma`arif, 1971, h. 34

menjelaskan ketentuan-ketentuan *farā'id* ini dengan terperinci yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 11, 12 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبْنَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا¹⁴³
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ
امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ
غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ¹⁴⁴

Terjemahnya: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian

¹⁴³ An-Nisa [4]: 11.

¹⁴⁴ An-Nisa [4]: 12.

masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapak (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”¹⁴⁵

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”¹⁴⁶

Berdasarkan ayat di atas dengan jelas disyariatkan pelaksanaan pembagian warisan secara hukum Islam, bahkan secara

¹⁴⁵ Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Kathoda, 2005,

h.101

¹⁴⁶ Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Kathoda, 2005,

h.102

detail dipaparkan siapa-siapa yang dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Selain itu ditetapkan pula dengan rinci bagian hak waris masing-masing para ahli waris terhadap harta warisan yang dalam istilah ilmu *Farā'id* dikenal dengan *furuḍul muqaddarah* yang terdiri dari enam macam bagian, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3.¹⁴⁷

Berdasarkan ayat selanjutnya lebih tegas lagi dijelaskan keutamaan pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris Islam, ketentuan pelaksanaan warisan sesuai *syari'at* adalah merupakan ketentuan (*hudud*) dari Allah yang jika dilaksanakan secara aturan Islam diberi ganjaran Surga. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 13 sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ¹⁴⁸

Terjemahnya: “Itulah batasan-batasan (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”.¹⁴⁹

Untuk lebih jelasnya mengapa pembagian warisan mesti harus sesuai dengan *syari'at* Islam, di bawah ini sebagaimana menurut Yahya Abdurrahman:

¹⁴⁷ Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007. h.

¹⁴⁸ An-Nisa [4]:13.

¹⁴⁹ Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2005,

“Pembagian waris hakikatnya adalah menentukan bagian setiap ahli waris atas harta waris sesuai ketentuan *syari'ah*. Dengan begitu, secara *syar'i* setiap ahli waris hanya berhak atas bagian yang menjadi haknya sesuai bagian yang ditentukan oleh hukum-hukum waris. Jika pembagian harta waris dilakukan sesuai hukum-hukum waris, tentu setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai ketentuan hukum-hukum waris. Jika dibagi tidak sesuai ketentuan hukum-hukum waris maka ahli waris akan mendapatkan bagian yang bisa jadi tidak sesuai dengan bagiannya sesuai ketentuan *syari'ah*. Jika ahli waris itu mendapat harta lebih banyak dari bagiannya sesuai *syari'ah*, maka yang menjadi haknya hanyalah bagian yang sesuai *syari'ah*, sedangkan kelebihanannya maka itu bukan menjadi haknya, tetapi hak ahli waris lainnya. Jika tetap dia kuasai maka penguasaannya atas kelebihan dari apa yang menjadi bagiannya itu adalah penguasaan yang tidak sah atau penguasaan yang haram, dan kepemilikannya atas kelebihan dari bagiannya itu juga merupakan kepemilikan yang haram, dan konsekuensinya dia juga haram melakukan *taṣarruf* atasnya. Pada saat yang sama, jika dia tetap menguasai kelebihan dari bagiannya itu maka ia telah melakukan kezaliman, sebab menguasai harta pihak lain. Kezaliman itu menjadi lebih serius sebab yang dia zalimi adalah kerabatnya yang bisa jadi termasuk orang yang nafkahnya menjadi kewajibannya jika orang itu tidak mampu. Sedangkan ahli waris yang mendapat bagian kurang dari bagian yang seharusnya sesuai ketentuan *syari'ah*, maka penguasaannya atas bagian yang diberikan padanya itu adalah sah. Sebab ia menguasai apa yang memang menjadi haknya atas harta waris itu. Namun pada saat yang sama, ia terzalimi sebab sebagian dari bagiannya diambil atau dikuasai oleh pihak lain. Dalam pandangan *syari'ah* ia berhak menuntutnya ke hadapan *qadi*. Nantinya *qadi* akan menentukan bagiannya sesuai *syari'ah* dan mengambilnya dari pihak yang menguasainya untuk dikembalikan kepada orang yang menuntut haknya itu”.¹⁵⁰

Menurut Hasanain Muhammad Makhluf seorang pakar hukum Islam dari Mesir yang dikutip Abdul Manan menyatakan bahwa dalam masalah kewarisan Islam mensyari'atkan aturan hukum yang adil, tidak boleh berlaku aniaya atau pengurangan bagian karena

¹⁵⁰ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 10

menyangkut penetapan hak milik seseorang, yakni hak yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai ahli waris.¹⁵¹

i. Hak Kewarisan Ayah dan Ibu Menurut Hukum *Farā'id*

Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 2 menyatakan: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹⁵² Dalam Kitab-Kitab *Fiqh* Warispun dijelaskan bahwa jika ahli waris laki-laki dan perempuan bertemu seluruhnya maka yang berhak mendapat bagian dari harta waris hanya lima orang, yaitu: anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu dan suami/isteri.¹⁵³ Demikian pula sebagaimana yang dikutip Beni Ahmad Saebi dari kitab *Kifayatul Akhyar* bahwa anak, ayah, ibu, suami, dan isteri adalah ahli waris yang tidak putus karena keadaan.¹⁵⁴

Berdasarkan praktik pembagian warisan secara hukum Islam dapat diketahui bahwa hak kewarisan ayah tidak bisa dihalangi, ayah bisa meng*hijab* (menghalangi pewarisan) orang lain.¹⁵⁵ Demikian pula ibu, ia termasuk ahli waris langsung yang berhak menerima warisan dan kedudukannya tidak dapat ditutup oleh ahli waris lainnya.¹⁵⁶ Meskipun hak waris ayah dan ibu tidak terhalang oleh ahli waris manapun, namun kadar besar kecilnya bagian waris yang bisa

¹⁵¹ Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006. h. 121

¹⁵² Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1999

¹⁵³ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h.47

¹⁵⁴ Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009. h. 123

¹⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10, Terjemah Abdul Hayyie, dkk.* Jakarta: Gema Insani, 2011. h. 383

¹⁵⁶ Destri Budi Nugraheni. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014. h. 96

mempengaruhi bagian yang diterima ayah dan ibu. Dalam hal ini mengandung arti bahwa bagian ayah dan ibu berbeda kadarnya menyesuaikan ada atau tidak adanya ahli waris anak keturunan *muwaris*.

Bapak mempunyai dua kemungkinan dalam mewarisi, ia dapat bertindak sebagai *zul farā'id* yakni mendapat bagian sesuai dengan kadar bagian yang telah ditentukan untuk bapak dan *zul qarabat* yakni mendapat bagian sisa harta. Sebagai *zul farā'id* apabila ia didampingi oleh anak dari pewaris dan sebagai *zul qarabat* apabila tidak didampingi oleh anak si pewaris walaupun ada pewaris lain yang sama-sama mewaris bersamanya seperti ibu, janda atau duda atau saudara.¹⁵⁷

Bagian kewarisan untuk bapak, ada tiga kondisi dalam menerima harta warisan yang masing-masing memberikan bagian yang berbeda dari harta waris yang ditinggalkan oleh anaknya. Bapak bisa mewarisi dengan jalan *farḍ*, mewarisi dengan jalan *aṣabah*, dan mewarisi dengan jalan *farḍ* dan *aṣabah* berbarengan.¹⁵⁸

Adapun ketiga kondisi pewarisan bapak sebagaimana di atas dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Bapak mendapat seperenam itu terjadi jika si mayit memiliki cabang laki-laki baik anak laki-laki atau putera anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, dimana mereka berposisi sebagai *aṣabah bi*

¹⁵⁷ Sayuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. h. 66

¹⁵⁸ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 1994. h. 245

nafsihi.¹⁵⁹ Sebagaimana tertuang dalam buku *Fiqh Islam Lengkap* Mazhab Syafi'i bahwa ayah mendapat seperenam jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki.¹⁶⁰

- 2) Bapak mendapat bagian *farḍu* seperenam ditambah menjadi *aṣabah* itu terjadi jika si mayit memiliki cabang (anak atau anak dari anak laki-laki) perempuan.¹⁶¹ Dalam bahasa lain ketika ada ahli waris garis anak yang perempuan dari anak laki-laki meskipun ayahnya terus turun ke bawah, seperti orang yang mati meninggalkan ayah dan anak perempuan.¹⁶²
- 3) Bapak mendapat bagian *aṣabah* saja, kondisi ini terjadi jika si mayit tidak memiliki cabang baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kondisi ini tidak ada ahli waris yang berposisi sebagai *aṣabah* yang lebih diutamakan dari bapak.¹⁶³ Ketika tidak ada ahli waris garis anak sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan maka bapak menerima secara *aṣabah* saja.¹⁶⁴

Adapun hak kewarisan ibu, ia tetap mewarisi sebagai *zūl farā'id* yang bagiannya bisa 1/3 atau 1/6.¹⁶⁵ Jika tidak ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka ibu mendapat 1/3 namun jika ada

¹⁵⁹ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 171

¹⁶⁰ Musthafa Dīb Al-Bughā. *Fikih Islam Lengkap (penjelasan hukum-hukum Islam) Madzhab Syafi'i. Cet.10*. Solo: Media Zikir, 2010. h.335

¹⁶¹ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 172

¹⁶² Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10, Terjemah Abdul Hayyie, dkk.* Jakarta: Gema Insani, 2011. h. 383

¹⁶³ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 174

¹⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10, Terjemah Abdul Hayyie, dkk.* Jakarta: Gema Insani, 2011. h. 383

¹⁶⁵ Sayuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. h. 70

anak maka ibu mendapat 1/6.¹⁶⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam *Fikih Islam Madzhab Syafi'i*, dinyatakan bahwa ibu mendapat harta warisan seperenam jika ada anak, atau cucu dari anak laki-laki, atau dua orang lebih dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan.¹⁶⁷

Secara rinci ibu mempunyai tiga keadaan dalam mewarisi, yaitu:

- 1) Ibu mendapat bagian *farḍu* seperenam, hal ini jika ada cabang si mayit anak laki-laki, anak perempuan, anak dari anak laki-laki, dua orang atau lebih saudara, baik saudara-saudara kandung, seapak atau seibu.¹⁶⁸ Dalam bahasa lain ibu mendapat seperenam ketika ada ahli waris anak secara mutlak yaitu anak atau anaknya anak laki-laki meskipun ke bawah, atau dua orang saudara laki-laki, perempuan atau lebih dari arah mana saja.¹⁶⁹
- 2) Ibu mendapat bagian *farḍu* sepertiga, hal ini terjadi jika ahli waris hanya ibu dan bapak saja, tidak ada ahli waris lainnya.¹⁷⁰ Dalam istilah lain ibu mendapat sepertiga ketika tidak ada orang-orang yang tersebut pada keadaan pertama, yakni ahli waris anak,

¹⁶⁶ Sayuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. h. 71

¹⁶⁷ Musthafa Dib Al-Bugha. *Fikih Islam Lengkap (penjelasan hukum-hukum Islam) Madzhab Syafi'i. Cet.10*. Solo: Media Zikir, 2010. h.335

¹⁶⁸ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 190

¹⁶⁹ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar, *Terjemah Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, h. 409

¹⁷⁰ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016, h. 190

sejumlah saudara-saudara laki-laki dan ayah ibu tidak bersama salah seorang suami atau isteri.¹⁷¹

- 3) Ibu mendapat bagian *farḍu* sepertiga dari sisa, hal ini terjadi jika ahli waris hanya ibu, bapak, suami atau isteri dan tidak ada ahli waris lainnya.¹⁷² Dalam pembagian warisan seperti ini, jika bersama dengan orang tua ada ahli waris salah seorang suami atau isteri, hal ini dikenal dengan masalah *garawain*.¹⁷³

Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan besarnya bagian warisan untuk ayah dan ibu, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 177 dan pasal 178 sebagai berikut:

Pasal 177 : Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178 : (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.¹⁷⁴

Aturan *hijab/mahjub* ayah dan ibu tidak termasuk ke dalam kategori ahli waris yang tergolong *hijab hirmān* yang menyebabkan mereka terhalang secara keseluruhan untuk mendapatkan warisan. Tetapi ayah dan ibu hanya dalam suatu kondisi tertentu bisa termasuk ke dalam kategori *hijab nuqṣan*, yang mana hanya menyebabkan

¹⁷¹ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar, *Terjemah Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, h. 409

¹⁷² Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016, h. 190

¹⁷³ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar, *Terjemah Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, h. 409

¹⁷⁴ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1999

berkurangnya kadar bagian warisan saja dan bukan terhalang sepenuhnya. Adapun golongan ahli waris yang tidak *terhijab* secara *hirman* selamanya adalah suami, isteri, bapak, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan.¹⁷⁵

Hukum waris Islam mengenal adanya golongan ahli waris utama yang mana ayah dan ibu termasuk dalam golongan ini. Golongan ahli waris utama adalah mereka yang sangat dekat hubungannya dengan pewaris, dan juga ahli waris utama ini tidak akan terhalang oleh ahli waris lainnya.¹⁷⁶ Golongan ahli waris utama ini ada lima yakni janda/duda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan.¹⁷⁷

Ayah dan ibu termasuk kategori ahli waris langsung, artinya ayah dan ibu bersama anak, janda/duda mereka langsung berhak menerima bagian waris dan ahli waris ini tidak dapat ditutup oleh ahli waris lain.¹⁷⁸ Ayah termasuk tiga laki-laki yang pasti mendapatkan warisan dan tidak akan pernah terhalang dari menerima warisan, mereka adalah suami, bapak, dan anak laki-laki. Demikian pula ibu termasuk tiga perempuan yang pasti mendapatkan warisan dan tidak akan pernah terhalang dari menerima warisan, mereka adalah isteri,

¹⁷⁵ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 235

¹⁷⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h. 50

¹⁷⁷ Otje Salman, *Hukum Waris Islam Cet. III*, Bandung: Refika Aditama, 2010, h. 53

¹⁷⁸ Destri Budi Nugraheni, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, h. 96

ibu, dan anak perempuan.¹⁷⁹ Keenam ahli waris inilah yang dimaksud Ahmad Sarwat sebagai ahli waris *internal* yakni mereka yang termasuk di dalam daftar ahli waris dan sudah dipastikan akan mendapatkan harta warisan dari almarhum, tidak ada penghalang atau tabir yang menutupi.¹⁸⁰

Ilustrasi pembagian harta warisan dengan berkumpulnya para ahli waris, yaitu: anak laki-laki, anak perempuan, ibu, ayah, suami/isteri, maka besaran bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki dan anak perempuan menerima sisa karena mereka sebagai *aṣabah bil-gair*.¹⁸¹
- 2) Ibu mendapat bagian 1/6 karena *muwaris* mempunyai anak.¹⁸²
- 3) Bapak mendapat 1/6 karena *muwaris* mempunyai anak.¹⁸³
- 4) Suami mendapat 1/4 karena pewaris mempunyai anak (jika isteri yang meninggal).¹⁸⁴
- 5) Isteri mendapat 1/8 karena pewaris mempunyai anak (jika suami yang meninggal).¹⁸⁵

¹⁷⁹ Achmad Yani, *Faraidh Mawaris: Bungan Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 33

¹⁸⁰ Ahmad Sarwat, *Pelatihan Dasar Faraidh Cet. II*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017, h. 61

¹⁸¹ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 38

¹⁸² Nur'aisyah Albantany, *Pembagian Harta Warisan dalam Islam untuk Wanita*, Tangerang: Sealova Media, 2014, h. 37

¹⁸³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 37

¹⁸⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 112

¹⁸⁵ Ibid. h. 112

j. Hak Kewarisan Ayah dan Ibu dalam Hukum Adat

Beni Ahmad menyatakan bahwa masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistim kekeluargaan yang dianut.¹⁸⁶ Dengan demikian dalam pelaksanaan kewarisan dalam masyarakat adat tentunya terdapat pula perbedaan dalam penerapan hukum kewarisan tersebut, yang mana perbedaan dalam hal ini dipengaruhi masalah sistim kekeluargaan yang dianut masing-masing suku.

Menurut A. Siti Soetami ada tiga golongan dasar pertalian keturunan, yaitu:

- 1) Keturunan darah menurut garis bapak (*patrilineal*), seperti pada suku Batak, Nias, Bali, dan Sumba. Masyarakat *patrilineal* ini di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan dari pihak bapak saja terus ke atas (*vertical*), sehingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu bapak asal.
- 2) Pertalian darah menurut garis ibu (*matrilineal*), seperti pada masyarakat Minangkabau, Kerinci, dan Samedo. Masyarakat *matrilineal* di mana anggotanya menarik garis keturunan dari pihak ibu saja, terus meneruskan ke atas (*vertical*), sehingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang ibu asal.

¹⁸⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 17

- 3) Pertalian darah menurut garis ibu dan garis bapak (tata susunan *parental/bilateral*), seperti suku Jawa, Sunda, Madura, Aceh, Dayak, dan lingkungan hukum Melayu.¹⁸⁷

Disamping sistim kekeluargaan, hukum adat waris mengenal tiga sistim kewarisan, yaitu:

- 1) Sistem kewarisan *individual*, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan.
- 2) Sistem kewarisan *kolektif*, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama karena harta tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya.
- 3) Sistem kewarisan *mayorat*, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak.¹⁸⁸ Dalam artian bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya pada seorang anak yang tertua saja.¹⁸⁹

Disamping ketiga golongan dasar pertalian keturunan yang mendasari pelaksanaan hukum waris Adat, corak kewarisan Adat juga mempunyai 5 asas hukum waris. Sebagaimana menurut Umar Syihab yang dikutip Rosnidar dalam bukunya *Hukum Keluarga*, lima asas yang dimaksud dalam hukum waris adat, yaitu:

- 1) Asas ketuhanan dan pengendalian diri

¹⁸⁷ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.305

¹⁸⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW Cet. IV*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, h.43

¹⁸⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia Cet. IV*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 138

- 2) Asas kesamaan dan kebersamaan hak
- 3) Asas kerukunan dan kekeluargaan
- 4) Asas musyawarah dan mufakat
- 5) Asas keadilan¹⁹⁰

Umumnya masyarakat Indonesia menerapkan pembagian berimbang yaitu diantara semua waris mendapat bagian yang sama, seperti dilakukan oleh masyarakat Jawa, dan banyak pula yang menerapkan hukum waris Islam di mana setiap waris telah mendapatkan jumlah bagian yang telah ditentukan.¹⁹¹

Pelaksanaan pembagian warisan secara hukum adat, apabila si pewaris meninggalkan anak maka kepemilikan semua harta warisan adalah mutlak hak dari anak si pewaris. Hal ini karena dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting, oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga yang lain tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan memiliki anak.¹⁹² Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.¹⁹³

¹⁹⁰ Rosnindar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 208

¹⁹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1997, h.106

¹⁹² Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.23

¹⁹³ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia cet.II*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 24

Mengenai hak waris orang tua menurut hukum waris Adat, mereka juga mempunyai hak terhadap harta warisan, namun derajat mereka di bawah anak-anak keturunan pewaris, dengan arti orang tua tidak mendapatkan warisan jika pewaris ada mempunyai anak. Dalam hal suatu kondisi apabila pewaris tidak mempunyai anak maka orang tua pewaris itu berhak atas warisan.¹⁹⁴ Hal ini senada dengan apa yang dituangkan Alfani Daud dalam bukunya *Islam dan Masyarakat Banjar*, bahwa bila dari perkawinan itu ada anak maka si janda/duda yang masih hidup bersama anak atau anak-anaknya menguasai seluruh harta.¹⁹⁵

Hukum waris Adat sebenarnya dapat juga berlaku bagi masyarakat adat muslim. Namun pemberlakuan hukum waris Adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana menurut Yeni bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan Hukum Islam.¹⁹⁶

k. Hak Kewarisan Ayah dan Ibu dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Burgerlijk Wetboek (BW) terdiri dari empat buku, buku I tentang orang, buku II tentang Kebendaan, buku III tentang Perikatan, dan buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa. Adapun masalah kewarisan tertuang dalam buku II title 12 sampai dengan 18, pasal 830

¹⁹⁴ Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris*, Bandung: CV. Pionir jaya, 1987, h.73

¹⁹⁵ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, h. 206

¹⁹⁶ Sayuti Thalib, *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1980, h.15

sampai dengan 1130.¹⁹⁷ Hukum waris diatur di dalam buku II karena hak waris merupakan hak kebendaan atas harta peninggalan dan juga karena pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Pewarisan yang dimaksud hanya berlangsung karena adanya sebab kematian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 830 KUH Perdata.¹⁹⁸ Pewarisan hanya terjadi karena kematian.¹⁹⁹

Adapun sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW) yaitu menganut:

- 1) Sistem pribadi, maksudnya bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
- 2) Sistem *bilateral*, maksudnya mewarisi baik dari pihak ibu maupun bapak.
- 3) Sistem perderajatan, maksudnya bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.²⁰⁰

Menurut Ishak golongan ahli waris berdasarkan garis kekeluargaan dibagi menjadi empat golongan sebagaimana yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Adapun golongan ahli waris tersebut, yaitu:

¹⁹⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h. 28

¹⁹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, h.21

¹⁹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Cet VI*. Bandung: Citra Umbara, 2013, h. 225

²⁰⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h.5

1. Golongan pertama (I), meliputi: suami/isteri dan garis keturunan dari pewaris dalam garis lurus ke bawah.
2. Golongan kedua (II), meliputi: orang tua, saudara-saudara sekandung, dan keturunan dari pewaris.
3. Golongan ketiga (III), meliputi: keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis bapak maupun ibu.
4. Golongan keempat (IV), meliputi: saudara/saudari dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam dengan kemungkinan derajat ketujuh, karena penggantian tempat.²⁰¹

Hak-hak mewarisi dari golongan-golongan ini menurut BW tergantung ada atau tidak adanya golongan sebelumnya. Maksudnya bahwa golongan I menutup hak waris golongan II, golongan II menutup hak waris golongan III, golongan III menutup hak waris golongan IV. Jika golongan I sampai kepada golongan IV tidak ada, maka harta warisan itu milik Negara.²⁰²

Berdasarkan aturan waris BW jika tidak ada janda atau tidak ada keturunan dari pewaris yang akan mewarisi dan dapat mewarisi, maka warisan itu akan jatuh pada ahli waris golongan kedua, yaitu orang tua dan saudara-saudara sekandung dan/atau anak-anak, keturunan dari saudara-saudara sekandung.²⁰³

²⁰¹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 186

²⁰² Ibid. h. 187

²⁰³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, h. 2

Berdasarkan beberapa sistim hukum warisan yang berlaku pada masyarakat Indonesia yang majemuk, maka hukumnya pewarislah yang berlaku. Yang dimaksud hukumnya pewaris adalah hukum waris yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, yang berlaku adalah hukum waris adat sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, berlaku hukum waris Barat.²⁰⁴ Pada keadaan lain masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam.²⁰⁵

3. Teori 'Urf

'Urf atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁰⁶ Dalam pengertian lain 'Urf adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.²⁰⁷ Dalam pembicaraan ahli hukum tidak ada

²⁰⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, h.270

²⁰⁵ Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979, h. 85

²⁰⁶ Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal Cet. III*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, h. 109

²⁰⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 161

perbedaannya antara 'Urf dan adat. 'Urf adalah kata bahasa Arab yang terjemahnya dalam bahasa Indonesia cenderung diartikan dengan adat, kebiasaan.²⁰⁸ Para *Fuqaha* memberikan definisi 'Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu.²⁰⁹

Berdasarkan legitimasi *syari'at* menurut Muhthafa Dib al-Bugha dalam bukunya *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha fi al-Fiqh al-Islamy* yang dikutip Isnan Ansory, 'Urf dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 'Urf *Ṣaḥih*, 'Urf *Fasid*, dan 'Urf *Mursal*.²¹⁰ 'Urf *Ṣaḥih* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.²¹¹ 'Urf *Fasid* ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, namun berlawanan dengan ketentuan *syari'at*, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.²¹² 'Urf *Mursal* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak dikonfirmasi secara langsung oleh *syari'at* secara positif maupun negatif.²¹³

Menurut Hasbiyallah ada empat kelompok penyeleksian adat yang bisa dilestarikan atau dihilangkan, yaitu:

²⁰⁸ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 92

²⁰⁹ Ibid. h. 93

²¹⁰ Isnan Ansory, *Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017, h. 192

²¹¹ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 94

²¹² Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal Cet. III*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, h. 110

²¹³ Isnan Ansory, *Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017, h. 193

- a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan, atau unsur manfaat lebih besar dari *mudarat*. Adat dalam bentuk ini diterima dalam Islam.
- b. Adat yang lama secara *substansial* mengandung unsur *maslahat*, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. Adat yang lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
- d. Adat atau '*Urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, baik secara langsung atau tidak langsung.²¹⁴

'*Urf*' atau adat merupakan salah satu dari panca kaidah *kulliyah* yang semula dinamakan kaidah *uṣul* yang mana panca kaidah *kulliyah* merupakan kaidah pokok dari segala kaidah *fiqhiyah* yang ada. Sebab segala permasalahan-permasalahan *furu'iyah* dapat diselesaikan dengan kaidah *kulliyah* yang lima.²¹⁵ Adapun berkenaan dengan bahasan masalah adat sebagaimana di atas, maka kaidah *ushul* yang menerangkan bahwa adat dapat dijadikan hukum adalah: *ألعادة محكمة* (*Al-Ādatu Muhakkamah*)

yang terjemahnya "adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum".²¹⁶

Kaidah hukum *fiqh* tersebut memberi pengertian bahwa untuk menentukan

²¹⁴ Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal Cet. III*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017. h. 111

²¹⁵ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 37

²¹⁶ Ibid. h. 92

hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima salah satu teknik menentukan hukum melalui adat kebiasaan.²¹⁷

Berdasarkan kedudukan hukumnya '*Urf Ṣaḥih*' wajib dipertahankan dalam pembinaan hukum *qaḍa* (memutuskan perkara). Seorang mujtahid harus memperhatikan '*Urf*' dalam menetapkan sesuatu hukum dan seorang *qaḍi* (hakim) harus memperhatikannya pula dalam memutuskan sesuatu perkara. Selama '*Urf*' tidak menyalahi hukum *syara*' maka wajib memeliharanya.²¹⁸ Adapun '*Urf*' yang *fasid* maka tidak wajib memeliharanya, sebab memelihara adat yang demikian bertentangan dengan dalil *syara*'.²¹⁹

Dalam bukunya *Ilmu Ushul Fiqih* Isnan Ansory menerangkan syarat diterimanya '*Urf*' sebagai dasar hukum *syari'at*, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan nash yang diamalkan;
- b. Mengandung *maslaḥat*;
- c. Berlaku pada orang banyak;
- d. Sudah berlaku lama;
- e. Tidak bertentangan dengan '*Urf*' yang lain.²²⁰

Salah satu metode penetapan hukum Islam yakni metode *al-ẓari'ah* yang mengandung makna suatu media atau perantara yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau mengantarkan kepada suatu tujuan yang diinginkan.²²¹ Maka metode ini dapat digunakan dalam menarik

²¹⁷ Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Cet. II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 54

²¹⁸ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 94

²¹⁹ Ibid. h. 94

²²⁰ Isnan Ansory, *Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017, h. 196

²²¹ Abdul Helim, *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*, Malang: Intelegensia Media, 2018, h. 52

kesimpulan tentang adat yang berlaku dalam masyarakat berupa kewajiban melaksanakan sesuatu yang dapat membawa kepada kemaslahatan atau sebaliknya kewajiban menutup sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan. Adat yang membawa kepada kemaslahatan harus dipertahankan dan sesuatu untuk menuju kemaslahatan ini harus dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud kaidah “*Fath al-ẓari‘ah*” yakni media yang dapat mengantarkan kepada kemaslahatan wajib dilaksanakan. Adapun adat yang dapat menimbulkan kemudharatan atau yang bertentangan dengan *syar‘i* harus ditinggalkan dan ditutup hal ini sesuai dengan maksud kaidah “*Sadd al-ẓari‘ah*” yakni wajib untuk menutup jalan yang bisa menimbulkan mudharat dan bertentangan dengan hukum *syar‘i*.

Berdasarkan konteks metode “*maslahah*” yakni metode yang digunakan dalam penggalan *fiqh* yang memfokuskan diri untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudharatan beserta media-media yang menyertainya.²²² Maka kemaslahatan yang ditimbulkan dalam adat dapat dilihat dari tiga cabang *maslahah*, yakni *maslahah mu‘tabarah*, *maslahah mulgah*, dan *maslahah mursalah*. *Maslahah mu‘tabarah* adalah nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan didukung *syarak*. *Maslahah mulgah* adalah nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak didukung atau bertentangan dengan *syara‘* sehingga kemaslahatannya pun ditolak. *Maslahah mursalah* adalah menurut pertimbangan akal adanya suatu

²²² Ibnu Elmi, *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, Malang: Setara Press, 2015, h. 94

kemaslahatan atau kebaikan dalam suatu persoalan dan dipandang sejalan pula dengan kehendak *syara'*, kemaslahatan ini tidak didukung dan tidak pula ditolak *syara'*.²²³

4. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata “adil” berarti sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah.²²⁴ Dalam Bahasa Inggris keadilan disebut “*justice*”, kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu: Pertama, secara *atributif* berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*). Kedua, sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*). Ketiga, orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke Pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).²²⁵

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*“, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institution*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang

²²³ Abdul Helim, *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*, Malang: Intelegensia Media, 2018, h. 50

²²⁴ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 13

²²⁵ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 91

telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²²⁶ Selain itu, John Rawls dalam *theory of justice* memuat tiga poin yang salah satunya memuat prinsip kebebasan yang sama, antara lain kebebasan personal dan kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.²²⁷

Menurut M. Quraisy Syihab, ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar agama, yaitu: Pertama, *adil* dalam arti “sama” sebagaimana tertuang dalam surah An-Nisa ayat 58. Kedua, *adil* dalam arti “seimbang” sebagaimana tertuang dalam surah Al-Infithar ayat 6-7. Ketiga, *adil* adalah “pengertian terhadap hak-hak individu dan memberi hak-hak itu kepada setiap pemiliknya” sebagaimana tertuang dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Keempat, *adil* yang dinisbatkan kepada *Ilahi*. *Adil* di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya *eksistensi*, tidak mencegah kelanjutan *eksistensi* dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.”²²⁸

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. *Adil* dalam pengertian ini didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).²²⁹

²²⁶ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), h. 135

²²⁷ <https://www.kompasiana.com/michaelkabatana/teori-keadilan-john-rawls-dan-tanggapan-atas-teorinya>

²²⁸ <https://www.anekamakalah.com/2012/02/keadilan-dalam-alquran.html>

²²⁹ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada acara seminar nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009, h. 9

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah:

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti suatu hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).²³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu peneliti mengambil tiga penelitian yang dianggap relevan, sebagai berikut:

1. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Idah Suaidah pada tahun 2004 dengan meneliti tentang “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam di Kota Palopo”. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Kota Palopo tentang hukum waris Islam sehingga masyarakat menyelesaikan masalah kewarisan menurut kehendak masing-masing pihak yang bersangkutan sesuai persepsinya terhadap sistem kewarisan yang dipilih.²³¹
2. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Mintarno pada tahun 2006 dengan meneliti tentang “Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender (Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa dalam penentuan ahli waris, masyarakat menggunakan sistem waris Islam.

²³⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 93

²³¹ <http://repository.uin-alauddin.ac.id/6540/> diakses pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 19.45 WIB

Apabila sistem hukum Islam diterima maka sistem ini yang digunakan dan apabila tidak diterima maka dilakukan sedikit penyesuaian dengan tidak meninggalkan konsep hukum kewarisan Islam.²³²

3. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Fitria Agustina Adyanti pada tahun 2015 dengan meneliti tentang “Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dan Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Harta Waris Islam”. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat muslim Desa Triguno tidak menggunakan pembagian harta waris secara Islam adalah dikarenakan pengertian masyarakat Desa Triguno tentang adil adalah ketika tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris.²³³

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, peneliti mengambil perbandingan tentang pelaksanaan hukum waris Islam dalam proses pembagian harta waris yang menyesuaikan dengan yang akan diteliti peneliti tentang Pengabaian Hak Waris Ayah dan Ibu pada Pelaksanaan Pembagian Warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun persamaan dan perbedaan peneliti sebagai berikut:

²³² <http://eprints.undip.ac.id/15158/1/MINTARNO.pdf> diakses pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 20.15 WIB

²³³ <http://eprints.walisongo.ac.id/4294/> diakses pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 20.30 WIB

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan serta Kedudukan Peneliti

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian, dan Pendekatan Penelitian	Persamaan	Perbedaan dan Kedudukan Peneliti
1.	Idah Suaidah pada tahun 2004 dengan meneliti tentang “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam di Kota Palopo. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif.	Pelaksanaan hukum waris sesuai hukum Islam	Pelaksanaan pembagian warisan sesuai Kompilasi Hukum Islam sedangkan peneliti meneliti pengabaian hak waris pada pelaksanaan pembagian warisan di Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur
2.	Mintarno pada tahun 2006 dengan meneliti tentang “Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender (Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Menggunakan pendekatan Kualitatif Yuridis Sosiologis.	Pelaksanaan hukum waris sesuai hukum Islam	Penyesuaian penentuan ahli waris dengan tidak meninggalkan konsep hukum Islam sedangkan peneliti meneliti pengabaian hak waris pada pelaksanaan pembagian warisan di Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur
3.	Fitria Agustina Adyanti pada tahun 2015 dengan meneliti tentang “Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dan Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Harta Waris Islam”. Menggunakan pendekatan Kualitatif Normatif Sosiologis.	Pelaksanaan hukum waris sesuai hukum Islam	Proses pembagian warisan tidak berdasarkan hukum Islam sedangkan peneliti meneliti pengabaian hak waris pada pelaksanaan pembagian warisan di Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah berupa fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, hal ini tentunya harus ditentukan jenis dan tipe penelitian yang sesuai dengan objek penelitian. Sabian Utsman menyatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan haruslah sesuai dengan jenis atau tipenya masing-masing, sehingga akurasi hasil penelitian hukum yang dilakukan menjadi fungsional.²³⁴

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum *normatif* dan penelitian hukum *empiris*.²³⁵ Penelitian hukum *normatif* adalah penelitian hukum *doktriner*, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum *empiris* merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum *sosiologis*, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.²³⁶

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian hukum *empiris* atau *socio-legal research* karena melakukan penelitian lapangan terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat tentang pengabaian

²³⁴ Sabian Utsman. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. h.3

²³⁵ Suratman Philip Dillah. *Metode Penelitian Hukum Cet.III*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015. h. 51

²³⁶ Ibid. h. 53

hak waris ayah dan ibu pada pelaksanaan pembagian warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Tempat objek yang akan diteliti dalam penelitian ini berlokasi di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, penentuan lokasi ini berdasarkan letak geografis yang strategis dan mudah dijangkau. Keadaan masyarakat yang agamis yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sangat kooperatif sehingga memudahkan dalam penggalan data sebuah penelitian. Keadaan masyarakat majemuk yang tidak membedakan status sosial baik dari suku maupun ras manapun. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama enam bulan dengan rancangan rencana penelitian sebagai berikut:

Table 1

No	Kegiatan	Tahun 2019					
		Jan	Feb	Mar	Apl	Mei	Juni
1	Menyusun proposal dan konsultasi	X	X	X			
2	Seminar proposal			X			
3	Menyusun instrument penggal data			X	X		
4	Mengolah, menganalisis data dan konsultasi				X	X	
5	Ujian tesis						X

B. Prosedur Penelitian

Penelitian yang dilakukan perorangan atau kelompok adalah merupakan aktivitas yang memerlukan proses berfikir dengan mengasah dan mengembangkan rasa ingin tahu, kalau dilakukan dalam konteks sosiologi hukum, maka keingintahuan itu adalah lebih banyak tentang proses hukumnya (ketimbang peristiwa hukumnya) yaitu proses *sosiologis* hukum yang pernah atau sedang dilihat, didengar, dipikirkan, dan atau dirasakan (diamati).²³⁷ Untuk mengaplikasikan rasa ingin tahu tentang apa yang dilihat, didengar dan diamati tertuang dalam sebuah hasil penelitian tentang fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat maka diperlukan sebuah metode penelitian untuk menjawab hal ini.

Penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian dengan pendekatan *kualitatif*. Metode penelitian *kualitatif* menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat *deskriptif* yang bertujuan untuk menerangkan gambaran-gambaran atas dasar kenyataan-kenyataan *empirik* sebagaimana difahami dari permasalahan yang dirumuskan.²³⁸

Hasil dari penelitian ini menggambarkan fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten

²³⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 h. 309

²³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004, h. 133

Kotawaringin Timur yakni pelaksanaan pembagian warisan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang secara kajian hukum Islam proses dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dengan praktik pelaksanaan warisan menurut kaidah hukum waris Islam. Hasil dari analisa fenomena pelaksanaan hukum waris sebagaimana di atas yang dikaji berdasarkan kaidah hukum Islam akan dipaparkan apakah fenomena hukum waris tersebut sesuai dengan maksud *syara* ' atau sebaliknya tidak sesuai dengan maksud *syara* '.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis empiris/sosiologis* diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).²³⁹ Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data hasil pencatatan peneliti dari hasil wawancara berupa fakta yang terjadi di lapangan terhadap para ahli waris dalam penetapan hak waris pada pelaksanaan pembagian harta warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan yang dimaksud data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang diperoleh dari informan baik berupa dokumen, foto, maupun benda-benda yang dapat dijadikan informasi bagi peneliti.

²³⁹ Suratman Philip Dillah. *Metode Penelitian Hukum Cet.III*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015. h. 106

2. Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen.²⁴⁰

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yakni manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai informan kunci dan data yang diperoleh melalui informan bersifat data lunak. Sedangkan sumber data yang bukan berasal dari bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian seperti gambar, foto, catatan atau tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, data yang diperoleh melalui dokumen bersifat data keras.²⁴¹

Peneliti dalam hal ini berusaha menggali data dari sumber data yang tepat dan relevan melalui para ahli waris dalam proses penetapan ahli waris dalam pembagian warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel lima kelompok keluarga ahli waris yang terdapat ahli waris ayah atau ibu, maupun ayah dan ibu sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

- a. Keluarga ahli waris yang terdapat ayah dan ibu sebanyak 3 keluarga.
- b. Keluarga ahli waris yang terdapat ayah saja sebanyak 1 keluarga.
- c. Keluarga ahli waris yang terdapat ibu saja sebanyak 1 keluarga.

2004 ²⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya,

²⁴¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003, h. 55

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mendapatkan data, penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Peneliti mengamati fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan pembagian harta warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²⁴²

Pedoman yang digunakan dalam wawancara ini berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Metode ini digunakan untuk memperoleh tanggapan, pendapat, keterangan secara lisan dari para ahli waris melalui dialog langsung terhadap proses penetapan ahli waris dalam pembagian warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.

²⁴² Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, h. 180

Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana langkah-langkah dalam membagi warisan?
- b. Apakah dalam pelaksanaan pembagian warisan merujuk pada hukum Islam, hukum BW atau hukum adat?
- c. Bagaimana pemahaman tentang ahli waris?
- d. Apakah ayah dan ibu mendapatkan bagian warisan?
- e. Mengapa ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian warisan?
- f. Apakah memahami tata cara pembagian warisan dalam Islam?

3. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan.²⁴³ Dari pengertian dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah pengumpulan atau penyimpanan bukti-bukti ataupun informasi.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data dukung yang lengkap, sah dan bukan yang berdasarkan perkiraan. Dokumen yang dikumpulkan peneliti adalah berupa data keluarga ahli waris di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi subjek penelitian.

²⁴³ Depdiknas, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 240

E. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan, selanjutnya kategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan, dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya atau melakukan analisis bahan hukum (untuk penelitian hukum *normatif*). Jadi analisis ini akan sangat tergantung dari bentuk data yang terkumpul serta jenis penelitian yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan.²⁴⁴

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.²⁴⁵ Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman yaitu aktifitas dalam analisis data *kualitatif* yang dilakukan secara *interaktif* dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Analisis data dalam penelitian *kualitatif* dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:

1. Pengurangan Data

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

²⁴⁴ Suratman Philip Dillah. *Metode Penelitian Hukum Cet.III*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015. h. 107

²⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.h. 178

selanjutnya. Langkah ini dilakukan dengan memilih data yang relevan dan kurang relevan. Hal ini dilakukan agar data yang disajikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penampilan Data

Hasil dari data yang direduksi maka tahapan selanjutnya adalah penampilan data. Dalam penelitian *kualitatif* penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Penampilan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil tampilan data berupa uraian singkat, bagan dan sejenisnya selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan data hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang masih bersifat sementara.

Melakukan langkah-langkah analisis data sebagaimana di atas, maka peneliti dapat menemukan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang pengabaian hak waris ayah dan ibu pada pelaksanaan pembagian warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Keabsahan data dilakukan sejak pengumpulan data dengan menggunakan

derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confermability*).²⁴⁶

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan teknik *triangulasi* data karena menurut sugiyono *triangulasi* data merupakan salah satu cara untuk mengecek keabsahan data atau kebenaran data dan penafsirannya.²⁴⁷ Demikian juga menurut Sabian Utsman teknik *triangulasi* merupakan salah satu dari banyak teknik yang dapat digunakan dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.²⁴⁸

Teknik *triangulasi* ada empat yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori. Teknik *triangulasi* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Teknik *triangulasi* dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik *kredibilitas* data sesuai informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan hasil data observasi di lapangan berupa pengamatan, baik secara langsung kepada subjek penelitian maupun secara tidak langsung dengan informan dengan data-data hasil wawancara di lapangan dengan subjek penelitian; (2) membandingkan data-data hasil wawancara, baik secara subjek penelitian atau informan dengan suatu dokumen yang didapat dari penelitian tersebut; (3) membandingkan data yang diperoleh dari informan

²⁴⁶ Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Prsess, 2012, h. 3

²⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006 h.320

²⁴⁸ Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014 h. 110

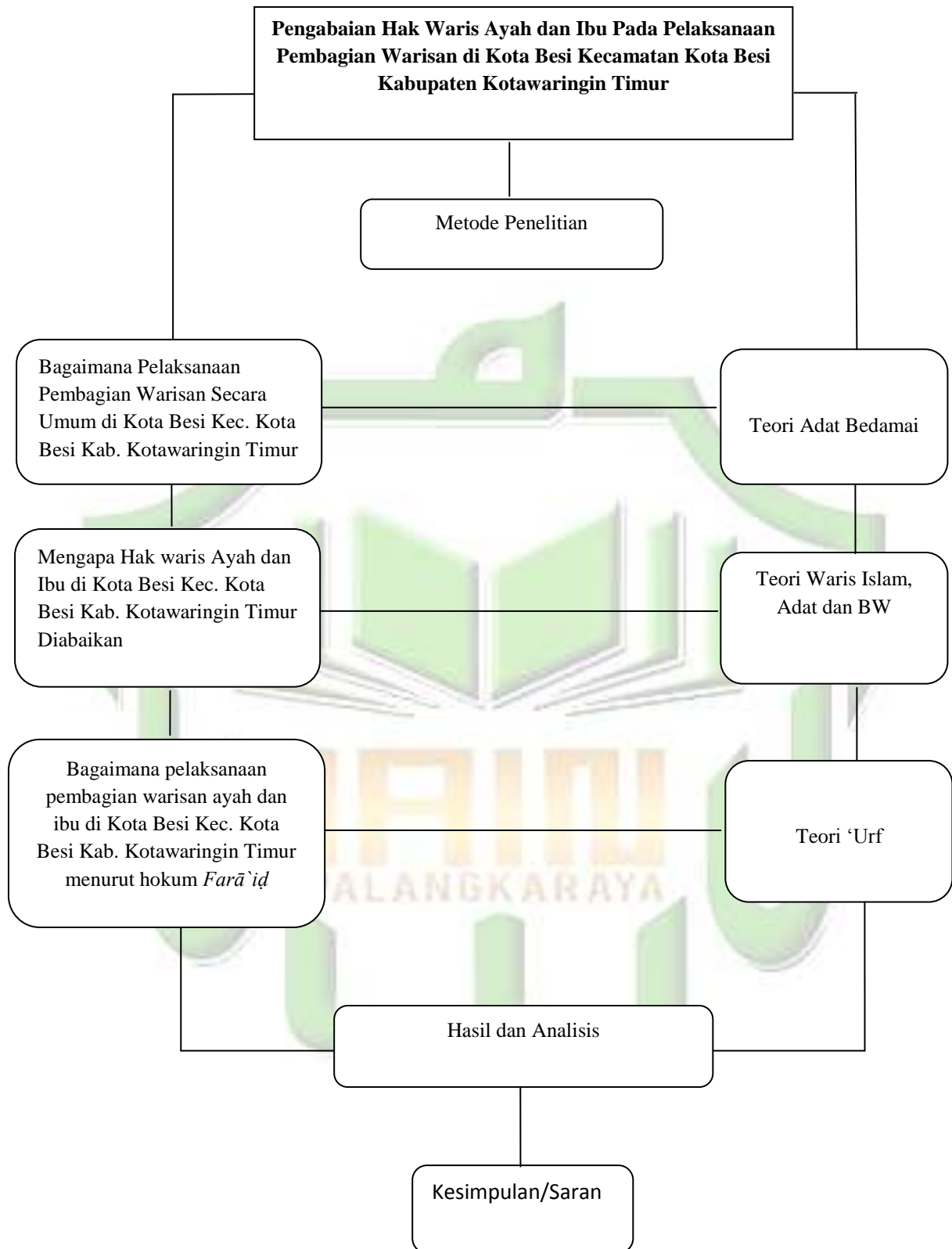
dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa.²⁴⁹ Teknik *triangulasi* inilah yang dilakukan peneliti untuk menyimpulkan keabsahan informasi tentang proses penetapan ahli waris dalam pembagian warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.

G. Kerangka Pikir

Proses pembagian warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal penentuan para ahli waris dan proses pembagian harta warisan kadang tidak berpedoman dengan ilmu *fara'id*. Fakta yang terjadi dalam praktik pelaksanaan pembagian warisan sering didapat adanya ahli waris yang terabaikan haknya dalam menerima harta warisan. Hal seperti ini terjadi pada ahli waris ayah dan ibu yang apabila suami atau isteri meninggal dunia dan masih meninggalkan anak maka yang menjadi ahli waris hanya suami/isteri yang masih hidup beserta anak keturunan saja, sementara ahli waris yang lain terhalang sebagai ahli waris. Sementara dalam hukum waris Islam ahli waris ayah dan ibu adalah termasuk ahli waris utama yang berhak atas harta warisan bersama dengan isteri/suami dan anak-anak keturunan *muwari's*, kedudukan ayah dan ibu sebagai ahli waris tidak ada yang dapat menghalanginya dari menerima harta warisan.

Untuk memudahkan dalam memahami proses penelitian, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

²⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004. h. 178



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kecamatan Kota Besi adalah salah satu Kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kecamatan Kota Besi berlokasi di bagian Utara dan berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten yaitu Kota Sampit.

Kecamatan Kota Besi yang beribu kota Kota Besi terdiri dari dua Kelurahan yaitu Kelurahan Kota Besi Hulu dan Kelurahan Kota Besi Hilir. Kecamatan ini memiliki 11 Desa yaitu: Palangan, Hanjalipan, Simpur, Pamalian, Camba, Kandan, Kota Besi Hulu, Kota Besi Hilir, Bajarum, Rasau Tumbuh, dan Soren. Adapun spesifikasi penelitian ini dilakukan di Ibu Kota Kecamatan yaitu Kota Besi (Kota Besi Hulu dan Kota Besi Hilir). Kecamatan Kota Besi berbatasan langsung dengan Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Kota Sampit.

Kecamatan Kota Besi mempunyai luas wilayah 1.889 Km² dengan luas wilayah Kecamatan Kota Besi per Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kota Besi		
Desa/Kelurahan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1. Palangan	18,50	0,98
2. Hanjalipan	435,00	23,03
3. Simpur	35,00	1,85
4. Pamalian	10,50	0,55
5. Camba	1 200,00	63,52
6. Kandan	118,00	6,25
7. Kota Besi Hulu	14,50	0,77
8. Kota Besi Hilir	19,50	1,03
9. Bajarum	13,50	0,72
10. Rasau Tumbuh	16,50	0,87
11. Soren	8,00	0,42
Jumlah		100,00
Sumber: Kantor Kecamatan Kota Besi		

Adapun jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan di Kecamatan Kota Besi adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan di Kecamatan Kota Besi (kilometer)	
Desa/Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan
1. Palangan	40
2. Hanjalipan	123
3. Simpur	47
4. Pamalian	60
5. Camba	13
6. Kandan	7
7. Kota Besi Hulu	3
8. Kota Besi Hilir	0
9. Bajarum	5
10. Rasau Tumbuh	87
11. Soren	22

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

2. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Penduduk di Kecamatan Kota Besi berjumlah 18.823 jiwa dan 4.518 rumah tangga. Adapun untuk wilayah Kota Besi Hulu berjumlah 5.492 jiwa, 1.336 rumah tangga dan wilayah Kota Besi Hilir berjumlah 2.935 Jiwa, 727 Rumah tangga.

Adapun dari jumlah pemeluk agama di Kecamatan Kota Besi berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin

Timur bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Kota Besi beragama Islam. Beragama Islam dengan jumlah 18.300 jiwa, beragama Kristen berjumlah 986 jiwa, beragama Katolik 444 jiwa, beragama Hindu 363 jiwa, Budha 6 jiwa dan lainnya 90 jiwa.

Adapun jumlah penduduk per Desa/Kelurahan di kecamatan Kota Besi adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk dan Rata-rata Penduduk per Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kota Besi		
Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Rata-rata Penduduk per Rumah Tangga
1. Palangan	1 035	4,46
2. Hanjalipan	1 316	4,29
3. Simpur	421	3,63
4. Pamalian	1 023	4,24
5. Camba	1 640	4,29
6. Kandan	2 680	4,34
7. Kota Besi Hulu	5 492	4,11
8. Kota Besi Hilir	2 935	4,04
9. Bajarum	1 352	4,33
10. Rasau Tumbuh	475	3,60
11. Soren	454	3,91
Jumlah	18 823	4,17

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

b. Jumlah Rumah Tangga

Penduduk di Kecamatan Kota Besi berjumlah 18.823 jiwa dan 4.518 Rumah Tangga. Adapun untuk wilayah Kota Besi Hulu berjumlah 5.492 jiwa dan 1.336 Rumah tangga, wilayah Kota Besi Hilir berjumlah 2.935 Jiwa dan 727 Rumah tangga.

Adapun jumlah rumah tangga per Desa/Kelurahan di kecamatan Kota Besi adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah Rumah Tangga dan Rata-rata Penduduk per Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kota Besi		
Desa/Kelurahan	Rumah Tangga	Rata-rata Penduduk per Rumah Tangga
1. Palangan	232	4,46
2. Hanjalipan	307	4,29
3. Simpur	116	3,63
4. Pamalian	421	4,24
5. Camba	382	4,29
6. Kandan	617	4,34
7. Kota Besi Hulu	1 336	4,11
8. Kota Besi Hilir	727	4,04
9. Bajarum	312	4,33
10. Rasau Tumbuh	132	3,60
11. Soren	116	3,91
Jumlah	4 518	4,17

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

B. Hasil Penelitian

1. Demografi Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap keluarga ahli waris yang melakukan pembagian harta warisan atas meninggalnya salah satu di antara suami atau isteri yang mana suami atau isteri yang meninggal dunia tersebut selain mempunyai anak keturunan juga masih mempunyai ayah atau ibu yang masih hidup.

Responden dalam penelitian ini terbagi kepada dua, yakni responden utama dan responden pelengkap. Responden utama adalah salah satu ahli waris yang berperan atau bertanggungjawab dalam hal pembagian warisan. Responden utama bisa suami atau isteri yang masih hidup ataupun ahli waris anak yang sudah dewasa.

Responden pelengkap dalam penelitian ini mengambil salah satu keluarga ahli waris yang statusnya bukan sebagai ahli waris dari keluarga tersebut. Responden pelengkap juga diambil dari beberapa orang yang mengetahui tentang ilmu waris dalam Islam (ilmu *fara'id*) serta mengetahui adat kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun data demografi responden utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Inisial Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Suku	Status
1.	HR	35	SLTA	Swasta	Dayak	Suami
2.	MA	42	S-1	PNS	Banjar	Suami
3.	ID	45	S-1	PNS	Jawa	Isteri
4.	SD	53	S-1	PNS	Dayak	Suami
5.	LK	37	SLTA	Swasta	Dayak	Anak

Adapun data demografi responden pelengkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Inisial Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Status Ahli Waris
1.	MD	39	S-1	PNS	Keluarga
2.	JO	38	SLTA	Swasta	Keluarga
3.	AE	63	S-1	Pensiunan	Keluarga
4.	WO	47	SLTA	Swasta	Keluarga

2. Kondisi Keluarga Ahli Waris

Adapun kondisi keluarga ahli waris yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

a. Keluarga HR

Keluarga ini terdapat 4 jiwa, yaitu suami, isteri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Status HR adalah merupakan kepala keluarga sebagai suami dan orang tua dari anak-anaknya. Dalam keluarga ini yang meninggal dunia adalah isteri HR, yang mana almarhumah isterinya masih mempunyai kedua orang tua yang masih hidup. Dengan demikian para ahli waris dalam keluarga ini yaitu suami, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, ayah dan ibu dari si isteri yang meninggal dunia.

b. Keluarga MA

Keluarga ini terdapat 4 jiwa, yaitu suami, isteri, dan dua orang anak laki-laki. Status MA adalah merupakan kepala keluarga sebagai suami dan orang tua dari anak-anaknya. Dalam keluarga ini yang meninggal dunia adalah isteri MA, yang mana almarhumah isterinya masih mempunyai kedua orang tua yang masih hidup. Dengan demikian para ahli waris dalam keluarga ini yaitu suami, dua orang anak laki-laki, ayah dan ibu dari si isteri yang meninggal dunia.

c. Keluarga ID

Keluarga ini terdapat 4 jiwa, yaitu suami, isteri, dua orang anak laki-laki. Status ID adalah selaku isteri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya. Dalam keluarga ini yang meninggal dunia adalah suami ID, yang mana almarhum suaminya masih mempunyai seorang ibu

yang masih hidup. Dengan demikian para ahli waris dalam keluarga ini yaitu isteri, dua orang anak laki-laki, dan ibu dari si suami yang meninggal dunia.

d. Keluarga SD

Keluarga ini terdapat 4 jiwa, yaitu suami, isteri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Status SD adalah merupakan kepala keluarga sebagai suami dan orang tua dari anak-anaknya. Dalam keluarga ini yang meninggal dunia adalah isteri SD, yang mana almarhumah isterinya masih mempunyai kedua orang tua yang masih hidup. Dengan demikian para ahli waris dalam keluarga ini yaitu suami, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, ayah dan ibu dari si isteri yang meninggal dunia.

e. Keluarga LK

Keluarga ini terdapat 4 jiwa, yaitu suami, isteri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Status LK adalah merupakan anak laki-laki dari orang tuanya. Dalam keluarga ini yang meninggal dunia adalah suami (ayahnya LK), yang mana almarhum masih mempunyai orang tua laki-laki yang masih hidup. Dengan demikian para ahli waris dalam keluarga ini yaitu isteri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan ayah dari yang meninggal dunia.

3. Pembagian Warisan Secara Umum di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 5 (Lima) keluarga ahli waris tentang pelaksanaan pembagian warisan, maka didapat data sebagai berikut:

a. Wawancara dengan HR

Keluarga HR adalah keluarga yang isterinya meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan dua orang anak yakni seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Disamping suami dan anak-anak masih terdapat ayah dan ibu dari si isteri yang meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HR, bahwa harta peninggalan almarhumah isterinya dibagi kepada para ahli waris. Dalam hal rujukan aturan pembagian waris berpedoman pada hukum Islam, namun menurut penuturannya secara pribadi ia hanya mempunyai sedikit pengetahuan tentang pembagian warisan secara Islam. Dari keterangannya dia tidak begitu mengetahui banyak tentang siapa-siapa sebenarnya yang dianggap sebagai ahli waris. Namun karena para ahli waris dikalangan anak-anak beserta dirinya saja maka pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukannya secara kekeluargaan saja sebagaimana yang biasa dilaksanakan dalam masyarakat.

Proses pelaksanaan pembagian warisan HR memaparkan bahwa:

Pembagian warisan dalam Islam yang banyak diketahui di masyarakat terutama adalah pembagian dua berbanding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan. Secara rincinya proses pembagian secara hukum Islam tidak banyak yang mengetahuinya makanya pembagian warisan dilaksanakan menurut kesepakatan keluarga. Masyarakat selama ini membagi seperti itu karena juga diperbolehkan dalam agama. Hal yang penting dalam pembagian warisan adalah keadilan untuk semua ahli waris. Hak anak laki-laki sebenarnya lebih besar dari anak perempuan tetapi saya melakukan bagi rata kepada mereka supaya adil agar tidak ada kecemburuan kelak.²⁵⁰

Menurut penuturan HR, pembagian warisan yang biasa terjadi dalam masyarakat adalah berbagi rata sesama ahli waris karena hal ini memudahkan untuk pembagian harta warisan apalagi harta warisan yang tidak berupa uang. Para ahli waris bersepakat dalam hal ini, makanya satu sama lain harus saling ikhlas terhadap bagian yang didapatnya. Kemungkinan praktik pembagian seperti ini juga dibenarkan menurut aturan Islam, maka opsi pembagian secara kekeluargaan lebih banyak dilaksanakan dalam masyarakat.

Pedoman yang digunakan dalam membagi warisan menurut HR tetap menyesuaikan sebagaimana dalam aturan Islam, bukan berpedoman pada adat apalagi hukum waris umum. Namun pelaksanaannya saja dengan musyawarah sesama ahli waris sehingga dalam pelaksanaan pembagian warisan semua ahli waris biasanya mempunyai hak yang sama dan bagian yang sama pula baik laki-laki

²⁵⁰ Data bersumber dari hasil wawancara terhadap HR di Kota Besi pada tanggal 06 Mei 2019 pukul 09.30 WIB

maupun perempuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kecemburuan akibat perbedaan dalam hal pembagian.

Berkenaan dengan penentuan ahli waris HR memaparkan bahwa tidak ada ahli waris lain yang berhak atas harta warisan selain dirinya beserta anak-anak. Adanya anak kandung menurutnya menutupi hak kewarisan para ahli waris lain termasuk ayah, ibu, maupun saudara-saudara dari almarhumah isterinya jadi mereka tidak mendapatkan bagian warisan.

b. Wawancara dengan MA

Keluarga MA adalah keluarga yang isterinya meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan dua orang anak yakni keduanya laki-laki. Almarhumah isterinya masih mempunyai kedua orang tua yakni ayah dan ibu yang masih hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MA, bahwa MA membagi harta peninggalan almarhumah isterinya kepada para ahli waris. MA pernah belajar ilmu *Farā'id* pada masa kuliah sehingga mengetahui sedikit tentang hukum waris Islam namun karena tidak pernah mengulang dan mempraktekkan hukum waris ini maka hampir secara keseluruhan sudah lupa terutama tentang siapa-siapa saja yang disebut sebagai ahli waris dan siapa-siapa yang lebih berhak. Hanya dalam hal pembagian hak warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan saja yang masih ingat dengan bandingan dua bagian untuk

anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan karena mereka menerima bersama sebagai *aṣabah*.

Adapun dalam hal pembagian warisan yang dilaksanakan dalam keluarganya MA menuturkan:

Saya mengetahui sedikit tentang ilmu *Farā'id* karena dahulu pernah diajarkan dalam bangku kuliah. Namun karena saya jurusan pendidikan Sekolah Dasar maka tidak mendalami sepenuhnya terhadap hukum *Farā'id* ini. Adapun dalam pembagian warisan yang saya lakukan berpedoman pada hukum Islam namun saya juga mengikuti kepada praktik yang biasa berlaku dalam masyarakat yaitu secara kekeluargaan saja tetapi tidak keluar dari ketentuan hukum Islam. Pembagian secara kekeluargaan diperbolehkan dalam Islam, maka saya membagi harta warisan peninggalan almarhumah isteri saya dengan pembagian secara kekeluargaan dengan sistem bagi rata untuk semua ahli waris. Bagi rata dilakukan agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal ini.²⁵¹

Menurut penuturan MA, pembagian warisan yang diketahuinya boleh dilakukan pembagian secara kekeluargaan atau secara hukum Islam (ilmu *Farā'id*) terutama untuk anak laki-laki dan perempuan yang secara hukum waris Islam berbeda bagiannya, dalam artian boleh bagi rata atau dua berbanding satu untuk anak laki dan perempuan. Namun ia lebih memilih sistim bagi rata dalam hal pembagian untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Dibolehkannya sistim pembagian secara kekeluargaan maka, dalam praktek yang dilakukannyapun secara garis besar berdasarkan kekeluargaan.

²⁵¹ Data bersumber dari hasil wawancara terhadap MA di Kota Besi pada tanggal 06 Mei 2019 pukul 19.40 WIB

Secara umum pembagian warisan yang dilakukannya menurut MA merujuk pada ketentuan aturan Islam bukan berpedoman pada hukum adat apalagi hukum Barat. Namun pada pelaksanaan pembagian warisan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang pernah terjadi dalam masyarakat yaitu pembagian dengan cara damai sesama ahli waris atau dalam istilah pembagian berimbang kepada semua ahli waris sehingga tidak ada ahli waris yang mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ sebagaimana ketentuan ilmu *Farā'id*.

Berkenaan dengan penentuan ahli waris MA memaparkan bahwa tidak merinci keseluruhan ahli waris karena sudah pasti ahli waris lain akan terhalang karena adanya anak kandung sehingga tidak ada ahli waris lain yang mendapatkan bagian selain dirinya beserta anak-anak. Adapun ayah dan ibu dari almarhumah isterinya tidak mendapatkan bagian warisan sebagaimana saudara-saudara isterinya juga tidak dapat.

c. Wawancara dengan ID

Keluarga ID adalah keluarga yang suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan isteri dan dua orang anak yakni keduanya laki-laki. Almarhum suaminya masih mempunyai orang tua tetapi hanya ibu yang masih hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan ID, bahwa ia membagi harta peninggalan suaminya berdasarkan sebagaimana kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dalam

membagi warisan. ID tidak tahu sama sekali tentang ilmu waris Islam dan hanya mengetahui pembagian warisan secara kekeluargaan.

Pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukannya ID menuturkan:

Saya tidak mengetahui hukum waris Islam, pembagian warisan mengikuti kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Karena masyarakat mayoritas beragama Islam jadi kemungkinan pembagian warisan secara Islam yaitu sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat. Saya bagikan menurut kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat yaitu pembagian secara kekeluargaan dengan cara berbagi adil dan bagi rata kepada semua ahli waris.²⁵²

Menurut penuturan ID harta warisan peninggalan almarhum suaminya proses pembagian yang dilakukannya berpedoman kepada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, ia tidak tahu apakah itu secara adat, secara hukum Islam atau hukum umum yang jelas semua harta warisan dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan untuk anak-anak dan dirinya.

Kebiasaan dalam masyarakat yang menggunakan musyawarah dalam menentukan pembagian warisan maka hal inilah yang dijadikan acuan dalam pembagian warisan. Pembagian warisan seperti ini dipandang lebih adil untuk semua ahli waris karena masing-masing ahli waris mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan. Harta warisan habis dibagi rata secara adil dengan bagian yang sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya.

²⁵² Data bersumber dari hasil wawancara terhadap ID di Kota Besi pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 10.20 WIB

Berkenaan dengan penentuan ahli waris ID memaparkan bahwa tidak ada tata cara khusus yang digunakan sebagai penentuan para ahli waris, memang masih ada ibu maupun saudara-saudara tetapi kalau ada anak otomatis mereka terhalang sehingga tidak ada ahli waris lain yang berhak atas harta warisan selain dirinya beserta anak-anak.

d. Wawancara dengan SD

Keluarga SD adalah keluarga yang isterinya meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan dua orang anak yakni seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Disamping suami dan anak-anak masih terdapat ayah dan ibu dari si isteri yang meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SD, ia mengatakan bahwa dalam keluarganya membagi harta warisan peninggalan almarhumah isterinya kepada yang berhak, namun SD tidak tahu tentang pembagian warisan secara Islam makanya dalam proses pembagian harta warisan dilaksanakan secara kekeluargaan saja sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Pelaksanaan pembagian warisan yang biasa terjadi dalam masyarakat bahwa aturan pembagian warisan adalah kembali kepada keluarga masing-masing mau seperti apa pembagiannya. SD beranggapan bahwa kemungkinan besar aturan waris yang berlaku tersebut adalah sudah aturan yang berlaku dalam Islam. Namun yang

jelas SD belum pernah tahu bagaimana sebenarnya aturan waris Islam tersebut, sebagaimana penuturannya:

Saya tidak pernah belajar dan tidak mengetahui aturan waris Islam. Saya juga tidak tahu bahwa dalam Islam ada aturan khusus tentang tata cara pembagian warisan. Selama ini pembagian warisan yang biasa dalam masyarakat adalah sebagaimana yang biasa terjadi saat ini, yakni pembagian secara musyawarah sesama ahli waris dengan pembagian secara adil bagi rata dengan sistem kekeluargaan. Orang tua juga tidak pernah menyampaikan aturan apa yang digunakan dalam membagi warisan zaman dahulu. Aturan yang ada cuma pembagian secara merata sesama ahli waris dalam keluarga.²⁵³

Menurut penuturan SD aturan pembagian warisan hanya berpedoman pada kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun tentang ilmu kewarisan dalam Islam tidak pernah sampai kepadanya bahwa ada aturan khusus dalam Islam tentang pembagian warisan tersebut. Harta warisan itu dibagi menurut kesepakatan keluarga saja, demikian juga terhadap harta peninggalan isterinya dibagikan kepada anak-anaknya menurut kebiasaan di masyarakat saja. Pembagian dilakukan dengan bagi rata kepada anak-anaknya tanpa perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Pedoman dalam pembagian warisan yang dilakukan SD menurutnya bukan sebagaimana ketentuan hukum adat atau hukum umum, namun hanya mengikuti kebiasaan para orang tua sebelumnya. Pembagian dengan cara musyawarah dan bagi rata kepada semua ahli

²⁵³ Data bersumber dari hasil wawancara terhadap SD di Kota Besi pada tanggal 07 Juni 2019 pukul 12.35 WIB

waris maka cara seperti itulah yang dipraktekkan dalam membagi harta warisan.

Berkenaan dengan penentuan ahli waris SD memaparkan bahwa sudah pasti anak kandung sebagai ahli waris dan keberadaan mereka menghalangi hak saudara-saudara beserta ahli waris lain sehingga tidak ada ahli waris lain yang berhak atas harta warisan selain dirinya beserta anak-anak. Adapun ayah dan ibu dari almarhumah isterinya tidak mendapatkan bagian warisan dikarenakan terhalang adanya anak kandung.

e. Wawancara dengan LN

Keluarga LN adalah keluarga yang ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkan isteri dan dua orang anak yakni seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Disamping isteri dan anak-anak, almarhum ayahnya masih memiliki ayah sedangkan ibunya telah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan LN, ia mengatakan bahwa harta peninggalan ayahnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak. Dalam penuturannya LN hanya sedikit tahu tentang pembagian warisan secara Islam terutama hanya pada pengetahuan bahwa dalam Islam laki-laki mendapat bagian dua berbanding satu dengan anak perempuan. Adapun untuk pengetahuan siapa ahli waris keseluruhan ia tidak tahu, demikian pula cara pembagiannya dalam Islam juga tidak diketahui bagaimana tata caranya. Harta warisan

peninggalan ayahnya itu dibagi menurut kesepakatan keluarga saja sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat saja.

Pelaksanaan pembagian warisan dalam keluarganya, LN menuturkan:

Keluarga kami membagi warisan secara kekeluargaan saja dengan cara pembagian berimbang dan tidak memandang anak laki-laki ataupun perempuan semua bagi rata walaupun sebenarnya saya sebagai anak laki-laki punya hak lebih besar bagian dari anak perempuan. Sebenarnya mau membagi secara Islam yaitu untuk anak laki-laki dua bagian dan untuk anak perempuan satu bagian tetapi karena kesepakatan untuk bagi rata maka tidak enak memaksakan sebagaimana pembagian secara Islam. Akhirnya pembagian warisan menurut sebagaimana kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat saja yaitu bagi rata secara kekeluargaan. Bagi rata ini dilakukan biar ada rasa keadilan antara sesama ahli waris dan tidak ada kecemburuan dibelakang hari.²⁵⁴

Berdasarkan penuturan LN, kebiasaan yang sering terjadi dalam masyarakat dalam pembagian warisan bahwa harta warisan dibagi untuk anak-anak dan isteri almarhum, maka demikian pula yang mereka laksanakan. Pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan, musyawarah sesama para ahli waris. Besar bagian para ahli waris berdasarkan hasil kesepakatan berbagi rata untuk semua ahli waris tanpa memandang anak laki-laki atau anak perempuan.

Pembagian warisan menurut LN tidak berpedoman kepada hukum adat apalagi hukum umum, mereka tetap berpedoman kepada hukum Islam sebagaimana yang berlaku di masyarakat. Namun pada

²⁵⁴ Data bersumber dari hasil wawancara terhadap LN di Kota Besi pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 19.20 WIB

dasarnya pembagian warisan dilakukan dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan.

Berkenaan dengan sistim penentuan ahli waris LN memaparkan bahwa tidak merinci keseluruhan ahli waris karena adanya anak kandung sudah pasti akan menghalangi ahli waris lain sehingga tidak ada ahli waris lain yang berhak atas harta warisan selain dirinya, saudari perempuan, dan ibunya. Adapun ayah dari almarhum bapaknya tidak mendapatkan bagian warisan karena statusnya terhalang oleh keberadaan anak kandung.

4. Latar Belakang Pengabaian Hak Waris Ayah dan Ibu di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 5 (Lima) keluarga ahli waris tentang latar belakang pengabaian hak warisan ayah dan ibu, maka didapat data sebagai berikut:

a. Wawancara dengan HR

Berdasarkan hasil wawancara dengan HR, bahwa dalam keluarga ini almarhumah isterinya masih ada meninggalkan ayah dan ibu yang masih hidup. Dalam hal pembagian warisan yang dilaksanakan dalam keluarganya dalam hal penentuan ahli waris ayah dan ibu tidak termasuk dalam daftar ahli waris.

Penentuan ahli waris dalam keluarganya dalam hal ini HR menuturkan:

Ayah dan ibu dari almarhum isteri saya memang termasuk sebagai ahli waris namun mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan karena saya masih mempunyai anak-anak. Mereka terhalang untuk mendapatkan bagian warisan karena harta warisan mutlak untuk anak-anak. Jadi walaupun mereka juga ahli waris namun dalam hal ini mereka bukan sebagai ahli waris karena almarhum isteri saya ada meninggalkan anak-anak. Seandainya almarhum isteri saya tidak mempunyai anak baru orang tua isteri saya ada hak atas harta warisan. Seandainya mereka mempunyai hak waris maka saya tidak tahu berapa bagian sebenarnya untuk mereka jika dapat bagian.²⁵⁵

Berdasarkan dari penuturan HR bahwa pelaksanaan pembagian warisan yang dilaksanakan dalam keluarganya bahwa tidak ada bagian warisan untuk ahli waris ayah dan ibu, hal ini HR mengungkapkan mereka terhalang oleh adanya anak kandung. Ayah dan ibu bisa saja mendapatkan warisan seandainya yang meninggal dunia tidak memiliki keturunan, sebagaimana dalam keluarganya bahwa ahli waris terdiri dari dia dan anak-anaknya maka hak waris bagi orang tua otomatis terhalang oleh mereka.

Ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian warisan karena dalam pemahaman HR mereka (ayah dan ibu) kedudukannya sebagai ahli waris berada di bawah anak-anaknya, dalam artian bahwa jika masih ada anak kandung maka hak kewarisan orang tua menjadi terhalang atau *terhijab*. Jika ahli waris anak kandung tidak ada barulah orang tua mendapatkan bagian dari harta warisan.

²⁵⁵ Data bersumber dari hasil wawancara terhadap HR di Kota Besi pada tanggal 06 Mei 2019 pukul 09.30 WIB

Pelaksanaan pembagian warisan yang dilaksanakan HR tidak melalui tahapan-tahapan perincian ahli waris karena hal itu teramat rumit sementara menurutnya sudah jelas adanya anak kandung maka akan menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan bagian harta warisan.

b. Wawancara dengan MA

Berdasarkan hasil wawancara dengan MA, bahwa almarhumah isterinya masih mempunyai orang tua, namun dalam proses pembagian warisan kedua orang tua ini tidak mendapatkan bagian harta warisan. Dalam hal ini MA menuturkan bahwa mereka (ayah dan ibu) tidak berhak atas harta warisan dan mereka terhalang karena almarhum isterinya masih ada meninggalkan anak keturunan. Apabila almarhum isterinya tidak mempunyai anak maka boleh jadi ayah dan ibu ada mempunyai hak bagian dari harta warisan.

Berdasarkan praktik pembagian warisan yang dilakukan MA, yang berhak dapat warisan hanya sebatas untuk anak-anak dan dirinya sendiri dan tidak ada ahli waris lain yang dapat bagian, sebagaimana penuturan MA:

Ayah dan ibu dari almarhumah isteri saya tidak mendapatkan bagian dari harta warisan karena isteri saya masih meninggalkan dua orang anak. Seandainya almarhumah tidak memiliki anak barulah orang tuanya mendapatkan bagian warisan. Seandainya mereka mendapatkan hak bagian warisan maka besarnya bagian untuk mereka pun bingung menentukan besarnya. Hal-hal yang sudah lalu yang biasa terjadi dalam masyarakat bahwa ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian jika almarhumah masih mempunyai anak-anak. Makanya dalam

pembagian warisan ini ayah dan ibu almarhumah isteri saya tidak mendapatkan bagian warisan.²⁵⁶

Berdasarkan penuturan MA seandainya ayah dan ibu berhak mendapatkan warisan maka ia tidak tahu berapa persen sebenarnya besar bagian untuk ayah dan ibu dimaksud. Kejadian seperti ini jarang terjadi, tidak pernah mendengar orang tua si mayyit menerima bagian warisan jika si mayyit mempunyai anak. Menurut MA, harta warisan mutlak hak anak-anak almarhumah saja, sementara ayah dan ibu terhalang karena adanya anak kandung. Begitulah sistim pembagian warisan yang berlaku dalam masyarakat saat ini yang apabila masih ada anak maka harta tersebut semua untuk anak-anak beserta suami atau isteri yang masih hidup.

Pelaksanaan pembagian warisan yang dilaksanakan MA menurutnya tidak melalui prosedur atau tahapan-tahapan penentuan ahli waris, karena pada kenyataannya sudah ada anak-anak keturunan maka otomatis ahli waris yang lain terhalang oleh adanya anak kandung.

c. Wawancara dengan ID

Berdasarkan hasil wawancara dengan ID, almarhum suaminya masih meninggalkan seorang ibu yang masih hidup. Dalam pelaksanaan pembagian warisan terkhusus untuk ibu kandung almarhum suaminya yang masih ada, ID menyatakan bahwa ibu

²⁵⁶ Data bersumber dari hasil wawancara terhadap MA di Kota Besi pada tanggal 06 Mei 2019 pukul 19.40 WIB

tersebut tidak mendapatkan bagian atas harta warisan karena suaminya masih ada ahli waris yang utama yakni anak-anaknya. Menurutny walaupun seandainya mereka tidak memiliki anak maka dia sebagai isterilah yang paling berhak atas harta warisan.

Pelaksanaan pembagian warisan terkhusus untuk ibu, ID menyatakan:

Suami saya mempunyai anak laki-laki dua orang maka harta warisan tentunya hak mutlak anak-anak saya, keluarga dari suami saya termasuk saudara-saudaranya tentu tidak berhak atas harta warisan begitu juga ibunya karena almarhum suami saya masih ada meninggalkan anak dan isteri. Jadi ibu dari almarhum suami saya tidak akan mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan suami. Seandainya kami tidak punya anakpun, ibu tidak mendapat bagian warisan juga karena masih ada saya sebagai isteri yang berhak atas harta warisan tersebut. Lain halnya jika tidak ada ahli waris lain maka ibulah yang menjadi ahli warisnya.²⁵⁷

Berdasarkan penuturan ID dalam proses pembagian warisan yang biasa terjadi di masyarakat tidak pernah ia mendengar bahwa orang tua mendapatkan bagian harta warisan peninggalan si mayit. Pembagian harta warisan dilakukan atau diberikan kepada anak-anak si mayit beserta isteri atau suami saja. Orang tua si mayit baru mempunyai hak atas harta warisan seandainya si mayit tidak ada meninggalkan anak dan isteri.

Hak kewarisan seorang ibu dalam pelaksanaan pembagian warisan di keluarga SD ditentukan ada atau tidak adanya anak keturunan beserta isteri dari almarhum. Jika masih ada anak kandung

²⁵⁷ Data bersumber dari hasil wawancara terhadap ID di Kota Besi pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 10.20 WIB

beserta isteri maka ibu menjadi terhalang untuk mendapatkan bagian harta warisan.

Proses pelaksanaan pembagian warisan pada keluarga ID tidak melalui tahapan-tahapan dalam menentukan para ahli waris. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa secara otomatis jika ada anak dan isteri maka merekalah para ahli waris, sementara ahli waris yang lain yang kemungkinan ada hak terhadap warisan menjadi terhalang karena adanya ahli waris lingkup keluarga suaminya yaitu anak dan isteri.

d. Wawancara dengan SD

Berdasarkan hasil wawancara dengan SD, almarhum isterinya meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan serta masih mempunyai ayah dan ibu yang masih hidup. Pelaksanaan pembagian warisan SD mengatakan bahwa tidak tahu tentang pembagian warisan secara Islam makanya dalam proses pembagian harta warisan dilaksanakan secara kekeluargaan saja sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Adapun hak kewarisan untuk ayah dan ibu dari almarhumah isterinya menurut penuturan SD mereka tidak mendapatkan bagian warisan. Menurut SD dalam keluarganya mereka ada mempunyai anak yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka dalam hal hak kewarisan tentunya harta warisan adalah hak anak-anaknya. Adapun ayah dan ibu dari almarhumah isterinya ia menuturkan mereka tidak mendapatkan bagian dari harta warisan

peninggalan almarhumah isterinya karena mereka terhalang anak-anak sebagai ahli waris.

Pelaksanaan pembagian warisan yang tidak memberikan hak waris untuk ayah dan ibu, hal ini terjadi sebagaimana penuturan SD:

Saya mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan maka harta warisan almarhumah isteri saya tentu haknya anak-anak saya. Orang tua isteri saya tidak mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan isteri saya karena kami ada mempunyai anak. Kebiasaan di masyarakat juga tidak pernah memberikan bagian kepada orang tua yang meninggal jika yang meninggal masih memiliki anak. Apabila ada anak keturunan maka yang berhak menerima warisan tentu anak-anak tersebut sementara ahli waris lain tidak berhak, baik itu kalangan saudara maupun orang tua.²⁵⁸

Menurut penuturan SD praktik yang terjadi dalam masyarakat proses pembagian warisan tidak melibatkan kepada orang tua. Seandainya memang ada hak orang tua terhadap warisan tentunya sudah lama diketahui bahwa ada bagian hak dari orang tua. Selama ini para orang tua tidak pernah menyampaikan atau meminta bagian haknya terhadap harta warisan. Berkenaan dengan ini ternyata dalam masyarakat apabila masih ada anak maka orang tua tidak berhak mendapatkan bagian harta warisan.

Proses pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan pada keluarga SD menurutnya tidak melalui tahapan-tahapan penentuan ahli waris karena sudah jelas adanya anak kandung akan menghalangi ahli waris lain dalam menerima bagian warisan. Jika tidak ada anak

²⁵⁸ Data bersumber dari hasil wawancara terhadap SD di Kota Besi pada tanggal 07 Juni 2019 pukul 12.35 WIB

kandung maka proses penentuan ahli waris mungkin bisa dilaksanakan karena adanya pilah memilah kepada para ahli waris yang paling berhak menerima warisan.

e. Wawancara dengan LN

Berdasarkan hasil wawancara dengan LN, almarhum ayahnya meninggalkan ahli waris isteri, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Almarhum ayahnya juga masih memiliki seorang ayah yang masih hidup, sementara ibu dari ayahnya sudah meninggal dunia. Pada pelaksanaan pembagian warisan LN mengatakan bahwa hanya sedikit tahu tentang pembagian warisan secara Islam, tetapi untuk penentuan siapa ahli waris keseluruhan ia tidak tahu, demikian pula cara pembagiannya dalam Islam juga tidak diketahui bagaimana tata caranya.

Berdasarkan penuturan LN, kebiasaan yang sering terjadi dalam masyarakat dalam pembagian warisan bahwa harta warisan dibagi untuk anak-anak dan isteri almarhum, maka hak warisan untuk ayah dari almarhum ayahnya tidak mendapatkan bagian warisan karena sudah habis dibagi untuk isteri dan anak-anak almarhum. Menurut penuturannya karena almarhum ayahnya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan maka harta warisan adalah hak anak-anaknya. Adapun kakeknya (ayah almarhum) ia menuturkan mereka bukan sebagai ahli waris dan tidak mendapat warisan karena masih ada anak-anak almarhum.

Penuturan LN terhadap hak kewarisan untuk kakeknya (ayah dari ayahnya) sebagai berikut:

Saya beranggapan bahwa harta warisan peninggalan almarhum ayah saya adalah hak mutlak dari anak-anak beserta isteri yang meninggal saja. Hal ini dapat dilihat sebagaimana pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat yang mana ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian harta warisan jika almarhum masih meninggalkan anak. Begitu pula dalam pembagian warisan di keluarga kami, harta warisan habis kami bagi untuk saya dan saudara beserta ibu. Sementara Kakek saya tidak mendapatkan bagian dari pembagian harta warisan karena beliau terhalang oleh kami.²⁵⁹

Pelaksanaan pembagian warisan yang berlaku dalam masyarakat menurut penuturan LN bahwa ayah dan ibu tidak pernah mendapatkan bagian dari harta warisan karena hal ini masih ada ahli waris yang lebih dekat dan lebih berhak terhadap harta warisan yakni anak-anak beserta suami atau isteri. Apabila para ahli waris keturunan almarhum tidak ada maka hak kewarisan baru menjadi hak mutlak para orang tua beserta saudara-saudara almarhum.

Menurut penuturan LN, karena para ahli waris yang ada sudah nyata dengan adanya anak kandung tentu ahli waris lain akan terhalang, jadi dalam proses pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan pada keluarganya tidak lagi melalui tahapan-tahapan dalam menentukan para ahli waris. Proses penentuan para ahli waris akan lebih rumit seandainya yang meninggal tidak mempunyai anak kandung, maka diperlukan proses penentuan ahli waris terlebih dahulu

²⁵⁹ Data bersumber dari hasil wawancara terhadap LN di Kota Besi pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 19.20 WIB

sebelum pelaksanaan pembagian warisan untuk menentukan siapa yang paling berhak dan siapa yang terhalang.

5. Pembagian Warisan Ayah dan Ibu di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Hukum *Farā'id*

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 5 (Lima) keluarga ahli waris tentang pelaksanaan pembagian warisan untuk ahli waris ayah dan ibu jika ditinjau dari hukum *Farā'id* didapat data sebagai berikut:

a. Wawancara dengan HR

Berdasarkan hasil wawancara dengan HR pada tanggal 06 Mei 2019, bahwa HR tidak mengetahui secara pasti tentang siapa-siapa yang termasuk sebagai ahli waris sehingga dalam pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukannya dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan sebagaimana yang biasa berlaku dalam masyarakat. Ahli waris yang berhak dan mendapat bagian dari harta warisan yaitu anak-anak dan Dia selaku suami. Sementara ahli waris ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian.

Pembagian warisan yang dilakukan di keluarga HR sebagaimana di atas terdapat pengabaian hak kewarisan beberapa orang ahli waris yaitu ahli waris ayah dan ibu dari almarhumah isterinya, mereka tidak mendapatkan bagian dikarenakan adanya anggapan bahwa jika ada ahli waris anak kandung maka orang tua

tidak mendapatkan bagian warisan. Dalam keluarga ini hak kewarisan hanya dimiliki anak-anak beserta HR selaku suami.

Proses pembagian warisan dalam keluarga HR jika ditinjau dari hukum *Farā'id*, maka apa yang terjadi terhadap proses pembagian warisan pada keluarga ini terdapatnya pengabaian hak kewarisan ahli waris ayah dan ibu adalah bertentangan dengan hukum *Farā'id*. Menurut ketentuan dalam ilmu *Farā'id* ayah dan ibu adalah merupakan ahli waris bahkan mereka termasuk ahli waris utama yang dalam hal ini mengandung pengertian bahwa ayah dan ibu mempunyai hak bagian warisan bersama anak-anak keturunan si mayit beserta suami/isteri tanpa ada ahli waris yang menghalangi mereka untuk mendapatkan bagian dari harta warisan.

Pelaksanaan pembagian warisan sebagaimana pada keluarga HR menurut tinjauan hukum *Farā'id* adalah kesalahan dalam menentukan siapa-siapa ahli waris yang sebenarnya berhak atas harta warisan dan kesalahan dalam hal penentuan *hijab* (dinding-mendinding/halang-menghalangi).

b. Wawancara dengan MA

Berdasarkan hasil wawancara dengan MA pada tanggal 06 Mei 2019, MA mengetahui sedikit tentang hukum waris Islam karena pernah belajar namun sudah lupa terutama tentang siapa-siapa saja yang disebut sebagai ahli waris dan siapa-siapa yang lebih berhak.

Menurut pernyataannya MA membagi warisan merujuk pada ketentuan aturan Islam, namun pada pelaksanaan pembagian warisan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang pernah terjadi dalam masyarakat yaitu pembagian dengan cara kekeluargaan atau dalam istilah pembagian berimbang kepada semua ahli waris. Dengan demikian yang berhak sebagai ahli waris yaitu dia dan anak-anaknya, sementara ahli waris lainnya tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh mereka.

Hak kewarisan bagi ayah dan ibu almarhum isterinya MA mengatakan bahwa mereka tidak berhak atas harta warisan dan mereka terhalang karena almarhum isterinya masih ada meninggalkan anak keturunan. Apabila almarhum isterinya tidak mempunyai anak maka boleh jadi ayah dan ibu ada mempunyai hak bagian dari harta warisan.

Pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan MA sebagaimana di atas tidak sesuai dengan hukum *Farā'id* karena adanya ahli waris yang sebenarnya berhak atas harta warisan namun pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan. Ahli waris yang diabaikan dalam hal ini adalah ayah dan ibu si mayyit yang mana dalam hukum Islam yang tertuang dalam ilmu *Farā'id* bahwa kedua orang tua ini adalah merupakan ahli waris utama yang berhak atas harta warisan tanpa ada ahli waris lain yang bisa menghalangi mereka untuk menerima bagian harta warisan. Ayah dan

ibu sebenarnya berhak menerima warisan bersama anak-anak beserta suami almarhumah.

Pelaksanaan pembagian warisan sebagaimana pada keluarga MA menurut tinjauan hukum *Farā'id* adalah kesalahan dalam menentukan siapa-siapa ahli waris yang sebenarnya berhak atas harta warisan dan kesalahan dalam hal penentuan *hijab* (dinding-mendinding/halang-menghalangi).

c. Wawancara dengan ID

Berdasarkan hasil wawancara dengan ID pada tanggal 11 Mei 2019, ID tidak tahu sama sekali tentang ilmu waris Islam dan hanya mengetahui pembagian warisan sebagaimana kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dalam membagi warisan.

Pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan ID berpedoman kepada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Semua harta warisan dibagi untuk anak-anak dan dirinya dan tidak ada ahli waris lain yang mendapatkan bagian selain mereka. Terkait ibu kandung almarhum suaminya yang masih ada, ID menyatakan bahwa ibu tidak berhak atas harta warisan karena suaminya masih ada ahli waris yang utama yakni anak-anaknya. Orang tua baru mempunyai hak atas harta warisan seandainya si mayit tidak ada meninggalkan anak dan isteri.

Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan keluarga ID sebagaimana di atas tidak sesuai dengan ilmu *Farā'id*. Dalam

pembagian warisan ini terdapat ahli waris yang diabaikan haknya atau tidak mendapatkan bagian harta warisan yakni ahli waris ibu (orang tua si mayit). Dalam Ilmu *Farā'id* ibu dari si mayit mempunyai hak terhadap harta warisan karena ibu adalah merupakan salah satu ahli waris utama yang berhak mendapatkan warisan dan karenanya tidak ada ahli waris lain yang mampu menghalangnya untuk menerima bagian harta warisan. Dengan demikian ibu dari almarhum suami ID sebenarnya berhak atas harta warisan beserta ia dan anak kandungnya.

Pelaksanaan pembagian warisan sebagaimana pada keluarga ID menurut tinjauan hukum *Farā'id* adalah kesalahan dalam menentukan siapa-siapa ahli waris yang sebenarnya berhak atas harta warisan dan kesalahan dalam hal penentuan *hijab* (dinding-mendinding/halang-menghalangi).

d. Wawancara dengan SD

Berdasarkan hasil wawancara dengan SD pada tanggal 07 Juni 2019, SD mengatakan bahwa tidak tahu tentang pembagian warisan secara Islam makanya dalam proses pembagian harta warisan dilaksanakan secara kekeluargaan saja sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan untuk anak laki-laki maupun anak perempuannya sama saja tidak ada perbedaan dalam bagian.

Pelaksanaan pembagian warisan berpedoman pada kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dan dalam hal pembagian harta dibagi menurut kesepakatan keluarga saja, dalam hal ini harta peninggalan

isterinya dibagikan kepada anak-anaknya dengan bagi rata tanpa perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Hak kewarisan untuk ayah dan ibu dari almarhumah isterinya menurut penuturan SD mereka tidak mendapatkan bagian warisan karena dalam keluarganya mereka ada mempunyai anak yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka dalam hal hak kewarisan tentunya harta warisan adalah hak anak-anaknya. Adapun ayah dan ibu dari almarhumah isterinya ia menuturkan mereka tidak mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan almarhumah isterinya karena mereka terhalang anak-anak sebagai ahli waris.

Berdasarkan pandangan hukum *Farā'id* terhadap pembagian harta warisan sebagaimana yang dilakukan keluarga SD terdapat suatu praktek yang tidak sesuai dengan ilmu *Farā'id*. Dalam praktik pembagian warisan yang terjadi di keluarga SD terdapat ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta warisan yaitu ahli waris ayah dan ibu. Pada kenyataannya harta warisan habis dibagi dikalangan anak-anak si mayyit saja beserta SD. Praktik kewarisan seperti ini tentu tidak sesuai dengan ilmu *Farā'id*, yang mana dalam ketentuan ilmu *Farā'id* ini status ayah dan ibu si mayit adalah termasuk sebagai ahli waris dan sudah barang tentu mempunyai hak bagian atas harta warisan. Ayah dan ibu adalah termasuk ahli waris utama yang mengandung arti bahwa mereka (ayah dan ibu) mempunyai hak untuk mendapatkan bagian harta warisan si mayit. Hak kewarisan para ahli

waris utama ini tidak terhalang oleh keberadaan ahli waris lain bahkan para ahli waris utama inilah yang menutup atau menghalangi para ahli waris lain dalam menerima harta warisan. Ayah dan ibu berhak menerima harta warisan meski bersama anak-anak beserta suami atau isteri.

Pelaksanaan pembagian warisan sebagaimana pada keluarga SD menurut tinjauan hukum *Farā'iq* adalah kesalahan dalam menentukan siapa-siapa ahli waris yang sebenarnya berhak atas harta warisan dan kesalahan dalam hal penentuan *hijab* (dinding-mendinding/halang-menghalangi).

e. Wawancara dengan LN

Berdasarkan hasil wawancara dengan LN pada tanggal 15 Juni 2019, LN mengatakan bahwa hanya sedikit tahu tentang pembagian warisan secara Islam terutama hanya pada pengetahuan bahwa dalam Islam laki-laki mendapat bagian dua berbanding satu dengan anak perempuan. Adapun untuk pengetahuan siapa ahli waris keseluruhan ia tidak tahu, demikian pula cara pembagiannya dalam Islam juga tidak diketahui bagaimana tata caranya. Harta warisan peninggalan ayahnya itu dibagi menurut kesepakatan keluarga saja sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat.

Pelaksanaan pembagian warisan yang dilaksanakan keluarga LN hanya sebatas ahli waris anak-anak beserta istri almarhum sementara hak warisan untuk ayah dari almarhum tidak mendapatkan

bagian warisan karena sudah habis dibagi untuk isteri dan anak-anak almarhum. Hal ini terjadi menurut penuturan LN karena almarhum ayahnya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan maka harta warisan adalah hak anak-anaknya. Adapun kakeknya (ayah almarhum) ia menuturkan mereka bukan sebagai ahli waris dan tidak mendapat warisan karena masih ada anak-anak almarhum.

Pembagian warisan pada keluarga LN sebagaimana di atas, menurut pandangan hukum *Farā'id* tentunya bertentangan. Hal ini dikarenakan pada proses pelaksanaan pembagian warisan tersebut ada ahli waris yang terabaikan haknya yaitu ayah dari almarhum. Dalam ketentuan ilmu *Farā'id* ayah merupakan salah satu ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan meski bersama ahli waris anak keturunan si mayit. Ayah termasuk salah satu ahli waris utama yang mengandung pengertian bahwa ahli waris utama ini adalah berhak terhadap harta warisan dan tidak ada ahli waris lain yang dapat menghalanginya untuk menerima bagian warisan. Dengan demikian sebenarnya ahli waris ayah berhak mendapatkan bagian harta warisan bersama dengan anak-anak keturunan si mayit beserta isteri si mayit.

Pelaksanaan pembagian warisan sebagaimana pada keluarga LN menurut tinjauan hukum *Farā'id* adalah kesalahan dalam menentukan siapa-siapa ahli waris yang sebenarnya berhak atas harta

warisan dan kesalahan dalam hal penentuan *hijab* (dinding-mendinding/halang-menghalangi).



BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Umum di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur

Pelaksanaan pembagian warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur dari hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa fakta dilapangan menggambarkan pelaksanaan pembagian warisan dengan sistim kekeluargaan. Sistim kekeluargaan dimaksud adalah suatu proses pembagian warisan dengan cara damai sesama ahli waris dengan mengikuti atau berpedoman kepada kebiasaan sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat inilah yang disebut dengan adat sebagaimana pengertian adat yang tertuang dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* yang berarti kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.²⁶⁰

Sebagaimana diketahui di Indonesia ada 3 (tiga) sistim hukum yang ada memuat peraturan dalam hal pembagian warisan yakni *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku bagi warga Negara Indonesia yang menundukkan diri pada hukum BW,²⁶¹ hukum waris Adat yang berlaku bagi bagi warga negara Indonesia asli yang masih melaksanakan kewarisan berdasarkan sifat

²⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid I*, Jakarta: PT Ichtiar baru Van Houve, 1996. h. 21

²⁶¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.3

kekeluargaan. Hukum waris Islam yang berlaku bagi warga Negara Indonesia asli yang beragama Islam.²⁶²

Pelaksanaan pembagian warisan secara umum yang terjadi di Kota Besi pada 5 (lima) keluarga ahli waris yakni HR, MA, ID, SD, dan LN ternyata pelaksanaan pembagian warisan dalam keluarga ini semua dilakukan secara kekeluargaan dengan cara berdamai sesama ahli waris. Pembagian secara kekeluargaan hal ini dilakukan karena mengikuti kebiasaan pelaksanaan pembagian warisan yang dipraktikkan di masyarakat Kota Besi secara turun temurun.

Masyarakat Kota Besi mempunyai adat tersendiri yakni adat Dayak. Adat Dayak termasuk salah satu dari 19 lingkungan hukum adat Indonesia sebagaimana menurut Van Vollenhoven, yaitu Kalimantan (Tanah Dayak).²⁶³ Namun dalam hal pembagian warisan masyarakat di Kota Besi terkhusus yang beragama Islam berpedoman pada Hukum Waris Islam tetapi tidak serta merta meninggalkan adat kebiasaan pembagian warisan yang berlaku di masyarakat yakni pembagian secara damai dan hal ini sesuai dengan adat berdamai (*adat badamai*).

Berdasarkan hukum adat, apabila si pewaris meninggalkan anak maka kepemilikan semua harta warisan adalah mutlak hak dari anak si pewaris. Hal ini karena dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting, oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga yang

²⁶² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h.27

²⁶³ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.304

lain tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan memiliki anak.²⁶⁴ Demikian pula yang terjadi di Kota Besi dalam praktik pelaksanaan pembagian warisan, ayah dan ibu memang tidak mendapatkan bagian warisan karena terhalang oleh keberadaan anak keturunan si mayit.

Perselisihan dalam pembagian warisan kadang sering muncul, namun dalam masyarakat adat selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan istilah berdamai. Berdamai inilah yang menjadi patokan masyarakat Kota Besi dalam proses pembagian harta warisan dalam keluarga. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa adanya kesetaraan atau keseimbangan bagian hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan yang dalam istilah masyarakat “bagi rata”.

Pelaksanaan berdamai yang dilakukan masyarakat Kota Besi sebenarnya ada kemiripan dengan adat masyarakat suku Banjar yaitu Adat Badamai. Adat badamai adalah salah satu bentuk adat yang berlaku di Kalimantan pada suku Banjar yang secara *etimologi* merupakan kata majemuk dari kata *adat* dan *badamai*.²⁶⁵ Alfani Daud dalam bukunya “*Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*” menyatakan bahwa bila dari perkawinan itu ada anak, maka si janda/duda yang masih hidup bersama anak atau anak-anaknya menguasai seluruh harta.²⁶⁶

Pembagian warisan secara kekeluargaan dipandang sebagai bentuk pelaksanaan pembagian warisan secara adil, hal ini sesuai dengan apa yang

²⁶⁴ Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.23

²⁶⁵ Ahmadi Hasan, *Disertasi: Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar*, Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2007. h. 115

²⁶⁶ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, h. 206

diungkapkan Quraisy Syihab bahwa makna keadilan salah satunya mengandung arti seimbang.²⁶⁷ Keseimbangan hak kewarisan inilah yang tercermin pada pelaksanaan pembagian warisan kelima keluarga ahli waris (HR, MA, ID, SD, dan LN).

Praktik pelaksanaan pembagian warisan dalam ilmu *Farā'id* berbeda dengan hukum adat. Ilmu *Farā'id* memberikan hak kewarisan kepada ayah dan ibu meski bersama anak keturunan si mayit. Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 2 dinyatakan: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.²⁶⁸

Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan yang dilaksanakan di keluarga HR, MA, ID, SD, dan LN dalam hukum Islam tidaklah bertentangan asalkan dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada ketentuan ilmu *Farā'id*. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.²⁶⁹

Hukum waris adat memang tidak memberikan hak waris bagi ayah dan ibu jika ahli waris anak dan sumi/isteri masih ada. Demikian pula dalam *Burgerlijk Wetboek* ahli waris ayah dan ibu tidak mendapatkan warisan jika masih ada anak-anak beserta suami/isteri. Hal ini berbeda dengan hukum

²⁶⁷ <https://www.anekamakalah.com/keadilan-dalam-alquran.html>

²⁶⁸ Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1999

²⁶⁹ Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1999

Islam (ilmu *Farā'id*) yang memuat ayah dan ibu ke dalam ahli waris utama yang berhak atas warisan bersama anak-anak, suami atau isteri.

Pengabaian hak kewarisan bagi ayah dan ibu seperti di atas, tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena dalam hukum waris Islam (ilmu *Farā'id*) ayah dan ibu berhak atas harta warisan. Kitab-Kitab Fiqh Waris menjelaskan bahwa jika ahli waris laki-laki dan perempuan bertemu seluruhnya maka yang berhak mendapat bagian dari harta waris hanya lima orang, yaitu: anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu dan suami/isteri.²⁷⁰ Ahli waris anak, ayah, ibu, suami, dan isteri adalah ahli waris yang tidak putus karena keadaan.²⁷¹

Pembagian warisan bisa sesuai dengan ilmu *Farā'id* jika dalam pelaksanaannya tidak ada ahli waris yang diabaikan haknya. Ahli waris ayah dan ibu bisa menyerahkan atau melepas haknya sebagai ahli waris jika memandang hal itu lebih berkeadilan terhadap ahli waris lainnya terutama kepada para cucunya. Hukum kewarisan merupakan hukum privat maka seseorang dapat mengambil keputusan untuk melepas hak kewarisannya jika menimbulkan rasa adil. John Rawls dalam *theory of justice* memuat tiga poin yang salah satunya memuat prinsip kebebasan yang sama, antara lain kebebasan personal dan kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.²⁷² Hak kewarisan merupakan kebebasan personal seseorang, ia boleh melepas haknya untuk menimbulkan rasa keadilan kepada ahli waris lainnya.

²⁷⁰ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h.47

²⁷¹ Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009. h. 123

²⁷² <https://www.kompasiana.com/michaelkabatana/teori-keadilan-john-rawls-dan-tanggapan-atas-teorinya>

B. Latar Belakang Pengabaian Hak Waris Ayah dan Ibu di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan ilmu *Fara'id* ada 5 (lima) tahapan yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan pembagian warisan, yaitu:

1. Tahap penentuan ahli waris;
2. Tahap penentuan *hijab*/dinding mendinding;
3. Tahap penentuan *aṣabah*;
4. Tahap menentukan porsi bagian masing-masing;
5. Tahap mengerjakan pembagian warisan.²⁷³

Pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan 5 (lima) keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN ternyata dalam praktiknya tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang tertuang dalam ilmu *faraidh*, hal ini dikarenakan dalam pembagian warisan dilaksanakan secara kekeluargaan saja dengan melalui kesepakatan sehingga tidak terdeteksi ada ahli waris yang terabaikan haknya. Apalagi ada anggapan bahwa hak kewarisan mutlak milik anak-anak beserta suami atau isteri saja jika para ahli waris ini ada bersama para ahli waris lain.

Pelaksanaan kelima tahapan dalam proses pembagian warisan sebagaimana ilmu *Farā'id* di atas, maka hal yang terpenting yang harus diperhatikan dan utama yang harus dilakukan adalah penentuan tahap I dan tahap II. Dalam tahapan inilah yang menentukan status seseorang sebagai ahli waris atau bukan sebagai ahli waris karena dalam ilmu *Farā'id* tidak semua kerabat atau keluarga sebagai ahli waris. Selain itu, dalam tahapan ini juga

²⁷³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 77

menentukan siapa ahli waris yang berhak menerima warisan dan siapa ahli waris yang tidak berhak menerima warisan atau *terhijab*.

Pelaksanaan tahap I yaitu tahap penentuan ahli waris, tahapan ini untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menyandang status sebagai ahli waris. Tahapan ini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penetapan ahli waris karena bisa saja terjadi seseorang dinyatakan sebagai ahli waris padahal semestinya dia bukan ahli waris, atau sebaliknya seseorang ditentukan bukan sebagai ahli waris padahal semestinya dia berhak sebagai ahli waris.

Pelaksanaan tahap II yaitu masalah *hijab* atau dinding mending. Tahapan ini penting dilakukan untuk menentukan siapa diantara para ahli waris yang telah ditetapkan yang paling berhak menerima harta warisan, karena pada tahapan ini berlaku ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih dekat atau lebih kuat menghalangi (*menghijab*) ahli waris yang lebih jauh atau lebih lemah hubungan kekerabatannya dengan si mayit.

Fakta yang terjadi dalam proses pembagian warisan di Kota Besi yang berlaku pada 5 (lima) keluarga ahli waris (HR, MA, ID, SD, dan LN) bahwa dalam pelaksanaan praktik pembagian warisan terdapat kesalahan pada tahap I yaitu kesalahan dalam hal penentuan ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan. Ada beberapa ahli waris yang terabaikan haknya dalam pembagian harta warisan. Ahli waris yang terabaikan haknya tersebut adalah ayah dan ibu dari si mayit. Mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan dalam proses pembagian harta warisan yang dilaksanakan dalam keluarga.

Ilmu *Farā'id* menetapkan ahli waris seluruhnya berjumlah 25 orang, ahli waris laki-laki berjumlah 15 orang dan ahli waris perempuan berjumlah 10 orang. Keseluruhan ahli waris ini tidak serta merta ditetapkan sebagai ahli waris karena dalam ilmu *Farā'id* ada istilah *hijab* atau *hajbu*. *Hajbu* menurut bahasa berarti *man'u*: menghalangi, mencegah. Maksudnya adalah terhalangnya seseorang tertentu dari semua atau sebagian warisannya karena adanya orang lain.²⁷⁴

Ilmu *fara'id* meletakkan masalah *hijab* pada tahap II dari rangkaian tahapan pelaksanaan pembagian warisan yang harus dilalui. Tahapan ini adalah untuk mengetahui siapa-siapa saja diantara para ahli waris yang berhak mendapat warisan, sebab tidak semua ahli waris mempunyai hak, sebab boleh jadi ia *terhijab*/terdinding atau terhalang oleh ahli waris yang lain.

Ahmad Sarwat menggolongkan ahli waris kepada dua, yakni ahli waris *internal* dan ahli waris *eksternal*. Ahli waris *internal* adalah ahli waris yang sudah dipastikan akan mendapatkan harta warisan dari almarhum, tidak ada penghalang atau tabir yang menutupi.²⁷⁵ Sedangkan ahli waris *eksternal* adalah orang yang termasuk dalam daftar ahli waris, namun ada kemungkinan mendapat warisan apabila tidak ada *hijab* yang menutup antara dirinya dengan *muwaris* dan ada kemungkinan tidak mendapat warisan, karena antara dirinya dan *muwaris* ada *hijab* yang menghalangi.²⁷⁶

²⁷⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 14*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994. h. 264

²⁷⁵ Ahmad Sarwat, *Pelatihan Dasar Faraidh Cet II*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017, h. 61

²⁷⁶ Ibid. h. 179

Ketentuan ilmu *Farā'id* seluruh ahli waris apabila kesemuanya ahli waris ini ada dan berkumpul maka yang berhak menerima harta warisan hanya 5 (lima) orang yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau isteri.²⁷⁷ Dari sini dapatlah diambil kesimpulan bahwa dalam ilmu *Farā'id* ayah dan ibu adalah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta warisan karena mereka termasuk golongan ahli waris dan tidak *terhijab* atau *terdinding* oleh ahli waris lain. Dengan demikian ayah dan ibu si mayit di Kota Besi sebenarnya termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian dari pembagian harta warisan karena mereka termasuk golongan ahli waris utama yaitu golongan ahli waris yang berhak atas warisan dan tidak ada ahli waris lain yang *menghijabnya* sebagaimana yang diterangkan Aulia Muthiah bahwa ayah dan ibu pasti mendapatkan warisan dan tidak terhalang oleh ahli waris yang lain.²⁷⁸

Ayah dan ibu pada keluarga HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi sebenarnya termasuk sebagai ahli waris karena mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si mayit yang dalam ilmu *Farā'id* disebut hubungan *nasab*. Hubungan *nasab* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya hak kewarisan, yang dalam ilmu *Farā'id* ada 2 kategori yang bisa menyebabkan seseorang punya hak terhadap harta warisan, yaitu *sabab* dan *nasab*. *Sabab* mencakup perkawinan dan perwalian (*wala'*) sedangkan *nasab*

²⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 47

²⁷⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Waris islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h.50

ialah hubungan kekerabatan.²⁷⁹ Kekerabatan ialah hubungan *nasab* antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi.²⁸⁰ Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran.²⁸¹ Dalam hal ini ayah dan ibu pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di kota Besi adalah termasuk golongan *nasab* yaitu mempunyai hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua sehingga mereka dipastikan termasuk golongan ahli waris yang mempunyai hak terhadap harta warisan dikarenakan yang meninggal dunia adalah anak kandung mereka.

Selain ada faktor yang menyebabkan munculnya hak kewarisan, ada juga faktor penghalang atau gugurnya hak kewarisan seseorang. Penghalang warisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai.²⁸² Pertama perbedaan agama, perbedaan agama yang dimaksudkan sebagai penghalang warisan adalah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.²⁸³ Kedua pembunuhan yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada *al-muwarits* yang mengharuskan dijatuhinya *qiṣaṣ*, *diyat*

²⁷⁹ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab Cet. III*. Jakarta: Lentera, 2005. h.540

²⁸⁰ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar. *Terjemah Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004. h. 33

²⁸¹ H. Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. h. 111

²⁸² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h. 83

²⁸³ Ibid. h. 95

atau *kaffarah*.²⁸⁴ Ketiga perbudakan, perbudakan yang menghalangi pewarisan adalah status orang sebagai hamba sahaya.²⁸⁵

Berdasarkan dari ketiga penghalang warisan tersebut di atas, ayah dan ibu keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi tidak termasuk kategori tersebut yang menyebabkan mereka terhalang sebagai ahli waris. Antara ayah dan ibu dengan anak sama beragama Islam, ayah dan ibu bukan termasuk kategori pelaku pembunuhan terhadap *muwaris*, ayah dan ibu bukan seorang hamba sahaya (budak). Dengan demikian ayah dan ibu pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi tidak memiliki kriteria sebagai orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa ahli waris ayah dan ibu keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi jika dilihat dari syarat-syarat seseorang bisa dikatakan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan ditinjau dari ilmu *Farā'id*, mereka memenuhi semua kriteria tersebut. Adapun kriteria tersebut, antara lain:

1. Termasuk daftar ahli waris, ayah dan ibu adalah termasuk daftar ahli waris yang berjumlah 25 orang.
2. Tidak ter*hijab*/terdinding, ayah dan ibu merupakan ahli waris utama yang pasti mendapatkan warisan tanpa ada ahli waris lain yang meng*hijab* mereka. Ayah dan ibu bisa meng*hijab* atau menghalangi ahli waris lain namun mereka tidak bisa di*hijab* oleh ahli waris manapun.

²⁸⁴ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 40

²⁸⁵ Ibid. h. 40

3. Memiliki sebab-sebab kewarisan, ayah dan ibu mempunyai hubungan *nasab* dengan *muwaris* yaitu hubungan antara anak dan orang tua.
4. Tidak memiliki penghalang warisan, ayah dan ibu sama-sama beragama Islam dengan *muwaris*, ayah dan ibu bukan pelaku pembunuhan terhadap *muwaris*, dan ayah dan ibu bukan seorang *hamba sahaya* (budak).

Sangat jelas hak kewarisan bagi ayah dan ibu pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN jika ditinjau dari ilmu *Farā'id*, mereka mempunyai hak waris bersama suami/isteri dan anak-anak. Berbeda jika ditinjau dari hukum *Burgerlijk Wetboek* dan hukum Adat. Pelaksanaan praktik pembagian warisan sebagaimana yang terjadi di Kota Besi yang dalam pelaksanaannya ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian warisan, maka menurut ketentuan pada kedua hukum ini (*Burgerlijk Wetboek* dan Adat) hal demikian bukanlah suatu pengabaikan hak kewarisan ayah dan ibu.

Menurut Ishak dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* ada 4 golongan ahli waris dalam *Burgerlijk Wetboek*, yang mana orang tua berada pada Golongan kedua.²⁸⁶ Sebagaimana dijelaskan Soetojo dalam bukunya *Hukum Waris Kodifikasi* menyatakan jika tidak ada janda atau tidak ada keturunan dari pewaris yang akan mewarisi dan dapat mewarisi, maka warisan itu akan jatuh pada ahli waris golongan kedua, yaitu orang tua dan saudara-saudara sekandung dan/atau anak-anak, keturunan dari saudara-saudara sekandung.²⁸⁷

²⁸⁶ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 186

²⁸⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, h. 2

Berdasarkan penjelasan menurut hukum *Burgerlijk Wetboek* di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pembagian warisan terhadap keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi yang mana ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian warisan adalah sesuai dengan sistem hukum ini. Ahli waris ayah dan ibu termasuk ke dalam ahli waris golongan II yang berarti mereka terhalang mendapatkan warisan karena masih adanya ahli waris golongan I yaitu ahli waris suami atau isteri beserta anak-anaknya.

Ditinjau dari hukum Adat pelaksanaan pembagian warisan yang berlaku pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi yang dalam pelaksanaannya mengabaikan hak kewarisan ayah dan ibu, maka dalam hukum ini hal demikian bukanlah suatu pengabaian hak kewarisan seseorang karena dalam hukum adat keturunan dari orang yang meninggal merupakan ahli waris terpenting. Oemar Salim menyatakan keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.²⁸⁸ Demikian pula Utomo Laksanto menyatakan bahwa apabila si pewaris meninggalkan anak maka kepemilikan semua harta warisan adalah mutlak hak dari anak si pewaris.²⁸⁹

Pelaksanaan kewarisan pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi dalam hal ini ada kemiripan dengan apa yang terjadi pada masyarakat Adat Banjar sebagaimana yang dituangkan Alfani Daud

²⁸⁸ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia cet.II*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 24

²⁸⁹ Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.23

dalam bukunya *Islam dan Masyarakat Banjar*, bahwa bila dari perkawinan itu ada anak maka si janda/duda yang masih hidup bersama anak atau anak-anaknya menguasai seluruh harta.²⁹⁰

Berdasarkan penjelasan menurut hukum Adat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pembagian warisan pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi yang mana ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian warisan adalah sesuai dengan sistim hukum ini. Menurut hukum ini derajat ayah dan ibu di bawah anak-anak keturunan pewaris, dengan demikian ayah dan ibu tidak mendapatkan warisan jika pewaris ada mempunyai anak.

Pandangan terhadap hak kewarisan bagi ayah dan ibu dalam ketiga sistim hukum di Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*, Hukum Adat dan Hukum Islam) memang terdapat perbedaan perlakuan terhadap kedua ahli waris ini (ayah dan ibu). Dari ketiga sistim hukum warisan tersebut tentunya mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan untuk ayah dan ibu, namun hukumnya para keluarga ahli warislah yang berlaku. Apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam.²⁹¹

Sebagaimana keadaan masyarakat Kota Besi yang mayoritas beragama Islam, tentunya dalam hal praktik pelaksanaan pembagian warisan berpedoman kepada Hukum Islam. Tidak menutup kemungkinan

²⁹⁰ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, h. 206

²⁹¹ Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979, h. 85

pemberlakuan hukum Adat dalam proses pembagian warisan karena hukum waris Adat sebenarnya dapat juga berlaku bagi masyarakat adat muslim. Namun menurut Sayuti Thalib hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan Hukum Islam.²⁹²

Faktor yang menyebabkan terabainya hak kewarisan ayah dan ibu pada proses pembagian warisan pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi, yaitu faktor adat kebiasaan yang berlaku saat itu yang mana ketika ada keluarga yang meninggal dunia yang masih mempunyai anak keturunan maka harta warisan hak mutlak dari anak-anak beserta suami atau isteri saja. Selain itu, adanya kesalahan para ahli waris dalam memahami hukum waris Islam (ilmu *Farā'id*) terutama dalam masalah *hijab/mahjub* yang mana pada kenyataannya ayah dan ibu dianggap terhalang oleh keberadaan ahli waris anak keturunan sehingga ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian warisan.

Sebenarnya dalam ilmu *Farā'id* bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan (*furudul muqaddarah*) sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Demikian pula bagian untuk ahli waris utama (Suami/isteri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu). Hak kewarisan ayah dan ibu lebih khusus diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam* sebagaimana pada pasal 177 dan pasal 178, yaitu:

Pasal 177 : Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

²⁹² Sayuti Thalib, *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1980, h.15

Pasal 178 : (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.²⁹³

Jelasnya hak bagian ahli waris ayah dan ibu dalam ilmu *Farā'id* namun karena pelaksanaan pembagian warisan di Kota Besi tidak melauhi tahapan sebagaimana ketentuan ilmu *Farā'id* sehingga terdapat kesalahan dalam penetapan ahli waris. Tahapan terpenting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah tahap I yaitu tahap penentuan ahli waris dan tahap II penentuan *hijab/mahjub*. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan siapa ahli waris karena bisa jadi seseorang sebenarnya ahli waris namun karena kesalahan sehingga tidak termuat dalam daftar ahli waris. Pada kedua tahapan inilah terdapat kekeliruan yang terjadi pada pelaksanaan pembagian warisan pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi yang mengakibatkan terabainya hak waris bagi ayah dan ibu.

C. Pelaksanaan Pembagian Warisan Ayah dan Ibu di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Hukum *Farā'id*

Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas sumber hukumnya yaitu dari dalil-dalil atau *naş-naş* yang *şarih*, meski dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak

²⁹³ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1999

ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya²⁹⁴

Setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu itu tidak wajib.²⁹⁵

Salah satu aturan dalam hukum Islam yang mengatur tentang pelaksanaan pembagian warisan adalah ilmu *Farā'id*. Aturan hukum ini sangat jelas tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, dengan demikian dalam pelaksanaan pembagian warisan umat Islam harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau kaidah yang sudah diatur dalam hukum *Farā'id*. Para ahli hukum Islam memandang wajibnya umat Islam melaksanakan hukum ini, sebagaimana menurut Aminullah yang dikutip Sukris Sarmadi dalam bukunya "*Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*" bahwa hukum waris Islam dianggap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, ia dianggap sebagai *compulsory law* (*Dwight Recht*) yakni hukum yang berlaku secara mutlak dan baku.²⁹⁶

Ketentuan pelaksanaan pembagian warisan dalam Al-Qur'an untuk para ahli waris utama termuat dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Dalam ayat tersebut dengan jelas disyariatkan pelaksanaan pembagian warisan secara hukum Islam, bahkan secara detail dipaparkan siapa-siapa yang dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Selain itu ditetapkan pula dengan rinci bagian hak waris masing-masing para ahli waris

²⁹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971, h. 34

²⁹⁵ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 h.3

²⁹⁶ Sukris Sarmadi. *Ahli Waris Pengganti dalam KHI cet II*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012. h.9

terhadap harta warisan yang dalam istilah ilmu *Farā'id* dikenal dengan *furudul muqaddarah* yang terdiri dari enam macam bagian, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3.²⁹⁷

Ayat selanjutnya lebih tegas lagi dijelaskan keutamaan pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris Islam, ketentuan pelaksanaan warisan sesuai *syari'at* adalah merupakan ketentuan (*hudud*) dari Allah yang jika dilaksanakan secara aturan Islam diberi ganjaran Surga sebagaimana terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ²⁹⁸

Terjemahnya: “Itulah batasan-batasan (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”.²⁹⁹

Yahya Abdurrahman menjelaskan mengapa pembagian warisan mesti harus sesuai dengan *syari'at* Islam, sebagai berikut:

“Pembagian waris hakikatnya adalah menentukan bagian setiap ahli waris atas harta waris sesuai ketentuan *syari'ah*. Dengan begitu, secara *syar'i* setiap ahli waris hanya berhak atas bagian yang menjadi haknya sesuai bagian yang ditentukan oleh hukum-hukum waris. Jika pembagian harta waris dilakukan sesuai hukum-hukum waris, tentu setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai ketentuan hukum-hukum waris. Jika dibagi tidak sesuai ketentuan hukum-hukum waris maka ahli waris akan mendapatkan bagian yang bisa jadi tidak sesuai dengan bagiannya sesuai ketentuan *syari'ah*. Jika ahli waris itu mendapat harta lebih banyak dari bagiannya sesuai *syari'ah*, maka

²⁹⁷ Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007. h.

²⁹⁸ An-Nisa [4]:13.

²⁹⁹ Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2005,

yang menjadi haknya hanyalah bagian yang sesuai *syari'ah*, sedangkan kelebihanannya maka itu bukan menjadi haknya, tetapi hak ahli waris lainnya. Jika tetap dia kuasai maka penguasaannya atas kelebihan dari apa yang menjadi bagiannya itu adalah penguasaan yang tidak sah atau penguasaan yang haram, dan kepemilikannya atas kelebihan dari bagiannya itu juga merupakan kepemilikan yang haram, dan konsekuensinya dia juga haram melakukan *taṣarruf* atasnya. Pada saat yang sama, jika dia tetap menguasai kelebihan dari bagiannya itu maka ia telah melakukan kezaliman, sebab menguasai harta pihak lain. Kezaliman itu menjadi lebih serius sebab yang dia zalimi adalah kerabatnya yang bisa jadi termasuk orang yang nafkahnya menjadi kewajibannya jika orang itu tidak mampu. Sedangkan ahli waris yang mendapat bagian kurang dari bagian yang seharusnya sesuai ketentuan *syari'ah*, maka penguasaannya atas bagian yang diberikan padanya itu adalah sah. Sebab ia menguasai apa yang memang menjadi haknya atas harta waris itu. Namun pada saat yang sama, ia terzalimi sebab sebagian dari bagiannya diambil atau dikuasai oleh pihak lain. Dalam pandangan *syari'ah* ia berhak menuntutnya ke hadapan *qadi*. Nantinya *qadi* akan menentukan bagiannya sesuai *syari'ah* dan mengambilnya dari pihak yang menguasainya untuk dikembalikan kepada orang yang menuntut haknya itu”.³⁰⁰

Aturan kewarisan dalam Islam tentunya untuk menjamin hak-hak ahli waris. Menurut Hasanain Muhammad Makhluḥ seorang pakar hukum Islam dari Mesir yang dikutip Abdul Manan menyatakan bahwa dalam masalah kewarisan Islam mensyari'atkan aturan hukum yang adil, tidak boleh berlaku aniaya atau pengurangan bagian karena menyangkut penetapan hak milik seseorang, yakni hak yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai ahli waris.³⁰¹

Praktik pelaksanaan pembagian warisan pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi tentunya harus sesuai dengan hukum Islam yakni ilmu *Farā'id*. Apalagi sebagian besar masyarakat Kota Besi mayoritas beragama Islam maka sudah barang tentu aturan tentang pembagian warisan

³⁰⁰ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 10

³⁰¹ Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006. h. 121

ini mengacu kepada aturan Islam. Namun pada kenyataannya pelaksanaan pembagian warisan dilaksanakan menurut kebiasaan yang berlaku secara turun temurun yakni secara kekeluargaan. Pelaksanaan pembagian secara kekeluargaan ini memuat prinsip bagi rata atau bagi imbang antara semua ahli waris. Dalam pembagian warisan di sini tidak lagi memandang anak laki-laki maupun anak perempuan, semua punya hak yang sama dan seimbang.

Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan seperti pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi tidaklah dilarang, yang penting dalam praktiknya tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dengan demikian pembagian secara kekeluargaan diperbolehkan, namun syarat pembagian secara kekeluargaan sebagaimana pasal di atas bahwa para ahli waris mengetahui dan menyadari bagiannya masing-masing sebagaimana ilmu *Farā'id*.

Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan kebiasaan secara turun temurun yang berlaku pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi yang dalam hal ini bisa disebut adat atau dalam istilah hukum Islam disebut '*Urf*'. '*Urf*' atau adat kebiasaan mengandung arti apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa

perkataan maupun perbuatan.³⁰² Dalam pengertian lain '*Urf*' adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.³⁰³

Menurut para ahli hukum tidak ada perbedaannya antara '*Urf*' dan adat. '*Urf*' adalah kata bahasa Arab yang terjemahnya dalam bahasa Indonesia cenderung diartikan dengan adat, kebiasaan.³⁰⁴ Para *Fuqaha* memberikan definisi '*Urf*' ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu.³⁰⁵ Dengan demikian adat yang berlaku dalam proses pembagian warisan secara kekeluargaan dan pembagian berimbang antara sesama ahli waris pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi masuk kategori sebagai '*Urf*'.

'*Urf*' yang terjadi pada praktik pembagian warisan pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi belum bisa dikatakan sebagai '*Urf*' yang bisa dijadikan kaidah hukum karena '*Urf*' tersebut harus memiliki atau memenuhi persyaratan sebuah '*Urf*' yang bisa diterima yang tidak bertentangan dengan hukum *syara*'.

'*Urf*' bisa dijadikan sebagai kaidah hukum tentunya harus memiliki syarat sebagaimana Isnan Ansory dalam bukunya *Ilmu Ushul Fiqih* menerangkan syarat diterimanya '*Urf*' sebagai dasar hukum *syari'at*, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan *naş* yang diamalkan;

³⁰² Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal Cet. III*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, h. 109

³⁰³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 161

³⁰⁴ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 92

³⁰⁵ Ibid. h. 93

2. Mengandung *maslahat*;
3. Berlaku pada orang banyak;
4. Sudah berlaku lama;
5. Tidak bertentangan dengan ‘*Urf* yang lain.³⁰⁶

Berdasarkan ketentuan ‘*Urf* di atas, maka adat kebiasaan yang terjadi pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi dalam praktik pelaksanaan pembagian warisan ada yang tidak memenuhi syarat ‘*Urf*. Terdapat praktik pelaksanaan pembagian warisan yang bertentangan dengan *naş* atau bertentangan dengan ketentuan ilmu *Farā`id*, yaitu terdapat kesalahpahaman dalam memahami ahli waris utama sehingga dalam hal penetapan ahli waris terdapat kesalahan, ada ahli waris yang terabaikan haknya sehingga tidak mendapatkan bagian warisan, ahli waris ini adalah ayah dan ibu si mayit.

Ayah dan ibu adalah termasuk ahli waris bersama dengan anak-anak maupun suami atau isteri dan mereka semua berhak mendapatkan bagian harta warisan. Sebagaimana yang tertuang dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 174 ayat 2 dinyatakan: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.³⁰⁷ Dalam kitab-kitab *Fiqh* warispun dijelaskan bahwa jika ahli waris laki-laki dan perempuan bertemu seluruhnya maka yang berhak mendapat bagian dari harta waris hanya lima orang, yaitu: anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu dan suami/isteri.³⁰⁸ Demikian pula sebagaimana yang dikutip Beni Ahmad Saebi

³⁰⁶ Isnan Ansory, *Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017, h. 196

³⁰⁷ Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1999

³⁰⁸ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h.47

dari kitab *Kifayatul Akhyar* bahwa anak, ayah, ibu, suami, dan isteri adalah ahli waris yang tidak putus karena keadaan.³⁰⁹

Hal lain yang bertentangan dengan ilmu *Farā'id* dalam pelaksanaan pembagian warisan pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi adalah kesalahan dalam hal memahami *hijab/mahjub*. Dalam praktiknya ahli waris ayah dan ibu dianggap sebagai terhalang atau *mahjub* karena adanya ahli waris anak kandung sehingga ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian warisan.

Diketahui bahwa dalam praktik pembagian warisan secara hukum Islam hak kewarisan ayah tidak bisa dihalangi, ayah bisa *menghijab* (menghalangi pewarisan) orang lain.³¹⁰ Demikian pula ibu, ia termasuk ahli waris langsung yang berhak menerima warisan dan kedudukannya tidak dapat ditutup oleh ahli waris lainnya.³¹¹

Dapat dipahami bahwa walaupun ada ahli waris anak kandung hak kewarisan bagi ayah dan ibu tidak dapat terhalangi/*terhijab* karena keberadaan mereka. Adapun keberadaan ahli waris anak kandung hanya mempengaruhi kadar penerimaan bagian untuk ayah dan ibu saja, bukan menghalangi sepenuhnya hak kewarisan ayah dan ibu tersebut. Dalam hal ini mengandung arti bahwa bagian ayah dan ibu berbeda kadarnya menyesuaikan ada atau tidak adanya ahli waris anak keturunan *muwaris* yang dalam ilmu

³⁰⁹ Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009. h. 123

³¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10, Terjemah Abdul Hayyie, dkk.* Jakarta: Gema Insani, 2011. h. 383

³¹¹ Destri Budi Nugraheni. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014. h. 96

Farā'id disebut *hijab nuqṣan* yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris..³¹²

Bapak mempunyai tiga kondisi dalam menerima warisan yang masing-masing memberikan bagian yang berbeda dari harta waris yang ditinggalkan oleh anaknya. Bapak bisa mewarisi dengan jalan *farḍ*, *aṣabah*, serta mewarisi dengan jalan *farḍ* dan *aṣabah* berbarengan.³¹³

Adapun ketiga kondisi pewarisan bapak sebagaimana di atas dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Bapak mendapat seperenam itu terjadi jika si mayit memiliki cabang laki-laki baik anak laki-laki atau putera anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, dimana mereka berposisi sebagai *aṣabah bi nafsihi*.³¹⁴
- 2) Bapak mendapat bagian *farḍu* seperenam ditambah menjadi *aṣabah* itu terjadi jika si mayit memiliki cabang (anak atau anak dari anak laki-laki) perempuan.³¹⁵
- 3) Bapak mendapat bagian *aṣabah* saja, kondisi ini terjadi jika si mayit tidak memiliki cabang baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kondisi ini tidak ada ahli waris yang berposisi sebagai *aṣabah* yang lebih diutamakan dari bapak.³¹⁶

³¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 72

³¹³ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 1994. h. 245

³¹⁴ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 171

³¹⁵ Ibid. h. 172

³¹⁶ Ibid. h. 174

Adapun hak kewarisan ibu, ia tetap mewarisi sebagai *zul fara'id* yang bagiannya bisa 1/3 atau 1/6.³¹⁷ Secara rinci ibu mempunyai tiga keadaan dalam mewarisi, yaitu:

- 1) Ibu mendapat bagian *farḍu* seperenam, hal ini jika ada cabang si mayit anak laki-laki, anak perempuan, anak dari anak laki-laki, dua orang atau lebih saudara, baik saudara-saudara kandung, seapak atau seibu.³¹⁸
- 2) Ibu mendapat bagian *farḍu* sepertiga, hal ini terjadi jika ahli waris hanya ibu dan bapak saja, tidak ada ahli waris lainnya.³¹⁹
- 3) Ibu mendapat bagian *farḍu* sepertiga dari sisa, hal ini terjadi jika ahli waris hanya ibu, bapak, suami atau isteri dan tidak ada ahli waris lainnya.³²⁰ Dalam ilmu *Farā'id* hal ini dikenal dengan masalah *garawain*.³²¹

Berdasarkan paparan di atas, sangat jelas bahwa dalam ilmu *Farā'id* ayah dan ibu termasuk ahli waris meski bersama anak keturunan si mayit, suami atau isteri. Mereka tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan warisan. Di samping itu besarnya bagian ahli waris ayah dan ibu sudah jelas ditetapkan dalam ilmu *Farā'id* yaitu ayah mempunyai tiga keadaan dalam hal menerima bagian demikian pula ibu.

Ditinjau dari perspektif '*Urf*', berdasarkan legitimasi *syari'at* menurut Muhthafa Dib al-Bugha dalam bukunya *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha fi*

³¹⁷ Sayuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. h. 70

³¹⁸ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al-Azhar, 2016. h. 190

³¹⁹ Ibid. h. 190

³²⁰ Ibid. h. 190

³²¹ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar, *Terjemah Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, h. 409

al-Fiqh al-Islamy yang dikutip Isnan Ansory, ‘*Urf* dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu ‘*Urf Ṣohih*, ‘*Urf Fasid*, dan ‘*Urf Mursal*.³²² ‘*Urf Ṣahih* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil *syara*`, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.³²³ ‘*Urf fasid* ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, namun berlawanan dengan ketentuan *syari’at*, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.³²⁴ ‘*Urf Mursal* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak dikonfirmasi secara langsung oleh *syari’at* secara positif maupun negatif.³²⁵

Kedudukan hukumnya ‘*Urf Ṣahih* wajib dipertahankan dalam pembinaan hukum *qada* (memutuskan perkara). Seorang *mujtahid* harus memperhatikan ‘*Urf* dalam menetapkan sesuatu hukum dan seorang *qadi* (hakim) harus memperhatikannya pula dalam memutuskan sesuatu perkara. Selama ‘*Urf* tidak menyalahi hukum *syara*` maka wajib memeliharanya.³²⁶ Adapun ‘*Urf* yang *fasid* maka tidak wajib memeliharanya, sebab memelihara adat yang demikian bertentangan dengan dalil *syara*`. ³²⁷

Dengan demikian adat kebiasaan dalam pelaksanaan pembagian warisan yang berlaku secara turun temurun pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi yang dalam hal ini ayah dan ibu tidak

³²² Isnan Ansory, *Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017, h. 192

³²³ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 94

³²⁴ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal Cet. III*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, h. 110

³²⁵ Isnan Ansory, *Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017, h. 193

³²⁶ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 94

³²⁷ Ibid. h. 94

mendapatkan bagian warisan bertentangan dengan hukum *syara'* yaitu ilmu *Farā'id*. Adat kebiasaan ini merupakan '*Urf* yang *fasid* maka tidak wajib untuk memeliharanya karena bertentangan dengan hukum *syara'*. Adat kebiasaan ini harus ditinggalkan atau dihilangkan, sudah saatnya masyarakat muslim kembali kepada aturan sesuai dengan ilmu *Farā'id*. Merupakan kewajiban menutup adat kebiasaan ini, sebagaimana metode *istimbat* hukum *Sad az-zari'ah* yakni wajib untuk menutup jalan yang bisa menimbulkan *muḍarat* dan bertentangan dengan hukum *syar'i*.

Berdasarkan konteks metode "*maṣlahah*" yakni metode yang digunakan dalam penggalian *fiqh* yang memfokuskan diri untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudharatan beserta media-media yang menyertainya.³²⁸ Maka kemaslahatan yang ditimbulkan dalam adat dapat dilihat dari tiga cabang *maṣlahah*, yakni *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulgah*, dan *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah mu'tabarah* adalah nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan didukung *syara'*. *Maṣlahah mulgah* adalah nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak didukung atau bertentangan dengan *syara'* sehingga kemaslahatannya pun ditolak. *Maṣlahah mursalah* adalah menurut pertimbangan akal adanya suatu kemaslahatan atau kebaikan dalam suatu persoalan dan dipandang sejalan pula dengan kehendak *syara'*, kemaslahatan ini tidak didukung dan tidak pula ditolak *syara'*.³²⁹ Dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan

³²⁸ Ibnu Elmi, *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, Malang: Setara Press, 2015, h. 94

³²⁹ Abdul Helim, *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*, Malang: Intelegensia Media, 2018, h. 50

dari adat pembagian warisan sebagaimana pada keluarga ahli waris HR, MA, ID, SD, dan LN di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur adalah termasuk *maṣlahah mulgah* yaitu nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak didukung atau bertentangan dengan *syara'* sehingga kemaslahatannya pun ditolak.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pengabaian hak waris ayah dan ibu di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian warisan secara umum di Kota Besi dilaksanakan berdasarkan sistim kekeluargaan dengan kesepakatan bersama antara para ahli waris. Pembagian warisan seperti ini merupakan adat kebiasaan secara turun-temurun, namun pada pelaksanaannya ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian warisan. Berdasarkan adat kebiasaan harta warisan dibagi habis antara suami atau isteri beserta anak-anak keturunan si mayit, sementara ayah dan ibu terhalang oleh mereka.
2. Pengabaian hak waris ayah dan ibu pada pelaksanaan pembagian warisan di Kota Besi terjadi karena kesalahan dalam memahami *hijab/mahjub* sehingga ahli waris ayah dan ibu dianggap terhalang oleh keberadaan suami atau isteri beserta anak keturunan si mayit. Kesalahan ini karena ketidaktahuan keluarga tentang ilmu *Fara'id* sehingga dalam menetapkan para ahli waris terdapat ahli waris yang tidak termasuk dalam daftar penerima warisan yaitu ayah dan ibu.
3. Berdasarkan ilmu *Farā'id* pembagian warisan di Kota Besi tidak sesuai dengan hukum Islam. Pembagian secara kekeluargaan pada praktiknya mengabaikan hak waris ayah dan ibu karena dianggap *terhijab* atau

terhalang oleh suami atau isteri beserta anak keturunan si mayit. Padahal dalam ilmu *Farā`iḍ* ayah dan ibu termasuk ahli waris utama yang berhak atas harta warisan dan tidak terhalang oleh ahli waris manapun. Praktik pelaksanaan pembagian warisan seperti ini bertentangan dengan ilmu *Farā`iḍ* sehingga adat kebiasaan ini tergolong '*Urf Fasid*.'

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan rekomendasi terkait penelitian di atas sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Muslim dalam pelaksanaan pembagian warisan agar berpedoman kepada hukum Islam yakni ilmu *Farā`iḍ*. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan pembagian warisan sehingga tidak ada ahli waris yang terabaikan haknya.
2. Kepada kaum Muslimin agar mempelajari ilmu *Farā`iḍ* dan mengajarkannya sehingga dalam pembagian warisan mengacu kepada ilmu tersebut. Selain itu untuk menghindari agar ilmu *Farā`iḍ* tidak segera hilang dalam masyarakat.
3. Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan KUA Kecamatan agar bisa mensosialisasikan ilmu *Farā`iḍ* kepada masyarakat luas sebagai pedoman dalam pembagian warisan masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya. *Ilmu Waris Praktis*. Bogor: Al Azhar Freshzone, 2016
- Albantany, Nur'aisyah. *Pembagian Harta Warisan dalam Islam untuk Wanita*.
Tangerang: Sealova Media, 2014
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap (penjelasan hukum-hukum Islam)*
Madzhab Syafi'i. Cet.10. Solo: Media Zikir, 2010
- Aldizar dan H. Fathurrahman. *Terjemah Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*.
Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika,
2007
- _____. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Cet. II*,
Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (BW)*
Cet. III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Ansory Isnain. *Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam*. Jakarta: Rumah
Fiqih Publishing, 2017
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- As-Siddiqi, T.M. Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10, Terjemah Abdul Hayyie, dkk.*
Jakarta: Gema Insani, 2011

- Bisri, Adib. *Kamus Indonesia Arab-Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid I*, Jakarta: PT Ichtiar baru Van Houve, 1996
- Daud, Alfani. *Islam & Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1999
- _____. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta, 2001
- _____. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Kathoda, 2005
- _____. *Al-Qur'an*, Klaten: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Dillah, Suratman Philip. *Metode Penelitian Hukum Cet.III*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Sayariah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Fathur Rachman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971
- Fuady Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung, 1997

Hasan, Ahmadi. *Disertasi: Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar*, Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2007

Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

_____ *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal Cet. III*,
Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017

Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1968

Helim, Abdul. *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*,
Malang: Intelegensia Media, 2018

Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Jahar, Asep Saepudin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Cet VI. Bandung: Citra Umbara, 2013

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Cet. II. Bandung: Citra Umbara, 2017

Komite Fakultas Syariah Al-Azhar. *Terjemah Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil Islami*.
alih bahasa H. Aldy Aldizar dan H. Fathurrahman Jakarta: Senayan
Abadi Publishing, 2004

Kusno, Muhammad. *Musyawaharah dalam Miriam Budiarjo (Ed) Masalah Kenegaraan*, Jakarta, 1971

Laksanto, Utomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Lubis, Suhrawardi. K dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar
Grafika, 2008

- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia Cet. IV*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2005
- Muhibbin, Moh. dan Abddul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Musbikin, Imam, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001
- Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003
- Nugraheni, Destri Budi dan Haniah Ilhami. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Oemarsalim, SH. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia Cet.II*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991

- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris Cet. II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam cet ke 77*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1998
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Bairut: Darul Fikr, 1995
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 14*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1994
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Saepudin, Asep. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Prenadanadia Group, 2013
- Salman, Otje H.R dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam Cet. III*. Bandung: Refika Aditama, 2010
- Sarmadi, H. A. Sukris. *Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Cet. II*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012
- Sarwat, Ahmad. *Pelatihan Dasar Faraidh Cet. II*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017
- _____ *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017

Sembiring, Rosnindar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*.

Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek cet II*.

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta, 2006

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*

Cet. IV. Bandung: PT Refika Aditama, 2014

Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015

Sutantio, Retnowulan. *Wanita dan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam Cet. III*. Jakarta: Kencana, 2008

Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: CV.

Pionir Jaya, 1987

Taslim, Anshari. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Jakarta: Hanif Press, 2006

Thalib, Sayuti. *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina

Aksara, 1980

_____. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika,

2018

Tohirin. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan*

Konseling. Jakarta: Rajawali Prsess, 2012

Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Cet. III*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

_____. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

Pelu, Ibnu Elmi AS dan Abdul Helim. *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, Malang: Setara Press, 2015

Yani, Achmad. *Faraidh Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Mahfud, Moh. MD, *Penegakan Hukum dan Kelola Pemerinyahan Yang Baik, Bahan pada acara seminar nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009*

Faiz, Pan Mohamad, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009)

<https://kbbi.id/damai>.

<https://taufananggriawan.wordpress.com/pengertian-adil/diakses>

<https://www.anekamakalah.com/2012/02/keadilan-dalam-alquran.html>

<https://www.kompasiana.com/michaelkabatana/teori-keadilan-john-rawls-dan-tanggapan-atas-teorinya>

<http://eprints.undip.ac.id/15158/1/MINTARNO.pdf>

<http://eprints.walisongo.ac.id/4294/>

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6540/>

CURRICULUM VITAE

1. Nama : H. Ayyub Anshari
2. Tempat Tanggal lahir : Kota Besi, 03 Januari 1979
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Gg. PDAM Kuala Pembuang Kab. Seruyan
5. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
6. Pendidikan : - SDN Kota Besi Hilir I
- MTS Darussalam Kota Besi
- MAN Sampit
- S.1 Syari'ah STAIN Palangka raya
7. Nama Ayah : H. Arif Effendi, S. Pd.I
8. Nama Ibu : Hj. Siti Hamsyah
9. Nama Isteri : Yuyun Siti mayasari, S. Pd
10. Anak : - Zahra Humaira
- Azzam Algifari
- Amira Fatimatuzzahra
11. Pengalaman Jabatan : - PPPN Pada KUA Kec. Seruyan Hulu
- Kepala KUA Kec. Seruyan Hulu
- Penyusun Laporan Keuangan Kemenag Kab. Seruyan
- Penyusun Rencana Program dan Anggaran Kemenag Kab. Seruyan

Kuala Pembuang, Oktober 2019

Penulis,

H. AYYUB ANSHARI



KEPUTUSAN DIREKTUR
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA
Nomor : 2// Tahun 2018

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS
MAHASISWA PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2018

- Menimbang** : Bahwa untuk menunjang proses bimbingan tesis pada Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya, perlu ditetapkan tim pembimbing (Pembimbing 1 dan Pembimbing 2)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Kepres nomor : 144 tentang perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/01152.1 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya masa jabatan 2015-2019;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 08 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada PTAI tahun 2013.
7. Pedoman Akademik Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
- Menetapkan** : 1. Menetapkan dan menugaskan kepada :
- Nama : Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
Unit Kerja : Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya
Tugas : Pembimbing 1
Nama : Dr. Sabian Utsman, SH., M.Si
Unit Kerja : Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya
Tugas : Pembimbing 2
- Kepada dosen yang bersangkutan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membimbing penulisan proposal dan tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya :
- Nama : Ayyub Anshari
NIM : 17014050
Prodi : Magister Hukum Keluarga
Judul : "Sistematika Penetapan Ahli Waris di Kecamatan Kota Besi Kab. Kotawaringin Timur"
2. Segala Biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2017, dengan rincian pembimbing satu sebesar Rp. 250.000,- dan pembimbing dua sebesar Rp. 200.000,-
3. Tugas pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan proposal tesis dan bertanggung jawab sampai mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian proposal tesis.
4. Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan dan disampaikan kepada masing-masing pihak dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Palangka Raya,
Pada tanggal : 01 Oktober 2018
Direktur,

Dr. H. Sardini, M. Ag
NIP. 19880108 199402 1001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palangka Raya;
2. Ketua Prodi S2 Magister Hukum Keluarga ;
3. Bendaharawan IAIN Palangka Raya;
4. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag (Pembimbing I);
5. Dr. Sabian Utsman, SH., M.Si (Pembimbing II);
6. Sdr. Ayyub Anshari;
7. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : pasca@iain-palangkaraya.ac.id
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

Palangka Raya, 29 April 2019

Nomor : B-138/In.22/IV/PP.00.9/04/2019
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Mohon Izin Riset

Kepada.
Yth. Camat Kecamatan Kota Besi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi S2 di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada:


Nama	: Ayyub Anshari
NIM	: 17014050
Program Studi	: Magister Hukum Keluarga (MHK)
Jenjang	: Magister (S2)
Lokasi Penelitian	: Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur
Judul Tesis	: Pengabdian Hak Waris Ayah dan Ibu pada Pelaksanaan Pembagian Warisan di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur
Waktu pelaksanaan	: Dua Bulan (29 April – 29 Juni 2019)

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Pascasarjana,




Dr. H. Sardimi, M. Ag
NIP. 196801081994021001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor IAIN Palangka Raya;
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN KOTA BESI

Jln. Pangeran Diponegoro No. 02 Kode Pos 74353
Telp / Fax 0531 32303

Kota Besi, 7 Mei 2019

K e p a d a

Nomor : 071 / 147/V/UP/2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pelaksanaan Riset di
Kecamatan Kota Besi

Yth. Direktur Pasca Sarjana IAIN
Palangka Raya

Di -
Palangka Raya

Menanggapi surat Direktur IAIN Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya Nomor : B-138/In.22/IV/PP.00.9/04/2019 Tanggal 29 April 2019, Perihal Mohon Izin Riset. Bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya An.AYYUB ANSHARI untuk melaksanakan Riset di Kecamatan Kota Besi.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



KOTA BESI

ANUK MONIRAHAYU, SSTP.M.Si
NIP. 19781104 199711 2 001

PALANGKARAYA

PERTANYAAN PENELITIAN

A. Pembagian warisan secara umum di Kota Besi Kecamatan Kota besi kabupaten Kotawaringin Timur.

1. Apakah dalam keluarga anda membagi harta warisan peninggalan dari Almarhum/Almarhumah?
2. Apakah dalam membagi harta warisan berpedoman pada hukum Islam?
3. Apakah anda memahami tentang tata cara pembagian warisan dalam hukum Islam?
4. Apakah dalam membagi harta warisan berpedoman pada hukum BW?
5. Apakah anda memahami tentang tata cara pembagian warisan dalam hukum BW?
6. Apakah dalam membagi harta warisan berpedoman pada hukum Adat?
7. Apakah anda memahami tentang tata cara pembagian warisan dalam hukum Adat?
8. Bagaimana proses pembagian harta warisan yang dilakukan dalam keluarga anda?

B. Pengabaian hak waris ayah dan ibu pada pelaksanaan pembagian warisan di Kota Besi Kecamatan Kota besi kabupaten Kotawaringin Timur.

1. Bagaimana proses penentuan para ahli waris sebagai penerima harta warisan dari Almarhum/Almarhumah?
2. Siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bagian harta warisan peninggalan Almarhum/Almarhumah?
9. Mengapa ayah dari Almarhum/Almarhumah tidak mendapatkan bagian harta warisan?
10. Mengapa ibu dari Almarhum/Almarhumah tidak mendapatkan bagian harta warisan? Apakah Almarhum/Almarhumah masih memiliki ayah yang masih hidup?

11. Apakah ayah termasuk sebagai ahli waris?
12. Apakah ayah mendapatkan bagian warisan?
13. Berapa besar bagian ahli waris ayah?
14. Apakah Almarhum/Almarhumah masih memiliki ibu yang masih hidup?
15. Apakah ibu termasuk sebagai ahli waris?
16. Apakah ibu mendapatkan bagian warisan?
17. Berapa besar bagian ahli waris ibu?

C. Tinjauan hukum *Farā'id* tentang pembagian warisan bagi ayah dan ibu di Kota Besi Kecamatan Kota besi kabupaten Kotawaringin Timur.

1. Apakah Almarhum/Almarhumah mempunyai anak?
2. Apakah anak-anak dari Almarhum/Almarhumah mendapatkan bagian warisan?
3. Berapa besar bagian ahli waris anak laki-laki?
4. Berapa besar bagian ahli waris anak perempuan?
5. Apakah Almarhum/Almarhumah mempunyai suami/isteri?
6. Apakah suami dari Almarhumah mendapatkan bagian warisan?
7. Berapa besar bagian ahli waris suami?
8. Apakah isteri dari Almarhum mendapatkan bagian warisan?
9. Berapa besar bagian ahli waris isteri?